KATA PENGANTAR

Buku Anotasi Peraturan Perundang-undangan Pertanahan Jilid I ini merupakan wujud komitmen kami dalam menerbitkan buku-buku referensi sebagai sarana penelusuran produk hukum peraturan perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan pertanahan selama tahun 1950 hingga 2012.

Cakupan dalam Buku Anotasi ini mencatat perkembangan *Undang-Undang, Undang-Undang Darurat, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Penetapan Presiden Yang Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Presiden yang Menjadi Undang-Undang.*

Sebagai alat dokumentasi hukum yang menelusuri rangkaian hubungan pelaksanaan serta status tiap-tiap ketentuan hukum, kami yakin buku Anotasi ini akan dapat membantu penelusuran peraturan perundang-undangan yang muktahir, bagi para profesi hukum, peneliti, dunia usaha, masyarakat dan pemerintah serta memungkinkan langkah-langkah kearah kepastian hukum yang didambakan khususnya yang berkaitan dengan hukum-hukum pertanahan.

Format, tata letak maupun penyusunan dalam buku anotasi ini mengacu pada konsep TAPIS (Gregory Chruchill dan Wirawan Martoredjo, Pedoman Pembuatan Tabel Penunjuk Inti Sari Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta).

Kami berharap buku anotasi ini, walaupun dalam penyusunannya terdapat kekuranglengkapan, semoga dapat membantu para profesi hukum, peneliti, dunia usaha, masyarakat dan pemerintah sebagai alat dokumentasi hukum untuk menelusuri rangkaian hubungan, pelaksanaan serta status tiap-tiap ketentuan hukum, terutama yang berkaitan dengan pertanahan.

Jakarta, September 2012
Kepala Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat

Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP. 19610617 198803 1 001

TIM PELAKSANA KEGIATAN

PENYUSUNAN ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERTANAHAN

Pengarah	:	Managam Manurung, S.H., M.Kn. (Sekretaris Utama)
Penanggung Jawab	:	Dr. Kurnia Toha, S.H., LL.M. (Kepala Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat)
Ketua	:	Luki Ambarwinarti, S.E. (Kepala Bidang Sistem Jaringan dan Dokumentasi Informasi (SJDI) Hukum)
Sekretaris	:	Tanti Wahyuni, S. Kom. (Kepala Sub Bidang Pengembangan Jaringan Hukum)
Anggota	:	1. Reiner Manurung, S.H. (Kepala Bidang Perundang-undangan) 2. Dwi Tjahyani Novianingsih, S.H. (Kepala Sub Bidang Publikasi, Distribusi dan Dokumentasi)

3. Ir. Ahmad Syaikhu.
   (Kepala Sub Bidang Penyusunan dan Evaluasi)
4. Retna Kustiyah, S.H., M.M.
   (Kepala Sub Bidang Pertimbangan dan Bantuan Hukum)
5. Drs. Frederik Warwer
   (Kepala Sub Bidang Pengumpulan Informasi, Media Center dan Hubungan Antar Lembaga)
6. Riniwasitaningsih, S.SiT.
   (Staf Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat)
7. Nurkhalisah Ismail, S.H.
   (Staf Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat)
8. Ali Nurinayah, S.H.
   (Staf Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat)
9. Bambang Sucipto, S.H.
   (Staf Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat)
10. Tuti Rohayati, S.H.
    (Staf Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat)
11. Agus Setiyadi, S. SiT.
    (Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat Utama)

12. Musthofa, S.P.
    (Staf Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat
13. Arif Febriyanto, S.H.
    (Staf Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat)
14. Eldi, S.H., M.H.
    (Widyaiswara)
15. Yanti Kusumadewi
    (Staf Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat)
16. Hesty Febriarty
    (Staf Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat)

Terbit Tahun 2012

Diterbitkan Oleh :
Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat
Badan Pertanahan Nasional RI
Jalan Sisingamangaraja No. 2 Kebayoran Baru
Jakarta

DAFTAR SINGKATAN STATUS
BERDASARKAN KALIMAT-KALIMAT
YANG DITEMUKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

B | Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan dasar Pokok-pokok Agraria. Disahkan pada
A | tanggal 24 September 1960.
i : Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Pelaksanaan Ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria.

Singkatan Status	Keterangan	
c	B dicabut oleh A	(A mencabut B)
h	B dihapuskan oleh A	(A menghapuskan B)
i	B diingat dalam A	(A mengingat B)
mb	B dinyatakan berlaku oleh A	(A menyatakan B berlaku)
p	B diperhatikan dalam A	(A memperhatikan B)
sah	B disahkan oleh A	(A mensahkan B)
t	B ditimbang (dipertimbangkan) dalam A	(A menimbang B)
tbl	B dinyatakan tidak berlaku oleh A	(A menyatakan B tidak berlaku)
tbps	B dinyatakan tidak berlaku pada saat undang-undang yang menggantinya mulai berlaku oleh A	(A menyatakan bahwa B tidak berlaku pada saat undang-undang yang menggatinya mulai berlaku)
tmb	B ditambah oleh A	(A menambah B)
u	B diubah (dirubah) oleh A	(A mengubahkan (merubahkan) B)
uu	B diangkat menjadi (ditetapkan menjadi) undang-undang oleh A	(A mengundangkan B)

SINGKATAN DAN AKRONIM
YANG TERDAPAT DALAM BUKU

BPN	:	Badan Pertanahan Nasional
D.I	:	Daerah Istimewa
D.I.Y	:	Daerah Istimewa Yogyakarta
Dati I	:	Daerah Tingkat I
Dati II	:	Daerah Tingkat II
DDN	:	Departemen Dalam Negeri
dg	:	dengan
DIRJEN	:	Direktur Jenderal
DJA	:	Direktorat Jenderal Agraria
Dlm	:	Dalam
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPR-GR	:	Dewan Perwakilan Rakyat-Gotong Royong
IB	:	Instruksi Bersama
IKBPN	:	Instruksi Kepala Badan Pertanahan Nasional
IMDN	:	Instruksi Menteri Dalam Negeri
IMNA/KBPN	:	Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala BPN
INPRES	:	Instruksi Presiden
IPLP	:	Instruksi Panitia Landreform Pusat
IYDL	:	Instruksi Yayasan Dana Landreform
Jo.	:	Juncto
Kab.	:	Kabupaten
Kec.	:	Kecamatan
KEPDIRJEN	:	Keputusan Direktur Jenderal
KEPKBPN	:	Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional
KEPMEN	:	Keputusan Menteri
KEPMEN PERTAMA	:	Keputusan Menteri Pertama

KEPPRES	:	Keputusan Presiden
KMA	:	Keputusan Menteri Agraria
KMDN	:	Keputusan Menteri Dalam Negeri
KMMA	:	Keputusan Menteri Muda Agraria
KMNA/KBPN	:	Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN
KMPA	:	Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria
Lamp.	:	Lampiran
LN	:	Lenbaran Negara
MK RI	:	Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
MPR	:	Majelis Permusyawaratan Rakyat
MPRS	:	Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
N.V	:	Naamloooze Vennootschap
No.	:	Nomor
PED. MPA	:	Pedoman Menteri Pertanian & Agraria
PED. DEP. AGR.	:	Pedoman Departemen Agraria
PEDPEL	:	Pedoman Pelaksanaan
Pelaks.	:	Pelaksana
PENGUM. DEP. AGR.	:	Pengumuman Departemen Agraria
PERDIRJEN	:	Peraturan Direktur Jenderal
PERKBPN	:	Peraturan Kepala badan Pertanahan Nasional
PERMEN	:	Peraturan Menteri
PERPRES	:	Peraturan Presiden
PERPU	:	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Persero	:	Perusahaan Perseroan
Perum	:	Perusahaan Umum
PMA	:	Peraturan Menteri Agraria
PMDN	:	Peraturan Menteri Dalam Negeri
PMMA	:	Peraturan Menteri Muda Agraria
PMNA/KBPN	:	Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN
PMPA	:	Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria
PN	:	Perusahaan Negara

PNS	:	Pegawai Negeri Sipil
PP	:	Peraturan Pemerintah
Prop.	:	Provinsi
Prp.	:	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Ps.	:	Pasal
PT.	:	Perseroan Terbatas
Put.	:	Putusan
R.I	:	Republik Indonesia
R.I.S	:	Republik Indonesia Serikat
S.D.	:	Sampai Dengan
SE KBPN	:	Surat atau Surat Edaran Kepala BPN
SE MA	:	Surat atau Surat Edaran Menteri Agraria
SE MDN	:	Surat atau Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
SE MMA	:	Surat atau Surat Edaran Menteri Muda Agraria
SE MNA/KBPN	:	Surat atau Surat Edaran Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN
SE MPA	:	Surat atau Surat Edaran Menteri Pertanian dan Agraria
SE PLP	:	Surat atau Surat Edaran Panitia Landreform Pusat
SE SESMEN	:	Surat atau Surat Edaran Sekretaris Menteri
SE WKBPN	:	Surat atau Surat Edaran Wakil Kepala BPN
SE YDL	:	Surat atau Surat Edaran Yayasan Dana Landreform
SKB	:	Keputusan Bersama
Stbl.	:	Staatsblad
TAP MPR	:	Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
TAP MPRS	:	Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
Tbk.	:	Terbuka
TLN	:	Tambahan Lembaran Negara
Ttg	:	Tentang
UU	:	Undang-undang

UU Pnps	:	Penetapan Presiden yang Menjadi Undang-Undang
UU Prps	:	Peraturan Presiden yang Menjadi Undang-Undang
UUD 1945	:	Undang-Undang Dasar 1945
UUDRT	:	Undang-Undang Darurat
Wil	:	Wilayah
Yg	:	Yang

PEDOMAN PENGGUNAAN

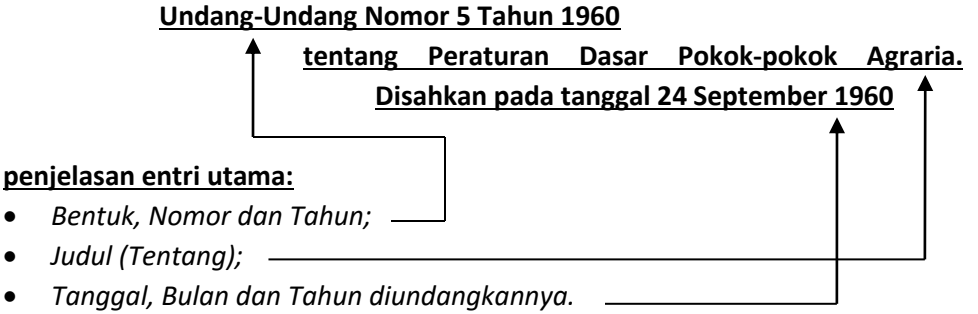
Pekerjaan menyusun buku Anotasi merupakan pekerjaan membaca bahan-bahan hukum secara teliti dan konsisten mencatat keterangan-keterangan yang secara khusus disebut dalam Peraturan Perundangan-Undangan, seperti didalam *konsideransnya* dengan pokok penyebutannya berupa: **ditimbang, diingat, didengar, atau diperhatikan** atau di dalam pasal-pasalnya dimana pokok penyebutan berupa: **dibatalkan, dicabut, dihapus, diubah, diingat, dinyatakan tidak berlaku** dan sebagainya.

Ketika mencari suatu undang-undang dan menemukannya, timbul pertanyaan apakah undang-undang tersebut yang paling mutakhir? Masih berlaku atau sudah dicabut? Peraturan-peraturan apa saja yang menjadi pelaksana dari undang-undang tersebut? Dan pertanyaan itu mengalir terus seiring dengan tingkat kebutuhan yang diperlukan sehingga kelengkapannya tidak diragukan lagi. Buku Anotasi ini disusun dengan sederhana untuk dapat mengatasi kendala-kendala tersebut di atas setidaknya hingga tahun 2012 disusun dari sumber himpunan yang diperoleh dari koleksi, dokumentasi dan informasi di Bidang Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat BPN RI.

Guna memudahkan pengguna, sebagai panduan kami sertakan di bawah ini beberapa contoh entri anotasi yang dapat membantu pengguna mencari dan memanfaatkan keterangan yang dicatat di bawah entri tersebut.

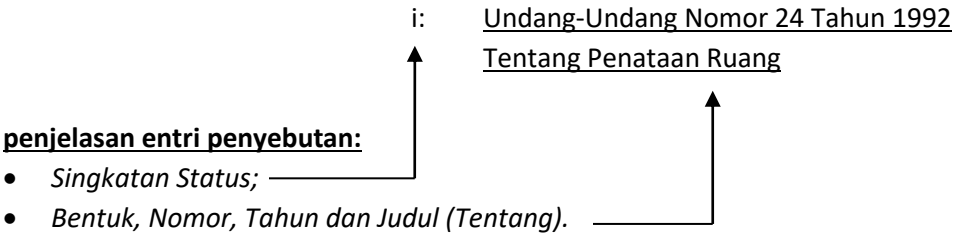
Entri Utama.

Sebagai entri utama dalam buku anotasi tercetak dengan huruf **tebal (bold)** disusun berdasarkan urutan bentuk, nomor, dan tahun.



Entri Penyebutan

Pecatatan entri penyebutan dalam buku anotasi ini adalah pencatatan semua peraturan-peraturan yang berkaitan setelah peraturan itu diundangkan sampai dengan tahun 2012, dan disusun berdasarkan **Bentuk**, **Nomor** dan **Tahun Peraturan**. *Singkatan status*, seperti **t**, **i** dan **tbl**, letaknya di bagian depan setiap barisnya, yang tetap disusun berdasarkan bentuk, nomor dan tahun.



Di bawah ini beberapa contoh entri yang ada pada buku anotasi secara lengkap.

1. **Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 Tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda yang diundangkan pada tanggal 31 Desember 1958.**

Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958
tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda. Disahkan Pada Tanggal 27 Desember 1958.

i: Keputusan Menteri Pertanian Dan Agraria Nomor Sk. 37/Ka/1964 Tentang Memperpanjang Jangka Waktu Pendaftaran Tersebut Pada Keputusan Menteri Pertanian Dan Agraria Nomor Sk.8/Ka/1963.

i: Keputusan Menteri Agraria Nomor Sk. 5/Depag/1965 Tentang Memperpanjang Jangka Waktu Pendaftaran Tersebut Pada Surat Keputusan Menteri Pertanian Dan Agraria Nomor Sk.8/Ka/1963 Bagi P.N.P.R. Wisayayasa.

Entri ini berarti bahwa *Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 Tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda* yang diundangkan pada tanggal 31 Desember 1958 telah *diingat (i)* oleh Keputusan Menteri Pertanian Dan Agraria Nomor Sk. 37/Ka/1964 dan Keputusan Menteri Agraria Nomor Sk. 5/Depag/1965.

2. **Undang-Undang No. 37 Prp tahun 1960 tentang Pertambangan yang diundangkan pada tanggal 14 Oktober 1960.**

Undang-Undang No. 37 Prp tahun 1960
tentang Pertambangan. Disahkan pada tanggal 14 Oktober 1960.

c: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

Entri ini berarti bahwa *Undang-Undang No. 37 Prp tahun 1960 tentang Pertambangan* yang diundangkan pada tanggal 14 Oktober 1960 telah *dicabut (c)* oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian yang diundangkan pada tanggal 31 Maret 1992

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992
tentang Keimigrasian. Disahkan pada tanggal 31 Maret 1992.

i: Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing.

i: Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 1996 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing.

c: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

tbl: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Entri ini berarti bahwa *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian* yang diundangkan pada tanggal 31 Maret 1992 telah *diingat (i)* oleh Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1996 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 1996, telah *dicabut (c)* oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, dan telah *dinyatakan tidak berlaku lagi (tbl)* oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011.

DAFTAR ISI

Kata pengantar i

Daftar Singkatan Status v

Singkatan dan Akronim vi

Pedoman Penggunaan x

Daftar Isi

Anotasi Peraturan Perundang-Undangan

Tahun 1950 1

Tahun 1951 10

Tahun 1952 12

Tahun 1953 15

Tahun 1954 17

Tahun 1955 19

Tahun 1956 21

Tahun 1957 36

Tahun 1958 43

Tahun 1959 54

Tahun 1960 63

Tahun 1961 103

Tahun 1962 106

Tahun 1963 107

Tahun 1964 109
Tahun 1965 116
Tahun 1967 120
Tahun 1968 125
Tahun 1969 128
Tahun 1970 132
Tahun 1971 134
Tahun 1972 135
Tahun 1973 136
Tahun 1974 137
Tahun 1975 146
Tahun 1979 147
Tahun 1980 149
Tahun 1982 150
Tahun 1983 152
Tahun 1984 157
Tahun 1985 158
Tahun 1986 164
Tahun 1987 165
Tahun 1990 166
Tahun 1991 169
Tahun 1992 170

Tahun 1993 181
Tahun 1994 182
Tahun 1995 185
Tahun 1996 188
Tahun 1997 192
Tahun 1998 200
Tahun 1999 202
Tahun 2000 248
Tahun 2001 258
Tahun 2002 265
Tahun 2003 270
Tahun 2004 289
Tahun 2005 325
Tahun 2006 332
Tahun 2007 334
Tahun 2008 347
Tahun 2009 361
Tahun 2010 368
Tahun 2011 369
Tahun 2012 371

Daftar Peraturan Perundang-undangan berkaitan dengan Pelaksanaan UU No. 86 Tahun 1958 Tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Milik Belanda 372

Daftar Peraturan Perundang-undangan berkaitan dengan Pelaksanaan Peraturan Presidium Kabinet Dwikora RI No. 5/Prk/Tahun 1965 tentang Penegasan Status Rumah/Tanah Kepunyaan Badan-Badan Hukum yang Ditinggalkan Direksi/Pengurusnya 377

Daftar Peraturan Perundang-Undangan Pelaksanaan UU No. 3 Prp Tahun 1960 Tentang Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda 378

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 1950

UNDANG-UNDANG TAHUN 1950

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950. (Yogyakarta)

Tentang Jenis dan Bentuk Peraturan yang Dikeluarkan Oleh Pemerintah Pusat. Disahkan pada tanggal 2 Pebruari 1950.

c : UU No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950. (Yogyakarta)

Tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur. Disahkan pada tanggal 3 Maret 1950

u : UU No. 18 Tahun 1950 tentang Perubahan UU No. 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950. (Lembaran Negara RI)

Tentang Menetapkan Undang-Undang darurat tentang penerbitan Lembaran Negara dan Berita Negara R.I.S. dan tentang Mengeluarkan, Mengumumkan dan mulai berlakunya Undang-Undang Federal dan Pengumuman Pemerintah. Disahkan pada tanggal 15 Mei 1950. (LN No. 32)

t : Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1950 tentang Penerbitan Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat tentang Mengeluarkan, Mengumumkan dan mulai berlakunya Undang-Undang Federal dan Pengumuman Pemerintah.

c : UU No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950. (Jogjakarta)

Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Disahkan pada tanggal 3 Maret 1950.

u : UU No. 19 Tahun 1950 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta.

u : UU No. 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta.

t : KEPPRES Nomor 33 Tahun 1984 Tentang Pemberlakuan Sepenuhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

i : KEPPRES Nomor 33 Tahun 1984 Tentang Pemberlakuan Sepenuhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

t : UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

i. : UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950. (Jogyakarta)

Tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah. Disahkan Pada Tanggal 4 Juli 1950.

i : Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1955 Tentang Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Peraturan-Peraturan Yang Dimaksud Dalam Pasal 6 Undang-Undang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Di Jawa.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Perubahan Batas Wllayah Kota Tegal Dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah Di Muara Sungai Kaligangsa.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950. (Jogjakarta)

Tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat. Disahkan Pada Tanggal 4 Juli 1950.

i : Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1955 Tentang Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Peraturan-Peraturan Yang Dimaksud Dalam Pasal 6 Undang-Undang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Di Jawa.

i : UU No. 15 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok Dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon.

i : UU No. 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Propinsi Banten.

i : UU No. 9 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Cimahi.

i : UU No. 10 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya.

i : UU No. 27 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Banjar Di Provinsi Jawa Barat.

i : UU No. 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat Di Provinsi Jawa Barat.

i : Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 Tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur. Disahkan pada tanggal 8 Agustus 1950

i : Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1955 Tentang Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Peraturan-Peraturan Yang Dimaksud Dalam Pasal 6 Undang-Undang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Di Jawa.

u : UU No. 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, jawa tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta.

i : UU No. 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2003 Tentang Penghapusan Kota Administratif Kisaran, Kota Administratif Rantau Prapat, Kota Administratif Batu Raja, Kota Administratif Cilacap, Kota Administratif Purwokerto, Kota Administratif Klaten, Kota Administratif Jember, Dan Kota Administratif Watampone.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Malang Dari Wilayah Kota Malang Ke Wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Malang Dari Wilayah Kota Malang Ke Wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950. (Jogjakarta)

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah. Disahkan Pada Tanggal 8 Agustus 1950.

i : Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1955 Tentang Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Peraturan-Peraturan Yang Dimaksud Dalam Pasal 6 Undang-Undang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Di Jawa.

u : UU No. 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (LN No.52);

i : Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2003 Tentang Penghapusan Kota Administratif Kisaran, Kota Administratif Rantau Prapat, Kota Administratif Batu Raja, Kota Administratif Cilacap, Kota Administratif Purwokerto, Kota Administratif Klaten, Kota Administratif Jember, Dan Kota Administratif Watampone.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Perubahan Batas Wllayah Kota Tegal Dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah Di Muara Sungai Kaligangsa.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950. (Jogjakarta)

Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat. Disahkan Pada Tanggal 8 Agustus 1950.

u : UU No. 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat. (LN No. 31).

i : KEPPRES Nomor 48 Tahun 1983 tentang Penanganan Khusus Penataan Ruang dan Penertiban serta Pengendalian Pembangunan pada Kawasan Pariwisata Puncak dan Wilayah Jalur Jalan Jakarta-Bogor-Puncak-Cianjur di luar wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Bogor, Kota Administratif Depok, Kota Madya Cianjur, dan Kota Cibinong.

i : KEPPRES Nomor 79 Tahun 1985 Tentang Penetapan Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Puncak.

i : UU No. 15 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok Dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon.

i : UU No. 9 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Cimahi.

i : UU No. 10 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya.

i : UU No. 27 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Banjar Di Provinsi Jawa Barat.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Tasikmalaya Dari Wilayah Kota Tasikmalaya Ke Singaparna Di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

i : UU No. 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat Di Provinsi Jawa Barat.

i : UU No. 32 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Serang Di Provinsi Banten.

i : UU No. 51 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten.

Undang-Undang Darurat Nomor 15 Tahun 1950. (Jogjakarta)

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta. Disahkan Pada Tanggal 8 Agustus 1950.

u : UU No. 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Darurat Nomor 15 Tahun 1950 Untuk Penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulon-Progo dan Adikanto dalam Lingkungan Daerah istimewa Jogjakarta menjadi Satu Kabupaten dengan Nama Kulon-Progo (LN No. 101).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950. (Jogjakarta)

Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Disahkan Pada Tanggal 14 Agustus 1950.

u : UU No. 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-kota Besar Dan Kota-kota Kecil Di Jawa.

i : UU No. 13 Tahun 1954 Tentang Pengubahan Undang Undang Nomor 16 Dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota Kota Besar Dan Kota Kota Kecil Di Jawa.

i : Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1955 Tentang Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Peraturan-Peraturan Yang Dimaksud Dalam Pasal 6 Undang-Undang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Di Jawa.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Perubahan Batas Wllayah Kota Tegal Dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah Di Muara Sungai Kaligangsa.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Malang Dari Wilayah Kota Malang Ke Wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950. (Jogjakarta)

Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi DJawa Timur. Disahkan pada tanggal 14 Agustus 1950.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1950. (Jogjakarta)

Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta. Disahkan pada tanggal 14 Agustus 1950.

u : UU No. 9 Tahun 1955 tentang Pengubahan Undang-Undang No. 3 Jo. No. 19 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Undang-Undang Darurat Nomor 36 Tahun 1950.

Tentang Penetapan Berlakunya UU, UU darurat dan Ordonansi-Ordonansi megenai Masalah-masalah Pajak Dikeluarkan sebelum Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disahkan pada tanggal 30 Desember 1950. (LN No. 79 & TLN No. 72)

i : UU No. 14 Tahun 1951 tentang Penggantian Pajak Bumi dengan Pajak Peralihan 1944.

uu : UU No. 4 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang, Undang-Undang Darurat Dan Ordonansi-Ordonansi Mengenai Masalah-Masalah Pajak, Dikeluarkan Sebelum Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang_Undang Darurat Nomor 36 Tahun 1950) Sebagai Undang-Undang.

Undang-Undang Darurat Nomor 37 Tahun 1950.

Tentang Perubahan Ordonansi Peralihan 1944, Ordonansi Pajak Upah dan Ordonansi Pajak Kekayaan 1932. Disahkan pada tanggl 30 Desember 1950. (LN No. 79 & TLN No. 72)

tmb : Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1951 tentang Tambahan UU Darurat No. 37 Tahun 1950 tentang Perubahan Ordonansi Padjak Peralihan 1944, Ordonansi Padjak Upah dan Ordonansi Padjak Kekayaan 1932.

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TAHUN 1950 (PERPU TAHUN 1950)

PERPU Nomor 3 Tahun 1950

Tentang Pembentukan Propinsi Sumatera Selatan. Disahkan pada tanggal 14 Agustus 1950.

u : UU Darurat No. 16 Tahun 1955 tentang Pengubahan PERPU Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Sumatera.

uu : UU No. 25 Tahun 1959 tentang Penetapan "PERPU No. 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Sumatera Selatan dan UU Darurat No. 16 Tahun 1955 tentang Pengubahan PERPU Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Sumatera.

PERPU Nomor 4 Tahun 1950

Tentang Pembentukan Propinsi Sumatera Tengah. Disahkan pada tanggal 14 Agustus 1950.

u : UU Darurat No. 16 Tahun 1955 tentang Pengubahan PERPU Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Sumatera.

c : UU Darurat No. 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau. (LN No. 75)

PERPU Nomor 5 Tahun 1950

Tentang Pembentukan Propinsi Sumatera Utara. Disahkan pada tanggal 14 Agustus 1950.

u : UU Darurat No. 16 Tahun 1955 tentang Pengubahan PERPU Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Sumatera.

t : UU No. 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.

u : UU No. 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (PERPU No.5 Tahun 1950).

c : UU No. 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 1951

UNDANG-UNDANG TAHUN 1951

Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1951

Tentang tentang Tambahan Undang-Undang Darurat No. 37 Tahun 1950 tentang Perubahan Ordonansi Padjak Peralihan 1944, Ordonansi Padjak Upah dan Ordonansi Padjak Kekayaan 1932. Disahkan pada tanggal 19 Januari 1951. (LN No. 15 & TLN No. 86)

uu : UU No. 15 Tahun 1951 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat tentang Perubahan Ordonansi Padjak Upah dan Ordonansi Padjak Kekayaan 1932" (UU Darurat No. 37 Tahun 1950 seperti ditambah dengan UU Darurat No. 5 Tahun 1951) sebagai Undang-Undang.

Undang Undang Nomor 14 Tahun 1951

Tentang Penggantian Pajak Bumi Dengan Pajak Peralihan 1944. Disahkan Pada Tanggal 29 Agustus 1951. (LN No. 84)

i : Undang-Undang Darurat No. 36 Tahun 1950 tentang Tentang Penetapan Berlakunya UU, UU darurat dan Ordonansi-Ordonansi megenai Masalah-masalah Pajak Dikeluarkan sebelum Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Darurat Nomor 14 Tahun 1951

Tentang Pemungutan Pajak Verponding Atas Tahun 1951. Disahkan pada tanggal 10 September 1951. (LN No. 86 & TLN No. 151)

uu : UU No. 7 Tahun 1952 tentang Menetapkan Undang-Undang Darurat Nomor 14 Tahun 1951 Tentang Pemungutan Pajak Verponding Atas Tahun 1951 Sebagai Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1951

Tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat tentang Perubahan Ordonansi Padjak Upah dan Ordonansi Padjak Kekayaan 1932" (UU Darurat No. 37 Tahun 1950 seperti ditambah dengan UU Darurat No. 5 Tahun 1951) sebagai Undang-Undang. Disahkan pada tanggal 22 September 1951. (LN No. 91)

tmb : UU No. 32 Tahun 1953 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1951, Tentang Pengubahan dan Penambahan Ordonansi Pajak Peralihan 1944" (Lembaran Negara Nomor 103 Tahun 1951) sebagai Undang-Undang.

Undang Undang Nomor 18 Tahun 1951

Tentang Perubahan UU Darurat No. 15 Tahun 1950 RI Untuk Penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulon-Progo dan Adikarto Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Satu Kabupaten Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah-Tangganya Sendiri Dengan Nama Kabupaten Kulon-Progo. Disahkan pada tanggal 12 Oktober 1951. (LN No. 102)

Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1951

Tentang Pengubahan dan Penambahan Ordonansi Pajak Peralihan 1944 sebagai Undang-Undang. Disahkan pada tanggal 14 Oktober 1951. (LN No. 122 & TLN No. 181)

uu : UU No. 32 Tahun 1953 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1951, Tentang Pengubahan dan Penambahan Ordonansi Pajak Peralihan 1944" (Lembaran Negara Nomor 103 Tahun 1951) sebagai Undang-Undang.

Undang Undang Nomor 24 Tahun 1951

Tentang Nasionalisasi De Javasche Bank N.V. Disahkan pada tanggal 6 Desember 1951. (LN No. 120)

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 1952

UNDANG-UNDANG TAHUN 1952

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1952

Tentang Pemindahan Dan Pemakaian Tanah-Tanah Dan Barang-Barang Tetap Yang Lainnya Yang Mempunyai Titel Menurut Hukum Eropah. Disahkan pada tanggal 2 Januari 1952.

uu : UU No. 24 Tahun 1954 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Tentang Pemindahan Hak Tanah-tanah Dan Barang-barang Tetap Yang Lainnya Yang Bertakluk Kepada Hukum Eropah (Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1952) Sebagai Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1952

Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang, Undang-Undang Darurat Dan Ordonansi-Ordonansi Mengenai Masalah-Masalah Pajak, Dikeluarkan Sebelum Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Darurat Nomor 36 Tahun 1950) Sebagai Undang-Undang. Disahkan Pada Tanggal 29 Juli 1952. (LN No. 43)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1952

Tentang Menetapkan Undang-Undang Darurat Nomor 14 Tahun 1951 Tentang Pemungutan Pajak Verponding Atas Tahun 1951 Sebagai Undang-Undang. Disahkan pada tanggal 2 Agustus 1952. (LN No. 50).

t : UU No. 8 tahun 1952 tentang Pemungutan Pajak Verponding Tahun 1952.

u : Undang-Undang Darurat No. 15 Tahun 1952 tentang Pemungutan Pajak Verponding untuk Tahun-tahun 1953 dan berikutnya :
Pasal II, sub 2 angka "1951"dibatalkan;
Pasal IV, kata-kata "selama tahun takwim 1951 tidak dijalankan" diganti dengan "buat sementara dicabut terhitung mulai dengan tahun takwim 1953".

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1952

Tentang Pemungutan Pajak Verponding Tahun 1952. Disahkan Pada Tanggal 2 Agustus 1952. (LN No. 51 & TLN No. 267)

Undang-Undang Darurat Nomor 15 Tahun 1952

Tentang Pemungutan Pajak Verponding Untuk Tahun-Tahun 1953 Dan Berikutnya. Disahkan Pada Tanggal 31 Desember 1952. (LN No. 90 & TLN No. 356)

uu : UU No. 33 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 15 Tahun 1952 Untuk Pemungutan Pajak Verponding Untuk Tahun-Tahun 1953 Dan Berikutnya Sebagai Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1952

tentang Menetapkan Undang-Undang Darurat tentang Hak Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai-pegawai Republik Indonesia Serikat (Undang-undang Darurat Nomor 25 dan 34 Tahun 1950) sebagai Undang-undang Republik Indonesia. Disahkan pada tanggal 24 Oktober 1952. (LN No. 78)

u : Undang-Undang Darurat No. 13 Tahun 1957 tentang Menambah UU No. 21 Tahun 1952 tentang "Menetapkan UU Darurat tentang Hak Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai-Pegawai Republik Indonesia Serikat (UU Darurat No. 25 dan 34 Tahun 1950) sebagai Undang-Undang. (LN No. 58)

tmb : UU No. 28 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 13 Tahun 1957 Tentang Menambah Undang-Undang No. 21 Tahun 1952 Tentang "Menetapkan Undang-Undang Darurat Tentang Hakpengangkatan Dan Pemberhentian Pegawai-Pegawai Republik Indonesia Serikat (Undang-Undang Darurat No. 25 Dan 34 Tahun 1950) Sebagai Undang-Undang Republik Indonesia", Sebagai Undang-Undang.

c : UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 1953

UNDANG-UNDANG TAHUN 1953

Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1953

Tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Kalimantan. Disahkan Pada Tanggal 7 Januari 1953. (LN No. 8 & TLN No. 351)

t : UU No. 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propisi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur.

c : UU No. 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propisi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur.

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953

Tentang Pembentukan (Resmi) Daerah Otonom Kabupaten/Daerah Istimewa Tingkat Kabupaten Dan Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Kalimantan. Disahkan Pada Tanggal 7 Januari 1953. (LN No. 8 & TLN No. 350)

uu : UU No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1953

Tentang Pernyataan Perlunya Beberapa Tanah Partikelir Dikembalikan Menjadi Tanah Negeri. Disahkan Pada Tanggal 11 Maret 1953. (LN No. 27 & TLN No. 380).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1953

Tentang Penetapan "Undang Undang Darurat Nomor 15 Tahun 1952, Untuk Pemungutan Pajak Verponding Untuk Tahun Tahun 1953 Dan Berikutnya" (Lembaran Negara Nomor 90 Tahun 1952) Sebagai Undang Undang. Disahkan pada tanggal 18 Desember 1953.

t : Undang-Undang Darurat No. 15 Tahun 1952 tentang Pemungutan Pajak Verponding dan Berikutnya.

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 1954

UNDANG-UNDANG TAHUN 1954

Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1954

Tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakyat. Disahkan Pada Tanggal 8 Juni 1954. (LN No. 65 & TLN No. 594)

u : Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1956 tentang Perubahan dan Tambahan UU Darurat No. 8 Tahun 1954 tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakyat.

c : PERPU No. 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya.

Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1954

Tentang Pengubahan Propinsi Sunda Ketcil Mendjadi Propinsi Nusa tenggara. Disahkan Pada Tanggal 28 Mei 1954. (LN No. 66 & TLN No. 595)

uu : UU No. 8 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 9 Tahun 1954 tentang Pengubahan Nama Propinsi Sunda Kecil Menjadi Propinsi Nusa Tenggara (LN No. 66)" sebagai Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954

Tentang Pengubahan Undang Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-kota Besar Dan Kota-kota Kecil Di Jawa. Disahkan Pada Tanggal 12 Maret 1954. (LN No. 40 & TLN No. 551)

Undang-Undang Nomor 24 tahun 1954

Tentang Penetapan Undang Undang Darurat Tentang Pemindahan Hak Tanah-tanah dan Barang-barang Tetap Yang Lainnya Yang Bertakluk Kepada Hukum Eropah (Undang Undang Darurat No. 1 Tahun 1952) Sebagai Undang Undang. Disahkan Pada Tanggal 13 Juli 1954. (LN No. 78 & TLN No. 263)

t : UU No. 28 Tahun 1956 tentang Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak Atas Tanah-tanah Perkebunan

u : UU No. 76 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1954 (LN No. 78) dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1956 (LN No.73)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954

Tentang Wakil Notaris Dan Wakil Notaris Sementara. Disahkan Pada Tanggal 13 Nopember 1954. (LN No. 101 & TLN No. 700)

c : UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 1955

UNDANG-UNDANG TAHUN 1955

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1955

Tentang Penyaluran Kredit Guna Pembangunan Perindustrian Dalam Sektor Partikelir. Disahkan Pada Tanggal 15 Januari 1955. (LN No. 1 & TLN No. 742)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955

Tentang Perubahan Undang-Undang No. 3 Jo. No. 19 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Disahkan Pada Tanggal 30 Juni 1955. (LN No. 43 & TLN No. 827)

Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955

Tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Di Sumatera. Disahkan Pada Tanggal 11 Agustus 1955. (LN No. 52 & TLN No. 855)

t : UU No. 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara

uu : UU No. 25 Tahun 1959 tentang Penetapan "PERPU No. 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dati I Sumatera Selatan & UU Darurat No. 16 Tahun 1955 tentang Perubahan PERPU No. 3 Tahun 1950 sebagai Undang-Undang. (LN No. 70 & TLN No. 1814)

u : PERPU No. 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan Mengubah UU No. 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Dati I Sumatera Selatan. (LN No. 9 & TLN No.2621

Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1955

Tentang Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Peraturan-Peraturan Yang Dimaksud Dalam Pasal 6 Undang-Undang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Di Jawa. Disahkan Pada Tanggal 5 September 1955. (LN No. 53 & TLN No.859)

uu : UU No. 26 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 17 Tahun 1955 Tentang Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Peraturan-peraturan Daerah yang dimaksud Dalam Pasal 6 Undang-Undang Pembentukan Daerah-daerah otonom di Jawa (Lembaran Negara Tahun 1955 No. 53), sebagai Undang-Undang.

Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955

Tentang Penjualan Rumah-rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri. Disahkan pada tanggal 10 Oktober 1955. (LN No. 56 & TLN No. 870)

uu : UU No. 72 Tahun 1957 tentang Penetapan "UU Darurat No. 19 Tahun 1966 tentang Penjualan Rumah-rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri" sebagai Undang-Undang.

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 1956

UNDANG-UNDANG TAHUN 1956

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1956

Tentang Pengubahan "Overschrijvingstarief" yang Dilampirkan pada Ordonnantie Yang Mengatur Biaya Balik Nama Barang-Barang Tetap (Staatsblad 1949 No. 282). Disahkan pada tanggal 29 Pebruari 1956. (LN No. 12 & TLN No. 963)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956

Tentang Pembentukan Daerah Otonoom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah. Disahkan pada tanggal 19 Maret 1956. (LN No. 19)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956

Tentang Pembentukan Daerah Otonoom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah. Disahkan pada tanggal 19 Maret 1956. (LN No. 20)

i : Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pemindahan Pusat Pemerintahan Kota Padang dari Wilayah Kecamatan Padang Barat ke Wilayah Kecamatan Kototangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pemindahan Pusat Pemerintahan Kota Padang dari Wilayah Kecamatan Padang Barat ke Wilayah Kecamatan Kototangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956

Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah. Disahkan pada tanggal 19 Maret 1956. (LN No. 25)

u : Undang-Undang Darurat No. 21 Tahun 1957 tentang Perubahan UU No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.

u : UU No. 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan Mengubah UU No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.

u : UU No. 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko & Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah UU No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.

i : UU No. 49 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

i : UU No. 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam.

i : UU No. 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

i : UU No. 55 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Landak.

i : UU No. 9 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

i : UU No. 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman Di Provinsi Sumatera Barat.

i : UU No. 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau.

i : UU No. 11 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam.

i : UU No. 31 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Lingga Di Provinsi Kepulauan Riau.

i : UU No. 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Dan Kabupaten Pasaman Barat Di Provinsi Sumatera Barat.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2004 tentang Pemindahann Ibukota Kabupaten Kepulauan Riau dari Wilayah Kota Tanjung Pinang ke Bandar Seri Bentan di Wilayah Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Kepulauan Riau.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok Dari Wilayah Kota Solok Ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) Di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota Dari Wilayah Kota Payakumbuh Ke Sarilamak Di Wilayah Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau.

i : UU No. 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh.

i : UU No. 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam.

i : UU No. 12 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti Di Provinsi Riau.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Kerinci dari Wilayah Kota Sungaipenuh ke Wilayah Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1956

Tentang Pembatalan Hubungan Indonesia Nederland Berdasarkan Perjanjian Konperensi Meja Bundar. Disahkan Pada Tanggal 3 Mei 1956. (LN No. 27)

i : UU No. 28 Tahun 1956 tentang Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak Atas Tanah-Tanah Perkebunan.

t : UU No. 29 Tahun 1956 tentang Peraturan-Peraturan Dan Tindakan-Tindakan Mengenai Tanah-Tanah Perkebunan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1956

Tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Irian Barat. Disahkan pada tanggal 16 Agustus 1956. (LN No. 33 & TLN No. 1055)

u : Undang-Undang Darurat No. 20 Tahun 1957 tentang Perubahan UU Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Irian Barat.

c : Undang-Undang No. 1 Pnps Tahun 1962 tentang Pembentukan Prop. Irian barat Baru

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1956

Tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Darurat No. 8 Tahun 1954 tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakyat. Disahkan pada tanggal 1 Oktober 1956. (LN No. 45 & TLN No. 1060)

c : PERPU No. 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya.

Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956

Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan. Disahkan Pada Tanggal 14 Nopember 1956. (LN No. 55 & TLN No. 1091)

uu : UU No. 28 Tahun 1959 tentang Penetapan "UU Darurat No. 4 Tahun 1956 dan UU Darurat No. 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tk. II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tk. I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang. (LN No. 73 & TLN No. 1821)

i : UU No. 3 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, Dan Kabupaten Kaur Di Provinsi Bengkulu.

i : UU No. 5 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Dan Kabupaten Belitung Timur Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

i : UU No. 39 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Lebong Dan Kabupaten Kepahiang Di Provinsi Bengkulu.

i : UU No. 24 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah Di Provinsi Bengkulu.

Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956

tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan. Disahkan Pada Tanggal 14 Nopember 1956. (LN No. 56 & TLN No. 1091)

uu : UU No. 28 Tahun 1959 tentang Penetapan "UU Darurat No. 4 Tahun 1956 dan UU Darurat No. 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tk. II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tk. I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang. (LN No. 73 & TLN No. 1821)

i : UU No. 2 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus.

i : UU No. 5 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Dan Kabupaten Belitung Timur Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956

Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan. Disahkan Pada Tanggal 14 Nopember 1956. (LN No. 58 & TLN No. 1091)

uu : UU No. 28 Tahun 1959 tentang Penetapan "UU Darurat No. 4 Tahun 1956 dan UU Darurat No. 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tk. II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tk. I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang. (LN No. 73 & TLN No. 1821)

i : UU No. 2 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus.

i : UU No. 5 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Dan Kabupaten Belitung Timur Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956

Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara. Disahkan pada tanggal Tanggal 14 Nopember 1956. (LN No. 58 & TLN No. 1092)

u : PERPU No. 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Dati II Dairi dengan Mengubah UU No. 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.

u : UU No. 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah UU No. 7 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.

t : UU No. 4 tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara.

i : UU No. 4 tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara

i : UU No. 12 Tahun 1998 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal.

i : UU No. 14 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil.

i : UU No. 48 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen Dan Kabupaten Simeulue.

i : UU No. 2 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe.

i : UU No. 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Langsa.

i : UU No. 4 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Padang Sidempuan.

i : UU No. 4 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan

Raya, Dan Kabupaten Aceh Tamiang, Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

i : UU No. 9 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, Dan Kabupaten Humbang Hasundutan Di Provinsi Sumatera Utara. Disahkan pada tanggal 25 Pebruari 2003.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Aceh Utara Dari Wilayah Kota Lhokseumawe Ke Lhoksukon Di Wilayah Kabupaten Aceh Utara. Disahkan pada tanggal 7 Maret 2003.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2003 Tentang Penghapusan Kota Administratif Kisaran, Kota Administratif Rantau Prapat, Kota Administratif Batu Raja, Kota Administratif Cilacap, Kota Administratif Purwokerto, Kota Administratif Klaten, Kota Administratif Jember, Dan Kota Administratif Watampone. Disahkan pada tanggal 8 Juli 2003.

i : UU No. 36 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Samosir Dan Kabupaten Serdang Bedagai Di Provinsi Sumatera Utara. Disahkan pada tanggal 18 Desember 2003.

i : UU No. 41 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Disahkan pada tanggal 18 Desember 2003.

i : UU No. 5 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara Di Provinsi Sumatera Utara.

i : UU No. 7 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

i : UU No. 8 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Subulussalam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

i : UU No. 37 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara Di Provinsi Sumatera Utara.

i : UU No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Di Provinsi Sumatera Utara.

i : UU No. 22 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Di Provinsi Sumatera Utara.

i : UU No. 23 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara Di Provinsi Sumatera Utara.

i : UU No. 45 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara Di Provinsi Sumatera Utara.

i : UU No. 46 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat Di Provinsi Sumatera Utara.

i : UU No. 47 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli Di Provinsi Sumatera Utara.

Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956

Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara. Disahkan pada tanggal 14 Nopember 1956. (LN No. 59 & TLN No. 1092)

Undang-undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956

tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara. Disahkan pada tanggal 14 Nopember 1956. (LN No. 60 & TLN No. 1092)

i : Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2003 Tentang Penghapusan Kota Administratif Kisaran, Kota Administratif Rantau Prapat, Kota Administratif Batu Raja, Kota Administratif Cilacap, Kota Administratif Purwokerto, Kota Administratif Klaten, Kota Administratif Jember, Dan Kota Administratif Watampone.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956

Tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara. Disahkan pada tanggal 29 Desember 1956. (LN No. 64 & TLN No. 1103)

t : UU No. 4 tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara

i : UU No. 4 tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara

i : UU No. 12 Tahun 1998 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal.

i : UU No. 14 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil.

i : UU No. 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

i : UU No. 48 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen Dan Kabupaten Simeulue.

i : UU No. 2 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe.

i : UU No. 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Langsa.

i : UU No. 4 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Padang Sidempuan.

i : UU No. 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

i : UU No. 4 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Dan Kabupaten Aceh Tamiang, Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe. Disahkan pada tanggal 12 Nopember 2002

i : UU No. 9 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, Dan Kabupaten Humbang Hasundutan Di Provinsi Sumatera Utara.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Aceh Utara Dari Wilayah Kota Lhokseumawe Ke Lhoksukon Di Wilayah Kabupaten Aceh Utara.

i : UU No. 36 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Samosir Dan Kabupaten Serdang Bedagai Di Provinsi Sumatera Utara.

i : UU No. 41 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

i : Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

i : UU No. 5 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara Di Provinsi Sumatera Utara.

i : UU No. 7 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

i : UU No. 8 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Subulussalam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

i : UU No. 37 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara Di Provinsi Sumatera Utara.

i : UU No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Di Provinsi Sumatera Utara.

i : UU No. 22 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Di Provinsi Sumatera Utara.

i : UU No. 23 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara Di Provinsi Sumatera Utara.

i : UU No. 45 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara Di Provinsi Sumatera Utara.

i : UU No. 46 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat Di Provinsi Sumatera Utara.

i : UU No. 47 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli Di Provinsi Sumatera Utara.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956

Tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Disahkan pada tanggal 29 Desember 1956. (LN No. 55 & TLN No. 1106)

u : UU Darurat No. 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Tengah Dan Pengubahan Undang-Undang No. 25 Tahun 1956.

u : UU No. 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang No. 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (LN No. 83) Sebagai Undang-Undang

h : Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1989 Tentang Pembentukan Kota Administratip Bontang.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1989 Tentang Pembentukan Kota Administratip Bontang.

i : UU No. 9 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru.

i : UU No. 10 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang.

i : UU No. 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang.

i : UU No. 7 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Dan Kota Bontang.

i : UU No. 12 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Singkawang.

i : UU No. 7 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara Di Provinsi Kalimantan Timur.

i : UU No. 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu Dan Kabupaten Balangan Di Provinsi Kalimantan Selatan.

i : UU No. 34 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Melawi Dan Kabupaten Sekadau Di Provinsi Kalimantan Barat.

i : UU No. 6 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara Di Provinsi Kalimantan Barat.

i : UU No. 34 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung Di Provinsi Kalimantan Timur.

i : UU No. 35 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya Di Provinsi Kalimantan Barat.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1956

tentang Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak Atas Tanah-tanah Perkebunan. Disahkan pada tanggal 31 Desember 1956. (LN No. 73 & TLN No. 1225)

t : UU No. 76 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 24 Tahun 1954 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1956

u : UU No. 76 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-undang No. 24 Tahun 1954 (LN No. 78) Dan UU No. 28 Tahun 1956 Mengenai Penggantian Perkataan "Menteri Kehakiman" Dengan Perkataan "Menteri Agraria"

i : PMDN No. Sk.59/DDA/Tahun 1970 Tentang Penyederhanaan Peraturan Perizinan Pemindahan Hak Atas Tanah.

i : PMDN No. 3 Tahun 1979 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohonan Dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat.

i : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 Tentang Ketentuan Pelaksanaan KEPPRES Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 Tentang

Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

i : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi Dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1956

tentang Peraturan-peraturan dan Tindakan-tindakan mengenai Tanah-Tanah Perkebunan. Disahkan tanggal 31 Desember 1956. (LN No. 74 & TLN No. 1126)

i : PMDN No. 3 Tahun 1979 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohonan Dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat.

i : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi Dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal.

i : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 Tentang Ketentuan Pelaksanaan KEPPRES Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956

Tentang Perimbangan Keuangan Antara Negara Dengan Daerah Daerah, Yang Berhak Mengurus Rumah Tangganya Sendiri. Disahkan Pada Tanggal 31 Desember 1956.

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 1957

UNDANG-UNDANG TAHUN 1957

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957

tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Disahkan pada tanggal 17 Januari 1957. (LN No. 6 & TLN No. 1143)

u : UU Darurat No. 6 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1951 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 1956 (UU No. 1 Tahun 1957).

u : UU No. 73 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-undang Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 1956.

c : UU No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1957

Tentang Pembubaran Daerah Makasar, dan Pembentukan Daerah Gowa, Daerah Makasar dan Daerah Jeneponto-Takalang. Disahkan pada tanggal 16 Januari 1957. (LN No. 2 & TLN No. 1137)

c : UU No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi.

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1957

Tentang Pembubaran Daerah Luwu dan Pembentukan Daerah Tana Toraja dan Daerah Luwu. Disahkan pada tanggal 16 Januari 1957. (LN No. 3 & TLN No. 1138)

c : UU No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi.

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1957

Tentang Pembubaran Daerah Bone dan Pembentukan daerah Bone, Daerah Wajo dan daerah Soppeng. Disahkan pada tanggal 16 Januari 1957. (LN No. 4 & TLN No. 1139)

c : UU No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi.

Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1957

Tentang Pengubahan Kedudukan Wilayah daerah-daerah Enclave Imogiri, Kota Gede dan Ngawen. Disahkan pada tanggal 16 Januari 1957. (LN No. 5 & TLN No. 1142)

uu : UU No. 14 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1957 Tentang Pengubahan Kedudukan Wilayah Daerah-Daerah Enclave Imogiri, Kota Gede Dan Ngawen" (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 5), Sebagai Undang-Undang.

Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1957

Tentang Pengubahan Undang-Undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 1956. Disahkan pada tanggal 30 Januari 1957. (LN No. 9)

u : UU No. 73 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-undang Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 1956.

c : UU No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957

Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Disahkan pada tanggal 7 Mei 1957. (LN No. 53 & TLN No. 1284)

uu : UU No. 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat

I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang No. 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (LN No. 83) sebagai Undang-Undang.

Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957

Tentang Peraturan Umum Pajak Daerah. Disahkan pada tanggal 22 Mei 1957. (LN No. 56 & TLN No. 1287)

tbl : UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1957

Tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah. Disahkan pada tanggal 22 Mei 1957. (LN No. 57 & TLN No. 1288)

tbl : UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Darurat Nomor 13 Tahun 1957

tentang Menambah Undang-Undang No. 21 Tahun 1952 "Menetapkan Undang-undang Darurat tentang Hak Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai-pegawai Republik Indonesia Serikat (Undang-undang Darurat Nomor 25 dan 34 Tahun 1950) sebagai Undang-undang Republik Indonesia". Disahkan pada tanggal 22 Mei 1957. (LN No. 58)

uu : UU No. 28 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 13 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 58) tentang Menambah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1952 (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 78) tentang "Menetapkan Undang-undang Darurat tentang Hak Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai-pegawai Republik Indonesia Serikat (Undang-undang Darurat Nomor 25 dan 34 Tahun 1950) sebagai Undang-undang Republik Indonesia", sebagai Undang-Undang

Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957

Tentang Pembentukan aerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau. Disahkan pada tanggal 9 Agustus 1957. (LN No. 75)

uu : UU No. 61 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi Dan Riau" Sebagai Undang-Undang.

Undang-Undang Darurat Nomor 20 Tahun 1957

Tentang Perubahan Undang-Undang Pembentukan daerah Otonom Propinsi Irian Barat. Disahkan pada tanggal 9 Agustus 1957. (LN No. 76 & TLN No. 1360)

uu : UU No. 23 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 20 Tahun 1957 Tentang Penambahan Undang-Undang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Irian Barat (LN No. 76), Sebagai Undang-Undang.

c : UU No. 1 PnPs Tahun 1962 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat Bentuk Baru. (LN No. 1 & TLN No. 2372)

Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957

Tentang Perubahan Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah. Disahkan pada tanggal 9 Agustus 1957. (LN No. 77)

uu : UU No. 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 21 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tk. I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang. (LN No. 108 & TLN No. 1644)

Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957

Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat ke-1 Maluku. Disahkan pada tanggal 10 Agustus 1957. (LN No. 79)

uu : UU No. 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 22 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (LN No. 79) Sebagai Undang-Undang.

Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957

Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Maluku. Disahkan pada tanggal 10 Agustus 1957. (LN No. 80)

uu : UU No. 60 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tungkat I Maluku (LN No. 80)" Sebagai Undang-Undang. (LN No. 111 & TLN No. 1645)

Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1957

Tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa. Disahkan pada tanggal 10 Agustus 1957. (LN No. 84 & TLN No. 1402)

uu : UU No. 19 Tahun 1959 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 27 Tahun 1957 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa" sebagai Undang-Undang. (LN No. 63 & TLN No. 1850)

tbl : UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1957

tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 13 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 58) tentang Menambah Undang-undang Nomor 21 Tahun 1952 (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 78) tentang "Menetapkan Undang-undang Darurat tentang Hak Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai-pegawai Republik Indonesia Serikat (Undang-undang Darurat Nomor 25 dan

34 Tahun 1950) sebagai Undang-undang Republik Indonesia", sebagai Undang-undang. Disahkan pada tanggal 8 Oktober 1957. (LN No.100 & TLN No. 1445)

u : UU No. 17 Tahun 1961 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1952 tentang Hak Mengangkat dan Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil.

tbl : UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1957

Tentang Pejabat Yang Menjalankan Pekerjaan Jabatan Presiden, Jika Presiden Mangkat, Berhenti Atau Berhalangan, Sedang Wakil Presiden Tidak Ada Atau Berhalangan. Disahkan Pada Tanggal 8 Oktober 1957. (LN No. 101)

i : UU No. 1 Tahun 1958 Tentang Penghapusan Tanah Tanah Partikelir.

c : PERPU No. 10 Tahun 1960 tentang Pejabat yang Menjalankan Pekerjaan Jabatan Presiden Mangkat, Berhenti atau Berhalangan, sedang Wakil Presiden Tidak ada atau Berhalangan. (LN No. 31).

Undang-Undang Nomor 71 Tahun 1957

Tentang Penetapan UU Darurat No. 10 Tahun 1954 tentang Nasionalisasi Bataviatsce Verkeers Maatschap-pij NV (BVN) (LN No. 67) sebagai Undang-Undang. Disahkan pada tanggal 26 Oktober 1957. (LN No. 153 & TLN No. 1469)

Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957

Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah-rumah Negari kepada Pegawai Negeri sebagai Undang-Undang. Disahkan pada tanggal 19 Nopember 1957. (LN No. 158)

i : PMDN No. 149 Tahun 1977 Tentang Tata Cara Permohonan Dan Penyelesaian Hak Atas Tanah Yang Di Atasnya Terdapat Rumah Negeri Golongan III Yang Telah Dijual.

i : Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara.

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1957

Tentang Pengubahan Undang Undang Tentang Pokok Pokok Pemerintahan Daerah 1956. Disahkan Pada Tanggal 5 Desember 1957. (LN No. 159)

c : UU No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957

Tentang Penetapan Keadaan Bahaya.disahkan pada tanggal 20 Oktober 1957 (LN No. 160 & TLN No. 1485)

c : PERPU No. 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya

Undang-Undang Nomor 76 Tahun 1957

Tentang Pengubahan UU No. 24 Tahun 1954 tentang Penetapan UU Darurat tentang Pemindahan Hak Tanah-tanah dan Barang-barang Tetap Lainnya Jang Bertakluk Kepada Hukum Eropah sebagai Undang-Undang Dan UU No. 28 Tahun 1956 tentang Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak Atas Tanah-tanah Perkebunan. Disahkan Pada Tanggal 13 Desember 1957. (LN No. 163)

Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1957

Tentang Pengubahan Canon Dan Cijns Atas Hak Hak Erfpacht Dan Konsesi Guna Perusahaan Kebun Besar. Disahkan pada Tanggal 19 Desember 1957. (LN No. 168)

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 1958

UNDANG-UNDANG TAHUN 1958

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1958

Tentang Penghapusan Tanah-tanah Partikelir. Disahkan Pada Tanggal 13 Januari 1958. (LN No. 2 & TLN No. 1517)

i : Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1958 Pelaksanaan Undang Undang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir

t : Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1963 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1958.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1963 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1958.

i : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 Tentang Ketentuan Pelaksanaan KEPPRES Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

t : Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 1997 Tentang Peniadaan Ganti Rugi Atas Tanah-Tanah Yang Terkena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958.

i : Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 1997 Tentang Peniadaan Ganti Rugi Atas Tanah-Tanah Yang Terkena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958.

t : Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 1997 Tentang Peniadan Ganti Rugi Atas Tanah-Tanah Yang Terkena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958.

i : Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 1997 Tentang Peniadan Ganti Rugi Atas Tanah-Tanah Yang Terkena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1958

Tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 9 Tahun 1954 tentang Pengubahan Nama Propinsi Sunda Kecil Menjadi Propinsi Nusa Tenggara (LN No. 66)" sebagai Undang-Undang. Disahkan Pada Tanggal 17 Pebruari 1958. (LN No. 18 & TLN No. 1545)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1958

Tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1957 tentang Kedudukan Wilayah Daerah-daerah Enclave Imogiri, Kota Gede dan Ngawen" sebagai Undang-Undang. Disahkan Pada Tanggal 20 Maret 1958. (LN No. 33 & TLN No. 1562)

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1958 (UU No. 3 Drt Th. 1958)

Tentang Urusan Perumahan. Disahkan pada tanggal 17 April 1958. (LN No. 73)

u : PERPU No. 25 Tahun 1960 tentang Perubahan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1958

c : PERPU No. 6 Tahun 1962 tentang Pokok-pokok Perumahan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1958

Tentang Pengubahan Batas-batas Kotapraja Sukabumi dan Daerah Swatantra Tingkat II Sukabumi. Disahkan pada tanggal 24 Mei 1958. (LN No. 59 & TLN No. 1615)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958

Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (LN No. 79) Sebagai Undang Undang. Disahkan Pada Tanggal 17 Juni 1958. (LN No. 61 & TLN No. 1617)

i : UU No. 11 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate.

i : UU No. 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

i : UU No. 6 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, Dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

i : UU No. 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, Dan Kota Tidore Kepulauan Di Provinsi Maluku Utara.

i : UU No. 40 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, Dan Kabupaten Kepulauan Aru Di Provinsi Maluku.

i : UU No. 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku.

i : UU No. 31 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya Di Provinsi Maluku.

i : UU No. 32 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan Di Provinsi Maluku.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958

Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956

tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 83) sebagai Undang-undang. Disahkan Pada Tanggal 17 Juni 1958. (LN No. 62 & TLN No. 1622)

i : UU No. 9 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru.

i : UU No. 10 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang.

i : UU No. 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Dan Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1958

Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 20 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Irian Barat (LN No. 76) sebagai Undang-Undang. Disahkan pada tanggal 17 Juni 1958. (LN No. 64)

c : UU No. 1 Pnps Tahun 1962 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat Bentuk Baru.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1958

Tentang Pengubahan Batas-batas Kotapraja Madiun dan Daerah Swatantra Tingkat II Madiun. Disahkan pada tanggal 17 Juni 1958. (LN No. 66 & TLN No. 1630)

c : UU No. 1 Pnps Tahun 1962 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat Bentuk Baru.

Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958

tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang. Disahkan pada tanggal 17 Juli 1958. (LN No. 108 & TLN No. 1643)

t : Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Kerinci dari Wilayah Kota Sungaipenuh ke Wilayah Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Kerinci dari Wilayah Kota Sungaipenuh ke Wilayah Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi

Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958

tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Sebagai Undang-Undang. Disahkan pada tanggal 17 Juli 1958. (LN No. 111 & TLN No. 1645)

i : UU No. 11 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate.

i : UU No. 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

i : UU No. 6 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, Dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

i : UU No. 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, Dan Kota Tidore Kepulauan Di Provinsi Maluku Utara.

i : UU No. 40 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, Dan Kabupaten Kepulauan Aru Di Provinsi Maluku.

i : UU No. 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku.

i : UU No. 31 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya Di Provinsi Maluku.

i : UU No. 32 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan Di Provinsi Maluku

t : Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Maluku Tenggara Dari Wilayah Kota Tual Ke Wilayah Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Maluku Tenggara Dari Wilayah Kota Tual Ke Wilayah Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku.

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958

tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang. Disahkan pada tanggal 25 Juli 1958. (LN No. 112 & TLN No. 1646)

i : UU No. 49 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

i : UU No. 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam.

i : UU No. 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

i : UU No. 55 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Landak.

i : UU No. 9 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

i : UU No. 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman Di Provinsi Sumatera Barat.

i : UU No. 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau.

i : UU No. 11 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam.

i : UU No. 31 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Lingga Di Provinsi Kepulauan Riau.

i : UU No. 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Dan Kabupaten Pasaman Barat Di Provinsi Sumatera Barat.

i : UU No. 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh.

i : UU No. 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam.

i : UU No. 12 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti Di Provinsi Riau.

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958

Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Disahkan Pada Tanggal 11 Agustus 1958. (LN No. 115 & TLN No. 1649)

i : UU No. 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang

i : UU No. 52 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Lembata.

i : UU No. 12 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Lembata. Disahkan pada tanggal 7 Juni 2000.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2000 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Lombok Barat.

i : UU No. 9 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Rote-Ndao Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

i : UU No. 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

i : UU No. 8 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

i : UU No. 30 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat Di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2006 Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Ngada Dari Mbay Kecamatan Aesesa Ke Bajawa.

i : UU No. 2 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

i : UU No. 3 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

i : UU No. 16 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

i : UU No. 36 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

i : UU No. 26 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara Di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

i : UU No. 52 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958

tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Disahkan pada tanggal 9 Agustus 1958. (LN No. 122 & TLN No. 1655)

i : UU No. 1 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar.

i : UU No. 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang

i : UU No. 52 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Lembata.

i : UU No. 12 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Lembata.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2000 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Lombok Barat.

i : UU No. 9 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Rote-Ndao Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

i : UU No. 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

i : UU No. 8 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

i : UU No. 30 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat Di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Kupang Dari Wilayah Kota Kupang Ke Wilayah Oelamasi Kabupaten Kupang.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Kupang Dari Wilayah Kota Kupang Ke Wilayah Oelamasi Kabupaten Kupang.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2006 Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Ngada Dari Mbay Kecamatan Aesesa Ke Bajawa.

i : UU No. 2 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

i : UU No. 3 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

i : UU No. 16 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

i : UU No. 36 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Bima Dari Raba Wilayah Kota Bima Ke Kecamatan Woha Kabupaten Bima. Disahkan pada tanggal 11 April 2008.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Bima Dari Raba Wilayah Kota Bima Ke Kecamatan Woha Kabupaten Bima.

i : UU No. 26 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara Di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Disahkan pada tanggal 21 Juli 2008.

i : UU No. 52 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua Di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Disahkan pada tanggal 26 Nopember 2008.

Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1958

Tentang Pemungutan Pajak Verponding Untuk Tahun-tahun 1957 dan berikutnya. Disahkan Pada Tanggal 9 September 1958.

u : PERPU No. 28 Tahun 1959 tentang Dasar Perhitungan Malayan-Dollar Untuk Melakukan Tarip Pajak-pajak Negara di Daerah Kepulauan Riau.

Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958

Tentang Penanaman Modal Asing. Disahkan pada tanggal 4 Oktober 1958. (LN No. 138 & TLN No. 1725)

u : PERPU No. 15 Tahun 1960 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing.

c : UU No. 16 Tahun 1965 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing yang telah Diubah dan Ditambah dengan Undang-Undang No. 15 Prp Tahun 1960.

Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958

Tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda Di Indonesia. Disahkan Pada Tanggal 27 Desember 1958. (LN No. 162 & TLN No. 1690)

i : Keputusan Menteri Pertanian Dan Agraria Nomor Sk. 37/Ka/1964 Tentang Memperpanjang Jangka Waktu Pendaftaran Tersebut Pada Keputusan Menteri Pertanian Dan Agraria Nomor Sk.8/Ka/1963.

i : Keputusan Menteri Agraria Nomor Sk. 5/Depag/1965 Tentang Memperpanjang Jangka Waktu Pendaftaran Tersebut Pada Surat Keputusan Menteri Pertanian Dan Agraria Nomor Sk.8/Ka/1963 Bagi P.N.P.R. Wisayayasa.

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 1959

UNDANG-UNDANG TAHUN 1959

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1959

Tentang Badan Perusahaan Produksi Makanan dan Pembukaan Tanah. Disahkan pada tanggal 14 Januari 1959. (LN No. 1 & TLN No. 1727)

uu : UU No. 16 Tahun 1959 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1959 tentang Badan Perusahaan Produksi Bahan Makanan dan Pembukaan Tanah" sebagai Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959

Tentang Pembatalan Hak-hak Pertambangan. Disahkan pada tanggal 28 Maret 1959. (LN No. 24 & TLN No. 1759)

tmb : UU No. 11 Tahun 1961 tentang Tambahan Atas Lampiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959 tentang Pembatalan Hak-hak Pertambangan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1959

Tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1959 tentang Badan Perusahaan Produksi Bahan Makanan dan Pembukaan Tanah" sebagai Undang-Undang. Disahkan pada tanggal 26 Juni 1959. (LN No. 60 & TLN No. 1803)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959

Tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1957 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa" sebagai Undang-Undang. Disahkan pada tanggal 26 Juni 1959. (LN No. 63 & TLN No. 1850)

c : UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

c : UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959

Tentang Penetapan "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan" Dan "Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1955 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 Sebagai Undang-Undang. Disahkan Pada Tanggal 26 Juni 1959. (LN No. 70 & TLN No. 1814)

u : PERPU No. 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Dati I Sumatera Selatan.

u : UU No. 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu.

i : UU No. 6 Tahun 1991 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat Ii Lampung Barat.

i : UU No. 27 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.

i : UU No. 6 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Prabumulih.

i : UU No. 7 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau.

i : UU No. 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam.

i : UU No. 6 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin Di Provinsi Sumatera Selatan.

i : UU No. 5 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Dan Kabupaten Belitung Timur Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

i : UU No. 37 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Dan Kabupaten Ogan Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan.

i : UU No. 1 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang Di Provinsi Sumatera Selatan.

i : UU No. 50 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat Di Provinsi Lampung.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959

Tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1955 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Peraturan-Peraturan Daerah yang dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom di Jawa (LN No.53)" sebagai Undang-Undang. Disahkan pada tanggal 26 Juni 1959. (LN No. 71 & TLN No. 1819)

i : Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Perubahan Batas Wllayah Kota Tegal Dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah Di Muara Sungai Kaligangsa.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959

Tentang Penetapan "Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Kalimantan" sebagai Undang-undang. Disahkan pada tanggal 26 Juni 1959. (LN No. 72 & TLN No. 1820)

u : UU No. 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangkaraya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan "Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Kalimantan" sebagai Undang-undang.

u : UU No. 8 Tahun 1965 Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah UU Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Kalimantan.

i : UU No. 9 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru.

i : UU No. 10 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang.

i : UU No. 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang.

i : UU No. 7 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Dan Kota Bontang.

i : UU No. 12 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Singkawang.

i : UU No. 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Dan Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah.

i : UU No. 7 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara Di Provinsi Kalimantan Timur.

i : UU No. 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu Dan Kabupaten Balangan Di Provinsi Kalimantan Selatan.

i : UU No. 34 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Melawi Dan Kabupaten Sekadau Di Provinsi Kalimantan Barat.

i : UU No. 6 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara Di Provinsi Kalimantan Barat.

i : UU No. 34 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung Di Provinsi Kalimantan Timur.

i : UU No. 35 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya Di Provinsi Kalimantan Barat. Disahkan pada tanggal 10 Agustus 2007.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. Disahkan pada tanggal 22 Agustus 2007.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. Disahkan pada tanggal 22 Agustus 2007.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959

Tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan" Sebagai Undang-Undang. Disahkan Pada Tanggal 26 Juni 1959. (LN No. 73 & TLN No. 1821)

i : UU No. 7 Tahun 1990 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung.

i : UU No. 6 Tahun 1991 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat.

i : UU No. 2 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus.

i : UU No. 12 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, Dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro.

i : UU No. 6 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Prabumulih.

i : UU No. 6 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin Di Provinsi Sumatera Selatan.

i : UU No. 5 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Dan Kabupaten Belitung Timur Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

i : UU No. 37 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Dan Kabupaten Ogan Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2003 Tentang Penghapusan Kota Administratif Kisaran, Kota Administratif Rantau Prapat, Kota Administratif Batu Raja, Kota Administratif Cilacap, Kota Administratif Purwokerto, Kota Administratif Klaten, Kota Administratif Jember, Dan Kota Administratif Watampone.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2005 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Musi Rawas Dari Wilayah Kota Lubuk Linggau Ke Wilayah Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2005 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Musi Rawas Dari Wilayah Kota Lubuk Linggau Ke Wilayah Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas.

i : UU No. 1 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang Di Provinsi Sumatera Selatan.

i : UU No. 33 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran Di Provinsi Lampung. Disahkan pada tanggal 10 Agustus 2007.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2007 Tentang Perubahan Batas Daerah Kota Pangkalpinang Dengan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Di Desa Selindung. Disahkan pada tanggal 10 Desember 2007.

i : UU No. 50 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat Di Provinsi Lampung.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959

Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi. Disahkan pada Tanggal 4 Juli 1959. (LN No. 74 & TLN No. 1822)

i : UU No. 6 Tahun 1995 Tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Kendari.

i : UU No. 13 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara.

i : UU No. 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo.

i : UU No. 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Dan Kabupaten Banggai Kepulauan.

i : UU No. 10 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo.

i : UU No. 13 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Bau-Bau.

i : UU No. 8 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud Di Provinsi Sulawesi Utara.

i : UU No. 10 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah.

i : UU No. 11 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa Dan Kota Palopo Di Provinsi Sulawesi Selatan.

i : UU No. 4 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara.

i : UU No. 6 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango Dan Kabupaten Pohuwato Di Provinsi Gorontalo.

i : UU No. 7 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur Dan Kabupaten Mamuju Utara Di Provinsi Sulawesi Selatan.

i : UU No. 10 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan Dan Kota Tomohon Di Provinsi Sulawesi Utara. Disahkan pada tanggal 25 Pebruari 2003.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Buton Dari Wilayah Kota Bau-Bau Ke Pasarwajo Di Wilayah Kabupaten Buton. Disahkan pada tanggal 10 Juni 2003.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2003 Tentang Penghapusan Kota Administratif Kisaran, Kota Administratif Rantau Prapat, Kota Administratif Batu Raja, Kota Administratif Cilacap, Kota Administratif Purwokerto, Kota Administratif Klaten, Kota Administratif Jember, Dan Kota Administratif Watampone. Disahkan pada tanggal 8 Juli 2003.

i : UU No. 29 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, Dan Kabupaten Kolaka Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara. Disahkan pada tanggal 18 Desember 2003.

i : UU No. 32 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una Di Provinsi Sulawesi Tengah.

i : UU No. 33 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara Di Provinsi Sulawesi Utara. Disahkan pada tanggal 18 Desember 2003.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari Menjadi Kabupaten Konawe.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari Menjadi Kabupaten Konawe.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2005 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Luwu Dari Wilayah Kota Palopo Ke Wilayah Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2005 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Luwu Dari Wilayah Kota Palopo Ke Wilayah Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar.

i : UU No. 4 Tahun 2007 Tentangpembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara.

i : UU No. 9 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara Di Provinsi Sulawesi Utara.

i : UU No. 10 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Di Provinsi Sulawesi Utara.

i : UU No. 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara Di Provinsi Gorontalo.

i : UU No. 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara.

i : UU No. 14 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara.

i : UU No. 15 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Di Provinsi Sulawesi Utara.

i : UU No. 27 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Sigi Di Provinsi Sulawesi Tengah.

i : UU No. 28 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara Di Provinsi Sulawesi Selatan.

i : UU No. 29 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Di Provinsi Sulawesi Utara.

i : UU No. 30 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Di Provinsi Sulawesi Utara. Disahkan pada tanggal 21 Juli 2008.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan. Disahkan pada tanggal 11 Agustus 2008.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan.

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TAHUN 1959 (PERPU TAHUN 1959)

PERPU No. 11 Tahun 1959 (UU No. 11 Prp Th. 1959)

Tentang Pajak Hasil Bumi. Disahkan pada tanggal 26 September 1959. (LN No. 104 & TLN No. 1860).

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 1960

UNDANG-UNDANG TAHUN 1960

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960

Tentang Perjanjian Bagi Hasil. Disahkan Pada Tanggal 7 Januari 1960. (LN No. 2 & TLN No. 1921)

i : Peraturan Menteri Agraria Nomor 4 Tahun 1964 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjanjian Bagi-Hasil

i : Peraturan Menteri Agraria Nomor 8 Tahun 1964 Tentang Cara Pemungutan Bagian Bagi Hasil Yang Harus Diserahkan Kepada Pemerintah Cq Panitya Landreform Kecamatan Sebagai Dimaksud Dalam Peraturan Menteri Pertanian Dan Agraria No. 4 Tahun 1964.

t : Peraturan Menteri Pertanian Dan Agraria Nomor 4 Tahun 1964 Tentang Penetapan Perimbangan Khusus Dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil.

i : Peraturan Menteri Pertanian Dan Agraria Nomor 4 Tahun 1964 Tentang Penetapan Perimbangan Khusus Dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil.

i : PMDN No. 15 Tahun 1974 Tentang Pedoman Tindak Lanjut Pelaksanaan Landrefom.

i : KEPPRES Nomor 54 Tahun 1980 Tentang Kebijaksanaan Mengenai Pencetakan Sawah.

i : KEPPRES Nomor 55 Tahun 1980 Tentang Organisasi Dan Tatakerja Penyelenggaraan Landreform. Disahkan pada tanggal 10 September 1980.

t : Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.

i : Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil. Disahkan pada tanggal 10 September 1980.

i : KMDN No. 37 Tahun 1981 Tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform Sebagai Dimaksud Dalam KEPPRES Nomor 55 Tahun 1980.

i : KMDN No. 38 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan KEPPRES No. 55 Tahun 1980 Mengenai Perincian Tugas Dan Tata Kerja Pelaksanaan Landreform.

i : KMDN No. Sk.31/DJA/1982 Tentang Pengangkatan Anggota-Anggota Sekretariat Panitia Pertimbangan Landreform Pusat.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

tentang Peraturan dasar Pokok-pokok Agraria. Disahkan pada tanggal 24 September 1960. (LN No. 104 & TLN No. 2013)

i : Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Pelaksanaan Ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria.

i : PERPU No. 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya. Disahkan pada tanggal 14 Desember 1960.

i : Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Penambahan Ketentuan Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960

i : KEPPRES No. 131 Tahun 1961 Tentang Organisasi Penyelenggaraan Landreform. Disahkan pada tanggal 15 April 1961.

t : Peraturan Menteri Agraria Nomor 4 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Konversi Hak-Hak Concessie Dan Sewa Untuk Perusahaan Kebun Besar. Disahkan pada tanggal 17 Juni 1961.

i : Keputusan Menteri Agraria No. Sk 508/Ka/1961 Tentang Saat Mulai Bekerjanya Penitia Landreform Daerah Tingkat II/Kotapraja. Disahkan pada tanggal 23 Agustus 1961.

t : Keputusan Menteri Agraria No. Sk 508/Ka/1961 Tentang Saat Mulai Bekerjanya Penitia Landreform Daerah Tingkat II/Kotapraja. Disahkan pada tanggal 23 Agustus 1961.

i : KEPPRES No. 509 Tahun 1961 Tentang Perobahan KEPPRES Repbulik Indonesia No. 131 Tahun 1961. Disahkan pada tanggal 6 September 1961.

t : Peraturan Menteri Agraria Nomor 13 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Konversi Hak Eigendom Dan Lain-Lainnya, Yang Aktanya Belum Diganti. Disahkan pada tanggal 23 September 1961.

i : Peraturan Menteri Agraria Nomor 13 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Konversi Hak Eigendom Dan Lain-Lainnya, Yang Aktanya Belum Diganti. Disahkan pada tanggal 23 September 1961.

i : Peraturan Menteri Agraria Nomor 14 Tahun 1961 Tentang Permintaan Dan Pemberian Izin Pemindahan Hak Atas Tanah. Disahkan pada tanggal 23 September 1961.

t : Peraturan Menteri Agraria Nomor 15 Tahun 1961 Tentang Pembebanan Dan Pendaftaran Hypotheek Serta Credietverband. Disahkan pada tanggal 23 September 1961.

i : Peraturan Menteri Agraria Nomor 15 Tahun 1961 Tentang Pembebanan Dan Pendaftaran Hypotheek Serta Credietverband. Disahkan pada tanggal 23 September 1961.

i : Peraturan Menteri Pertanian Dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 Tentang Penegasan Konversi Dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah. Disahkan pada tanggal 1 Agustus 1962

i : Keputusan Menteri Pertanian Dan Agraria No. Sk. 35/Ka/1962 Tentang Pelaksanaan Penguasaan Tanah Pertanian Absentee.

i : Keputusan Menteri Pertanian Dan Agraria Nomor Sk. 8/Ka/1963 Tentang Pemberian Hak Atas Tanah Bekas Milik Perusahaan-Perusahaan Belanda Kepada Perusahaan-Perusahaan Negara Dan Bank-Bank Negara. Disahkan pada tanggal 28 Pebruari 1963.

i : Keputusan Menteri Pertanian Dan Agraria No. Sk. 10/Ka/1963 Tentang Penegasan Berlakunya Pasal 7 Undang-Undang No. 56/Prp/1960 Bagi Gadai Tanaman Keras. Disahkan pada tanggal 1 Maret 1963.

i : Peraturan Menteri Pertanian Dan Agraria Nomor 7 Tahun 1963 Tentang Pelaksanaan Konversi Izin Pakai Tanah Di Kebayoran Baru. Disahkan pada tanggal 15 Maret 1963.

i : Keputusan Menteri Pertanian Dan Agraria No. Sk. 12/Ka/1963. Tentang Konversi Hak Opstal Dan Erfpacht Diatas Tanah Eigendom Kotapraja. . Disahkan pada tanggal 14 Mei 1963.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 Tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah. Disahkan pada tanggal 19 Juni 1963.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 Tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah. Disahkan pada tanggal 19 Juni 1963.

i : Peraturan Menteri Pertanian Dan Agraria No. 24 Tahun 1963 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah-Tanah Yang Sudah Ditanami Dengan Tanaman Keras Dan Tanah-Tanah Yang Sudah Diusahakan Sebagai Tambak. Disahkan pada tanggal 4 Nopember 1963.

i : Peraturan Menteri Pertanian Dan Agraria Nomor 6 Tahun 1964 Tentang Pendaftaran Hak-Hak Di Daerah-Daerah Di Mana Pendaftaran Tanah Belum Diselenggarakan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. Disahkan pada tanggal 7 Maret 1964.

i : Keputusan Menteri Pertanian Dan Agraria Nomor Sk. 37/Ka/1964 Tentang Memperpanjang Jangka Waktu Pendaftaran Tersebut Pada Keputusan Menteri Pertanian Dan Agraria Nomor Sk.8/Ka/1963. Disahkan pada tanggal 6 April 1964.

i : Peraturan Menteri Agraria Nomor 4 Tahun 1964 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjanjian Bagi-Hasil. Disahkan pada tanggal 5 Agustus 1964.

i : Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Badan Musyawarah Organisasi Massa Tani. Disahkan pada tanggal 1 September 1964.

i : KEPPRES Nomor 263 Tahun 1964 Tentang Penyempurnaan Panitia Landreform Sebagaimana Termaksud Dalam KEPPRES No. 131 Tahun 1961. Disahkan pada tanggal 17 Oktober 1964.

i : Keputusan Menteri Agraria Nomor Sk. 5/Depag/1965 Tentang Memperpanjang Jangka Waktu Pendaftaran Tersebut Pada Surat Keputusan Menteri Pertanian Dan Agraria Nomor Sk.8/Ka/1963 Bagi P.N.P.R. Wisayayasa. Disagkan pada tanggal 30 Januari 1965.

i : Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 1965 Tentang Pedoman-Pedoman Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961.

t : Peraturan Menteri Agraria Nomor 7 Tahun 1965 Tetang Pedoman Pelaksanaan Konversi Hak Eigendom Tersebut Dalam Ayat 3 Yo Ayat 5 Pasal 1 Ketentuan Konversi Undang-Undang Pokok Agraria Yang Dibebani Dengan Hak Opstal Atau Erfpacht Untuk Perumahan.

i : Peraturan Menteri Agraria Nomor 7 Tahun 1965 Tetang Pedoman Pelaksanaan Konversi Hak Eigendom Tersebut Dalam Ayat 3 Jo. Ayat 5 Pasal 1 Ketentuan Konversi Undang-Undang Pokok Agraria Yang Dibebani Dengan Hak Opstal Atau Erfpacht Untuk Perumahan.

i : Peraturan Memteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 Tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara Dan Ketentuan-Ketentuan Tentang Kebijaksanaan Selanjutnya.

i : Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1965 Tentang Pungutan Uang Pemasukan Dan Penggantian Harga Formulir.

i : Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1966 Tentang Pendaftaran Hak Pakai Dan Hak Pengelolaan.

i : UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

i : PMDN No. 1 Tahun 1967 tentang Pembagian Tugas Dan Wewenang Agraria.

i : PMDN No. 7 Tahun 1968 Tentang Penertiban Dan Penggunaan Pungutan-Pungutan Di Bidang Agraria.

i : Putusan Menteri Dalam Negeri No. Sk. 41/DDA/1969 Tentang Biaya Pendaftaran Tanah.

i : Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Sk. 26/DDA/1970. Tentang Penegasan Konversi Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah. Disahkan pada tanggal 14 Mei 1970.

t : PMDN No. 2 Tahun 1970 Tentang Penyelesaian Konversi Hak-Hak Barat Menjadi Hak Guna Bangunan Dan Hak Guna Usaha. Disahkan pada tanggal 14 Mei 1970.

i : PMDN No. 2 Tahun 1970 Tentang Penyelesaian Konversi Hak-Hak Barat Menjadi Hak Guna Bangunan Dan Hak Guna Usaha. Disahkan pada tanggal 14 Mei 1970.

i : PMDN No. Sk.59/DDA/Tahun 1970 Tentang Penyederhanaan Peraturan Perizinan Pemindahan Hak Atas Tanah. Disahkan pada tanggal 21 Oktober 1970.

i : KMDN No.. Sk. 19/DDA/1971 Tentang Pembentukan Panitia Ujian Pejabat Pembuat Akta Tanah. Disahkan pada tanggal 3 April 1971.

i : PMDN No. 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah.

i : KMDN No. 88 Tahun 1973 Tentang Penguasaan Terhadap Tanah-Tanah Perkebunan Terlantar Dan Atau Ditelantarkan Di Daerah Propinsi Jawa Barat. Disahkan pada tanggal 16 Oktober 24 Mei 1973.

i : PMDN No. 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah. Disahkan pada tanggal 26 Juni 1973.

t : PMDN No. 7 Tahun 1973 Tentang Pembagian Uang Pemasukan Pemberian Hak Atas Tanah. Disahkan pada tanggal 16 Oktober 1973.

i : PMDN No. 7 Tahun 1973 Tentang Pembagian Uang Pemasukan Pemberian Hak Atas Tanah. Disahkan pada tanggal 16 Oktober 1973.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973 Tentang Acara Penetapan Ganti Kerugian Oleh Pengadilan Tinggi Sehubungan Dengan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya. Disahkan pada tanggal 17 Nopember 1973.

i : PMDN No. 5 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Penyediaan Dan Pemberian Tanah Untuk Keperluan Perusahaan

i : PMDN No. 15 Tahun 1974 Tentang Pedoman Tindak Lanjut Pelaksanaan Landrefom.

i : PMDN No. 1 Tahun 1975 Tentang Pedoman Mengenai Penetapan Uang Pemasukan, Uang Wajib Tahunan Dan Biaya Administrasi Yang Bersangkutan Dengan Pemberian Hak-Hak Atas Tanah Negara.

i : PMDN No. 14 Tahun 1975 Tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah Kepunyaan Bersama Dan Pemilikan Bagian-Bagian Bangunan Yang Ada Di Atasnya Serta Penerbitan Sertipikatnya.

i : PMDN No. 15 Tahun 1975 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah.

t : PMDN No. 16 Tahun 1975 Tentang Penggiatan Pendaftaran Tanah Dan Pemberian Sertipikat Dalam Rangka Pengukuran Desa Demi Desa Menuju Desa Lengkap Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961.

i : PMDN No. 16 Tahun 1975 Tentang Penggiatan Pendaftaran Tanah Dan Pemberian Sertipikat Dalam Rangka Pengukuran Desa Demi Desa Menuju Desa Lengkap Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961.

i : PMDN No. 2 Tahun 1976 Tentang Penggunaan Acara Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Bagi Pembebasan Tanah Oleh Pihak Swasta.

i : PMDN No. 1 Tahun 1977 Tentang Tata Cara Permohonan Dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-Bagian Tanah Hak Pengelolaan Serta Pendaftarannya.

i : PMDN No. 2 Tahun 1977 Tentang Kewajiban Mengucapkan Sumpah Atau Janji Bagi Para Penjabat Pembuat Akta Tanah.

i : PMDN No. 6 Tahun 1977 Tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik.

i : PMDN No. 7 Tahun 1977 Tentang Uang Pengganti Biaya Cetak Lembar Isian Di Bidang Pengurusan Hak Atas Tanah Dan Pendaftaran Tanah.

i : PMDN No. 149 Tahun 1977 Tentang Tata Cara Permohonan Dan Penyelesaian Hak Atas Tanah Yang Di Atasnya Terdapat Rumah Negeri Golongan III Yang Telah Dijual.

i : KMDN No. 12 Tahun 1978 Tentang Larangan Pemindahan Hak Milik Atas Tanah Yang Diperoleh Dari Hasil Pelaksanaan Transmigrasi. Disahkan pada tanggal 21 Januari 1978.

i : KEPPRES Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Kesempatan Bagi Penduduk Setempat Berpindah Ke Dalam Proyek Transmigrasi. Disahkan pada tanggal 21 Pebruari 1978.

i : PMDN No. 2 Tahun 1978 Tentang Biaya Pendaftaran Tanah. Disahkan pada tanggal 17 April 1978.

i : PMDN No. 3 Tahun 1978 Tentang Fatwa Tata-Guna Tanah. Disahkan pada tanggal 17 April 1978.

i : PMDN No. 10 Tahun 1978 Tentang Pelaksanaan Pengukuran Dan Pemetaan Pendaftaran Tanah Secara Fotogrametris. Disahkan pada tanggal 27 Juli 1978.

i : PMDN No. 12 Tahun 1978 Tentang Penambahan Ketentuan Mengenai Biaya Pendaftaran Tanah Untuk Badan-Badan Tertentu Pada PMDN No. 2 Tahun 1978. Disahkan pada tanggal 3 Agustus 1978

i : KEPPRES Nomor 26 Tahun 1978 Tentang Badan Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi. Disahkan pada tanggal 31 Agustus 1978.

i : KEPPRES Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Kebijaksanaan dalam rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-hak Barat. Disahkan pada tanggal 8 Agustus 1979.

t : PMDN No. 3 Tahun 1979 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohonan Dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat.

i : PMDN No. 3 Tahun 1979 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohonan Dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat.

i : KEPPRES Nomor 23 Tahun 1980 Tentang Pemanfaatan Tanah Hak Guna Usaha Dan Hak Guna Bangunan Untuk Usaha Patungan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing. Disahkan pada tanggal 20 Maret 1980.

i : KEPPRES Nomor 54 Tahun 1980 Tentang Kebijaksanaan Mengenai Pencetakan Sawah. Disahkan pada tanggal 10 September 1980.

i : KEPPRES Nomor 55 Tahun 1980 Tentang Organisasi Dan Tatakerja Penyelenggaraan Landreform. Disahkan pada tanggal 10 September 1980.

i : Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil. Disahkan pada tanggal 10 September 1980.

i : KMDN No. 37 Tahun 1981 Tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform Sebagai Dimaksud Dalam KEPPRES Nomor 55 Tahun 1980. Disahkan pada tanggal 21 Pebruari 1981.

i : KMDN No. 38 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan KEPPRES No. 55 Tahun 1980 Mengenai Perincian Tugas Dan Tata Kerja Pelaksanaan Landreform. Disahkan pada tanggal 21 Pebruari 1981.

i : KMDN No. 189 Tahun 1981 Tentang Proyek Operasi Nasional Agraria. Disahkan pada tanggal 15 Agustus 1981.

i : KMDN No. 220 Tahun 1981 Tentang Besarnya Pungutan Biaya Dalam Rangka Pemberian Sertipikat Hak Tanah Yang Berasal Dari Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Penegasan Hak Tanah Adat Dan Konversi Bekas Hak Tanah Adat, Yangn Menjadi Obyek Proyek Operasi Nasional Agraria. Disahkan pada tanggal 2 September 1981.

i : KMDN No. 222 Tahun 1981 Tentang Pembentukan Sub Direktorat Landreform Pada Direktorat Agraria Propinsi. Disahkan pada tanggal 5 September 1981.

i : KMDN No. Sk.13/DJA/1982 Tentang Penetapan Besarnya Biaya Administrasi Pemberian Atau Penegasan/Pengakuan Hak Milik Kepada Petani Peserta Proyek Pengembangan Perkebunan (PIR, PIR Khusus PIR Lokal, P.R.P.T.E., Pengembangan Karet Rakyat, Pengembangan Kelapa Rakyat). Disahkan pada tanggal 11 Pebruari 1982.

i : KMDN No. Sk.15/DJA/1982 Tentang Penguasaan Kembali Tanah Negara Ex Eigendom Verponding No. 7267 Dan Tanah Negara Bekas Hak Barat Yang Telah Berakhir Jangka Waktu Berlakunya Yang Terletak Di Karet Kuningan Wilayah Jakarta Selatan. Disahkan pada tanggal 17 Pebruari 1982.

i : KMDN No. Sk.31/DJA/1982 Tentang Pengangkatan Anggota-Anggota Sekretariat Panitia Pertimbangan Landreform Pusat. Disahkan pada tanggal 8 Maret 1982.

i : KMDN No. Sk.51/DJA/1982 Tentang Perubahan Sk Menteri Dalam Negeri No Sk.15/DJA/1982 Tentang Penguasaan Kembali Tanah Negara Ex Eigendom Verponding No. 7267 Dan Tanah Negara Bekas Hak Barat Yang Telah Berakhir Jangka Waktu Berlakunya Yang Terletak Di Karet Kuningan Wilayah Jakarta Selatan. Disahkan pada tanggal 31 Maret 1982.

i : KEPPRES Nomor 23 Tahun 1982 Tentang Pengembangan Budidaya Laut Di Perairan Indonesia. Disahkan pada tanggal 25 Mei 1982.

i : KMDN No. 268 Tahun 1982 Tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan PenertibanTahun Pemanfaatan Tanah Yang Dicadangkan Bagi Dan Atau Dikuasai Oleh Perusahaan-Perusahaan. Disahkan pada tanggal 17 September 1982.

i : KMDN No. 277 Tahun 1982 Tentang Konsolidasi Tanah Perkotaan Di Lingkungan Karet, Karet Kuningan Dan Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi Wilayah Jakarta Selatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Disahkan pada tanggal 20 September 1982.

i : KEPPRES Nomor 48 Tahun 1983 tentang Penanganan Khusus Penataan Ruang dan Penertiban serta Pengendalian Pembangunan pada Kawasan Pariwisata Puncak dan Wilayah Jalur Jalan Jakarta-Bogor-Puncak-Cianjur di luar wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Bogor, Kota Administratif Depok, Kota Madya Cianjur, dan Kota Cibinong. Disahkan pada tanggal 18 Agustus 1983.

i : PMDN No. 10 Tahun 1983 Tentang Tata Cara Permohonan Dan Pemberian Izin Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Kepunyaan Bersama Yang Disertai Dengan Pemilikan Secara Terpisah Bagian-Bagian Pada Bangunan Bertingkat. Disahkan pada tanggal 29 September 1983.

i : PMDN No. 2 Tahun 1984 Tentang Penyediaan Dan Pemberian Hak Tanah Untuk Keperluan Perusahaan Pembangunan Perumahan Sederhana/Perumahan Murah Yang Diselenggarakan Dengan Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah Dari Bank Tabungan Negara. Disahkan pada tanggal 28 Januari 1984.

i : KMDN No. 13 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Ganti Kerugian Dan Harga Tanah Kelebihan Maksimum Dan Guntai (Absentee) Obyek Retribusi Landreform. Disahkan pada tanggal 8 Maret 1984.

i : PMDN No. 3 Tahun 1984 Tentang Tata Cara Penyediaan Tanah Dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Izin Bangunan Serta Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan-Perusahaan Yang Mengadakan Penanaman Modal Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968. Disahkan pada tanggal 19 April 1984.

t : KEPPRES Nomor 33 Tahun 1984 Tentang Pemberlakuan Sepenuhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Disahkan pada tanggal 9 Mei 1984.

i : KEPPRES Nomor 33 Tahun 1984 Tentang Pemberlakuan Sepenuhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Disahkan pada tanggal 9 Mei 1984.

i : KMDN No. 79 Tahun 1984 Tentang Pembentukan Sub Direktorat Landreform Pada Direktorat Agraria Propinsi Irian Jaya. Disahkan pada tanggal 5 Nopember 1984.

i : PMDN No. 12 Tahun 1984 Tentang Penyempurnaan PMDN No. 3 Tahun 1984 Tentang Tata Cara Penyediaan Tanah Dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Izin Bangunan Serta Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan-Perusahaan Yang Mengadakan Penanaman Modal Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968. Disahkan pada tanggal 15 Desember 1984.

i : KMDN No. Sk. 593.41-64 Tahun 1985 Tentang Penetapan Kembali Susunan Keanggotaan Team Pertimbangan Hak Guna Usaha Perkebunan Besar. Disahkan pada tanggal 30 Mei 1985.

i : PMDN No. 02 Tahun 1985 Tentang Tata Cara Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Proyek Pembangunan Di Wilayah Kecamatan. Disahkan pada tanggal 1 Agustus 1985.

i : PMDN No. 3 Tahun 1985 Tentang Tatacara Pensertipikatan Tanah Bagi Program Dan Proyek Departemen Pertanian. Disahkan pada tanggal 19 September 1985.

i : UU No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun. Disahkan pada tanggal 31 Desember 1985.

i : PMDN No. 1 Tahun 1986 Tentang Tatacara Penyediaan Lahan Dan Pemberian Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pengembangan Perkebunan Dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat Yang Dikaitkan Dengan Program Transmigrasi. Disahkan pada tanggal 12 Juli 1986.

i : PMDN No. 6 Tahun 1986 Tentang Pencabutan PMDN No. 3 Tahun 1978 Tentang Fatwa Tata Guna Tanah. Disahkan pada tanggal 15 Nopember 1986.

i : KEPPRES Nomor 64 Tahun 1986 Tentang Pengendalian Penggunaan Tanah Dan Ruang Udara Di Sekitar Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno – Hatta. Disahkan pada tanggal 23 Desember 1946.

i : PMDN No. 2 Tahun 1987 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota.

i : PMDN No. 3 Tahun 1987 Tentang Penyediaan Dan Pemberian Hak Atas Tanah Untuk Keperluan Perusahaan Pembangunan Perumahan.

i : KEPPRES Nomor 26 Tahun 1988 Tentang Badan Pertanahan Nasional. Disahkan pada tanggal 19 Juli 1988.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1988 Tentang Penyesuaian Sertipikat Lama Dalam Rangka Penyelenggaraan Tugas Badan Pertanahan Nasional. Disahkan pada tanggal 26 Desember 1988.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Papan Nama, Kop Surat Dan Stempel Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Bentuk Dan Tatacara Pengisian Serta Pendaftaran Akta Pemisahan Rumah Susun. Disahkan pada tanggal 27 Maret 1989.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1989 Tentang Tata Cara Pembuatan Surat Ukur Diluar Desa Lengkap. Disahkan pada tanggal 27 Maret 1989.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1989 Tentang Bentuk Dan Tata Cara Pembuatan Buku Tanah Serta Penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Disahkan pada tanggal 27 Maret 1989.

t : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Kewenangan Penanda Tanganan Buku Tanah Dan Sertipikat. Disahkan pada tanggal 28 Maret 1989.

i : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Batas Usia Pejabat Pembuat Akta Tanah. Disahkan pada tanggal 28 Maret 1989.

i : KEPPRES Nomor 53 Tahun 1989 Tentang Kawasan Industri. Disahkan pada tanggal 27 Oktober 1989.

i : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 1989 Tentang Penyediaan Dan Pemberian Hak Atas Tanah Untuk Keperluaan Perusahaan Kawasan Industri. Disahkan pada tanggal 28 Oktober 1989.

i : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21/KBPN/1989 Tentang Perubahan Hak Pakai Menjadi Hak Milik Atas Tanah-Tanah Yang Telah Diberikan Kepada Para Transmigran. Disahkan pada tanggal 29 Oktober 1989.

i : KEPPRES Nomor 57 Tahun 1989 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional. Disahkan pada tanggal 9 Nopember 1989.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 1990 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Guna Usaha Kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi. Disahkan pada tanggal 25 Juli 1990.

i : KEPPRES Nomor 33 Tahun 1990 Tentang Penggunaan Tanah Bagi Pembangunan Kawasan Industri. Disahkan pada tanggal 25 Juli 1990.

i : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 1990 Tentang Penyempurnaan Susunan Keanggotaan Dan Tugas Tim

Pertimbangan Hak Guna Usaha Perkebunan Besar. Disahkan pada tanggal 6 September 1990.

i : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 1990 Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Di Kecamatan Yang Sudah Ada Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Dalam Wilayah Kerja Badan Pertanahan Nasional Propinsi Maluku. Disahkan pada tanggal 6 September 1990.

i : Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Peremajaan Pemukiman Kumuh Yang Berada Di Atas Tanah Negara. Disahkan pada tanggal 26 September 1990.

i : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 1990 Tentang Pengangkatan Pengawas Kegiatan Proyek Operasi Nasional Pertanahan Propinsi Dan Bagian Proyek Operasi Nasional Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Seluruh Indonesia. Disahkan pada tanggal 10 Nopember 1990.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa. Disahkan pada tanggal 2 Mei 1991.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1991 Tentang Pengaturan Penguasaan Tanah Obyek Landreform Secara Swadaya. Disahkan pada tanggal 27 Nopember 1991.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 Tentang Konsolidasi Tanah. Disahkan pada tanggal 27 Nopember 1991.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1992 Tentang Tata Cara Pemungutan Uang Pemasukan Tanah-Tanah Obyek Landreform. Disahkan pada tanggal 20 Pebruari 1992.

i : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Penyesuaian Harga Ganti Rugi Tanah Kelebihan Maksimum Dan Absentee/Guntai. Disahkan pada tanggal 20 Pebruari 1992.

. i : PMDN No. 3 Tahun 1992 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Rumah Susun. Disahkan pada tanggal 17 Maret 1992

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Biaya Pendaftaran Tanah. Disahkan pada tanggal 4 Mei 1992.

i : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Susunan Dan Tugas Panitia Pemeriksaan Tanah. Disahkan pada tanggal 17 Juli 1992

i : Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1993 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Dalam Kawasan-Kawasan Tertentu di Propinsi Riau. Disahkan pada tanggal 17 Juni 1993.

i : KEPPRES Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Disahkan pada tanggal 17 Juni 1993.

i : Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Penggantian Sertipikat Hak Atas Tanah. Disahkan pada tanggal 17 Juni 1993.

i : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Pemberian Perpanjangan Dan Pembaharuan Hak Guna Bangunan Dalam Kawasan-Kawasan Tertentu Di Propinsi Riau. Disahkan pada tanggal 8 September 1993.

i : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi Dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal. Disahkan pada tanggal 23 Oktober 1993.

i : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 Tentang Ketentuan Pelaksanaan KEPPRES Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

i : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Penyelengaraan Pendaftaran

Tanah Sistematik Di Daerah Uji Coba. Disahkan pada tanggal 3 Pebruari 1995.

i : Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1995 Tentang Perubahan Besarnya Pungutan Biaya Dalam Rangka Pemberian Sertipikat Hak Atas Tanah Yang Berasal Dari Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Penegasan Hak Tanah Adat Dan Konversi Bekas Hak Tanah Adat, Yang Menjadi Obyek Proyek Operasi Nasional Agraria. Disahkan pada tanggal 24 Maret 1995.

i : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1995 Tentang Perubahan Dan Penyempurnaan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1991 Tentang Pengaturan Penguasaan Tanah Obyek Landreform Secara Swadaya. Disahkan pada tanggal 26 Mei 1995.

t : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1995 Tentang Penyelengaraan Pendaftaran Tanah Secara Sistematik. Disahkan pada tanggal 23 Oktober 1995.

i : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1995 Tentang Penyelengaraan Pendaftaran Tanah Secara Sistematik. Disahkan pada tanggal 23 Oktober 1995.

t : UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Disahkan pada tanggal 9 April 1996.

i : UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Disahkan pada tanggal 9 April 1996.

i : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1996 Tentang Pengukuran Dan Pemetaan Untuk Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah. Disahkan pada tanggal 10 April 1996.

i : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1996 Tentang Bentuk Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, Akta Pemberian Hak Tanggungan, Buku Tanah Hak Tanggungan, Dan Sertipikat Hak Tanggungan. Disahkan pada tanggal 18 April 1996.

i : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Untuk Menjamin Pelunasan Kredit-Kredit Tertentu. Disahkan pada tanggal 8 Mei 1996.

i : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Pendaftaran Hak Tanggungan. Disahkan pada tanggal 30 Mei 1996.

i : KEPPRES Nomor 41 Tahun 1996 Tentang Kawasan Industri. Disahkan pada tanggal 4 Juni 1966.

i : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1996 Tentang Formasi Pejabat Pembuat Akta Tanah. Disahkan pada tanggal 4 Juni 1996.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai. Disahkan pada tanggal 17 Juni 1996.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai. Disahkan pada tanggal 17 Juni 1996.

i : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing. Disahkan pada tanggal 7 Oktober 1996.

i : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 1996 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7

Tahun 1996 Tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing. Disahkan pada tanggal 15 Oktober 1996.

i : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1997 Tentang Pemetaan Penggunaan Tanah Perdesaan, Penggunaan Tanah Perkotaan, Kemampuan Tanah Dan Penggunaan Simbol/Warna Untuk Penyajian Dalam Peta. Disahkan pada tanggal 16 April 1997.

i : Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1997 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Sangat Sederhana (RSS) Dan Rumah Sederhana (RS). Disahkan pada tanggal 2 juli 1997.

i : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1997 Tentang Perolehan Izin Lokasi Dan Hak Guna Bangunan Bagi Perusahaan Kawasan Industri Dan Perusahaan Industri. Disahkan pada tanggal 25 Agustus 1997.

i : Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 Tentang Penertiban Tanah-Tanah Obyek Redistribusi Landreform. Disahkan pada tanggal 3 September 1997.

i : Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 1997 Tentang Peniadaan Ganti Rugi Atas Tanah-Tanah Yang Terkena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958. Disahkan pada tanggal 24 September 1997.

t : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Disahkan pada tanggal 1 Oktober 1997.

i : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Disahkan pada tanggal 1 Oktober 1997.

i : Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah. Disahkan pada tanggal 6 Oktober 1997.

i : Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1997 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Sangat Sederhana (RSS) Dan Rumah Sederhana (RS). Disahkan pada tanggal 22 Oktober 1997

i : Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Perubahan Hak Milik Menjadi Hak Guna Bangunan Atau Hak Pakai Dan Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Pakai. Disahkan pada tanggal 9 Desember 1997.

i : Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perluasan Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk RSS/RS Menurut Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1997. Disahkan pada tanggal 22 Januari 1998.

i : Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal Yang Telah Dibeli Oleh Pegawai Negeri Dari Pemerintah. Disahkan pada tanggal 29 Januari 1998.

i : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Surveyor Berlisensi. Disahkan pada tanggal 27 Pebruari 1998.

i : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Pemanfaatan Tanah Kosong Untuk Tanaman Pangan. Disahkan pada tanggal 22 Juni 1998.

i : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Pedoman Penetapan Uang Pemasukan Dalam Pemberian Hak Atas Tanah Negara. Disahkan pada tanggal 22 Juni 1998.

i : Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal. Disahkan pada tanggal 26 Juni 1998.

i : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Perubahan Hak Guna Bangunan Atau Hak Pakai Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal Yang Dibebani Hak Tanggungan Menjadi Hak Milik. Disahkan pada tanggal 31 Juli 1998.

i : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Pedoman Penetapan Uang Pemasukan Dalam Pemberian Hak Atas Tanah Negara. Disahkan pada tanggal 21 Agustus 1998.

i : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1998 Tentang Kewenangan Menandatangani Buku Tanah, Surat Ukur Dan Sertipikat. Disahkan pada tanggal 28 September 1998.

i : Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Surveyor Berlisensi. Disahkan pada tanggal 29 September 1998.

i : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan. Disahkan pada tanggal 29 Januari 1999.

i : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi. Disahkan pada tanggal 10 Pebruari 1999.

i : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasinal Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara. Disahkan pada tanggal 19 Pebruari 1999.

i : Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Penetapan Formasi Pejabat Pembuat Akta Tanah Di Kabupaten/Kotamadya. Disahkan pada tanggal 26 Pebruari 1999.

i : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Disahkan pada tanggal 30 Maret 1999.

t : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Disahkan pada tanggal 24 Juni 1999.

i : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Disahkan pada tanggal 24 Juni 1999.

i : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pendaftaran Perubahan Data Pendaftaran Tanah Yang Menyangkut Aset Dalam Restrukturisasi Dan Atau Kewajiban Dalam Restrukturisasi Yang Berupa Hak Atas Tanah Yang Sudah Bersertipikat Dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Disahkan pada tanggal 29 September 1999.

t : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan. Disahkan pada tanggal 24 Oktober 1999.

i : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan. Disahkan pada tanggal 24 Oktober 1999.

i : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Sistematik Pada Daerah Uji Coba Di Wilayah Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Malang Dan Kantor Pertanahan Kotamadya Tangerang. Disahkan pada tanggal 27 Juni 2000.

i : KEPPRES Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Bidang Pertanahan. Disahkan pada tanggal 17 Januari 2001.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 Tentang Irigasi. Disahkan pada tanggal 5 Desember 2001.

i : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Disahkan pada tanggal 31 Januari 2002.

i : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan Penegasan Tanah Negara Menjadi Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah/Landreform. Disahkan pada tanggal 7 Maret 2002.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan. Disahkan pada tanggal 8 Juni 2002.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional. Disahkan pada tanggal 27 Agustus 2002.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota. Disahkan pada tanggal 12 Nopember 2002.

i : KEPPRES Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan. Disahkan pada tanggal 31 Mei 2003.

i : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Teknis Pelaksanaan Ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional. Disahkan pada tanggal 2 juli 2003.

i : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Norma Dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Disahkan pada tanggal 23 Agustus 2003.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah. Disahkan pada tanggal 10 Mei 2004.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan. Disahkan pada tanggal 18 Oktober 2004.

i : Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional. Disahkan pada tanggal 11 April 2006.

i : Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Disahkan pada tanggal 3 Mei 2005.

i : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penetapan Formasi Pejabat Pembuat Akta Tanah. Disahkan pada tanggal 16 Mei 2006.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Disahkan pada tanggal 16 Mei 2006.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Disahkan pada tanggal 16 Mei 2006.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan. Disahkan pada tanggal 16 Mei 2006.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Mekanisme Dan Tata Kerja Staf Khusus. Disahkan pada tanggal 17 Mei 2006.

i : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi Di Provinsi Kalimantan Barat. Disahkan pada tanggal 1 Juni 2006.

i : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau Di Provinsi Kalimantan Barat. Disahkan pada tanggal 1 Juni 2006.

i : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang Di Provinsi Bengkulu. Disahkan pada tanggal 1 Juni 2006.

i : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana Di Provinsisulawesi Tenggara. Disahkan pada tanggal 1 Juni 2006.

i : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir Di Provinsi Sumatera Utara. Disahkan pada tanggal 1 Juni 2006.

i : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma Di Provinsi Bengkulu. Disahkan pada tanggal 1 Juni 2006.

i : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Disahkan pada tanggal 1 Juni 2006.

i : Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Disahkan pada tanggal 5 Juni 2006.

i : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 245-VII-2006 Tentang Pembentukan Tim Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia. Disahkan pada tanggal 25 September 2006.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Rencana Strategis Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2007 -2009. Disahkan pada tanggal 29 Desember 2006.

i : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 01-VII-2007 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembaruan Agraria Nasional. Disahkan pada tanggal 3 Januari 2007.

i : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Dewan Penyantun Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN). Disahkan pada tanggal 5 Januari 2007.

i : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Disahkan pada tanggal 22 Pebruari 2007.

i : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Pakpak Bharat Di Provinsi Sumatera Utara. Disahkan pada tanggal 22 Pebruari 2007.

i : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya Di Provinsi Sumatera Barat. Disahkan pada tanggal 22 Pebruari 2007.

i : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Di Provinsi Sumatera Selatan. Disahkan pada tanggal 22 Pebruari 2007.

i : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir Timur Di Provinsi Sumatera Selatan. Disahkan pada tanggal 22 Pebruari 2007.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Hubungan Dan Kerjasama Luar Negeri Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Disahkan pada tanggal 20 Maret 2007.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Disahkan pada tanggal 21 Mei 2007.

i : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Dan Penyelesaian Masalah Pertanahan. Disahkan pada tanggal 2 Juni 2007.

i : Peraturan Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Dan Pembiayaan Reforma Agraria Nasional. Disahkan pada tanggal 21 juni 2007.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Dan Pembiayaan Reforma Agraria Regional, Cabang Dan Ranting. Disahkan pada tanggal 21 juni 2007.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bagi Badan Pengelolaan Dan Pembiayaan Reforma Agraria Nasional. Disahkan pada tanggal 21 Juni 2007.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah. Disahkan pada tanggal 11 juli 2007.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Reforma Agraria Nasional. Disahkan pada tanggal 24 September 2007.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Disahkan pada tanggal 25 September 2007.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah Di Provinsi Bangka Belitung. Disahkan Pada Tanggal 25 September 2007. Disahkan pada tanggal 25 September 2007.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pembentukkan Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur. Disahkan pada tanggal 31 Januari 2008.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Melalui Kegiatan Sertipikasi Hak Atas Tanah Untuk Peningkatan Akses Permodalan. Disahkan pada tanggal 10 Maret 2008.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Subbagian, Seksi Dan

Subbidang Dilingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Disahkan pada tanggal 25 Juni 2008.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Subbagian Dan Seksi Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Uraian Tugas Urusan Dan Subseksi Pada Kantor Pertanahan. Disahkan pada tanggal 25 juni 2008.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Penyederhanaan Dan Percepatan Standar Prosedur Operasi Pengaturan Dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan Pertanahan Tertentu. Disahkan pada tanggal 11 Juli 2008.

i : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Disahkan pada tanggal 24 September 2008.

i : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 59 Tahun 2008 Tentang Lambang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Disahkan pada tanggal 24 September 2008.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Melalui Kegiatan Sertipikasi Hak Atas Tanah Untuk Peningkatan Akses Permodalan. Disahkan pada tanggal 26 September 2008.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara. Disahkan pada tanggal 3 Pebruari 2009.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor

Pertanahan Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara. Disahkan pada tanggal 3 Pebruari 2009

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Tengah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Disahkan pada tanggal 3 Pebruari 2009

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur. Disahkan pada tanggal 3 Pebruari 2009

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur. Disahkan pada tanggal 3 Pebruari 2009

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu. Disahkan pada tanggal 3 Pebruari 2009

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau. Disahkan pada tanggal 3 Pebruari 2009

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas Dan Tata Kearsipan Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Disahkan pada tanggal 26 Pebruari 2009.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Surabaya Di Provinsi Jawa Timur. Disahkan pada tanggal 6 Maret 2009.

i : KEPPRES Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional. Disahkan pada tanggal 4 Maret 2009. Disahkan pada tanggal 8 Maret 2009.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Larasita Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Disahkan pada tanggal 11 Mei 2009.

i : UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Disahkan pada tanggal 14 Oktober 2009.

i : UU No. 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Disahkan pada tanggal 14 Oktober 2009.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Disahkan pada tanggal 26 Oktober 2009.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Disahkan pada tanggal 22 Januari 2010.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Disahkan pada tanggal 22 Januari 2010.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan. Disahkan pada tanggal 25 Januari 2010.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat. Disahkan pada tanggal 28 Januari 2010.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Loket Pelayanan Pertanahan. Disahkan pada tanggal 28 Januari 2010.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar. Disahkan pada tanggal 1 Pebruari 2010

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Penanganan Bencana Dan Pengembalian Hak-Hak Masyarakat Atas Aset Tanah Di Wilayah Bencana. Disahkan pada tanggal 8 Pebruari 2010.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah. Disahkan pada tanggal 5 April 2010.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. Disahkan pada tanggal 5 April 2010.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh. Disahkan pada tanggal 5 April 2010.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh. Disahkan pada tanggal 5 April 2010.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Buton Utara, Dan Kabupaten Sumba Barat Daya. Disahkan pada tanggal 28 Juni 2010.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Penghargaan Di Bidang Pertanahan. Disahkan pada tanggal 25 Nopember 2010.

i : UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Disahkan pada tanggal 10 Nopember 2011.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu. Disahkan pada tanggal 4 Pebruari 2011.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi Dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah. Disahkan pada tanggal 4 Pebruari 2011.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar. Disahkan pada tanggal 14 Juli 2011.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu.

i : UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Disahkan pada tanggal 14 Januari 2012.

i : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 77/Kep-7.1/III/2012 Tentang Praksis Reforma Agraria.

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TAHUN 1960 (PERPU TAHUN 1960)

PERPU Nomor 3 Tahun 1960 (UU No. 3 Prp Th. 1960)

Tentang Penguasaan Benda-benda Tetap Milik Perseorangan Warganegara Belanda. Disahkan pada tanggal 9 Pebruari 1960. (LN No. 19 & TLN No. 1940)

PERPU Nomor 4 Tahun 1960 (UU No. 4 Prp Th. 1960)

Tentang Perairan Indonesia. Disahkan pada tanggal 18 Pebruari 1960. (LN No. 19 & TLN No. 1940)

c : UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

PERPU No. 10 Tahun 1960 (UU No. 10 Prp Tahun 1960)

Tentang Pejabat yang Menjalankan Pekerjaan Jabatan Presiden Jika Presiden Mangkat, Berhenti atau Berhalangan, sedang Wakil Presiden Tidak Ada atau Berhalangan. Disahkan pada tanggal 23 Maret 1960. (LN No. 31)

i : KEPPRES No. 509 Tahun 1961 Tentang Perobahan KEPPRES Repbulik Indonesia No. 131 Tahun 1961.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 Tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah.

PERPU Nomor 15 Tahun 1960 (UU No. 15 Prp Th. 1960)

Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing. Disahkan pada tanggal 7 April 1960. (LN No. 42 & TLN No. 1968)

c : UU No. 16 Tahun 1965 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing yang telah Diubah dan Ditambah dengan Undang-Undang No. 15 Prp Tahun 1960.

PERPU Nomor 29 Tahun 1960 (UU No. 29 Prp Th. 1960)

Tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan transmigrasi. Disahkan pada tanggal 12 Agustus 1960. (LN No. 86 & TLN No. 2061)

t : UU No. 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Transmigrasi.

c : UU No. 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Transmigrasi.

PERPU No. 37 Tahun 1960 (UU No. 37 Prp Tahun 1960)

tentang Pertambangan. Disahkan pada tanggal 14 Oktober 1960. (LN No. 119 & TLN No. 2055)

c : UU No. 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

PERPU No. 38 Tahun 1960 (UU No. 38 Prp Tahun 1960)

tentang Penggunaan dan Penetapan Luas Tanah Untuk Tanaman-tanaman Tertentu. Disahkan pada tanggal 14 Oktober 1960. (LN No. 120 & TLN No. 2058)

u : UU No. 20 Tahun 1964 Tentang Perubahan dan Tambahan UU No. 38 Prp. Tahun 1960 tentang Penggunaan dan Penetapan Luas Tanah Untuk Tanaman-tanaman Tertentu.

PERPU No. 44 Tahun 1960 (UU No. 44 Prp Tahun 1960)

tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi. Disahkan pada tanggal 26 Oktober 1960. (LN No. 133 & TLN No. 2070)

t : UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

tbl : UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

PERPU No. 46 Tahun 1960 (UU No. 46 Prp Tahun 1960)

tentang Perubahan Nama dan Kedudukan Hukum serta Pemindahan Tempat Kedudukan "N.V. Nederlandsch-Indische Aard-olie Maatschappij". Disahkan pada tanggal 29 Oktober 1960. (LN No. 150 & TLN No. 2100)

PERPU No. 47 Tahun 1960 (UU No. 47 Prp Tahun 1960)

tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara dan Daerah Tingkst I Sulawesi Utara - Tengah. Disahkan pada tanggal 13 Desember 1960. (LN No. 151 & TLN No. 2102)

u : PERPU No. 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tk. I Sulawesi Tengah dan Daerah Tk. I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah UU No. 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tk. I Sulawesi Selatan – Tenggara dan Daerah Tingkst I Sulawesi Utara – Tengah.

PERPU No. 50 Tahun 1960 (UU No. 50 Prp Tahun 1960)

tentang Larangan Organisasi-organisasi dan Pengawasan Perusahaan-perusahaan Orang Asing Tertentu. Disahkan pada tanggal 14 Desember 1960. (LN No. 157 & TLN No. 2105)

PERPU No. 51 Tahun 1960 (UU No. 51 Prp Tahun 1960)

tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya. Disahkan pada tanggal 14 Desember 1960. (LN No. 158 & TLN No. 2106)

i : PMDN No. 3 Tahun 1979 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohonan Dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat.

i : KEPPRES Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

i : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 Tentang Ketentuan Pelaksanaan KEPPRES Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

i : Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

i : Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar.

PERPU No. 56 Tahun 1960 (UU No. 56 Prp Tahun 1960)

Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Disahkan Pada Tanggal 29 Desember 1960. (LN No. 174 & TLN No. 2117)

t : Keputusan Menteri Agraria No. Sk. 978/Ka/1960 Tentang Penegasan Luas Maksimum Tanah Pertanian.

i : Keputusan Menteri Agraria No. Sk. 978/Ka/1960 Tentang Penegasan Luas Maksimum Tanah Pertanian.

t : Keputusan Menteri Agraria No. Sk. 115/Ka/61 Tentang Memperpanjang Jangka Waktu Pendaftaran.

i : Keputusan Menteri Agraria No. Sk. 115/Ka/61 Tentang Memperpanjang Jangka Waktu Pendaftaran.

t : Keputusan Menteri Agraria No. Sk. 403/Ka/1961 Tentang Memperpanjang Jangka Waktu Pendaftaran.

i : Keputusan Menteri Agraria No. Sk. 403/Ka/1961 Tentang Memperpanjang Jangka Waktu Pendaftaran.

t : Keputusan Menteri Agraria No. Sk. 509/Ka/1961 Tentang Pernyataan Penguasaan Oleh Pemerintah Atas Bagian-Bagian Tanah Yang Merupakan Kelebihan Dari Luas Maksimum.

i : Keputusan Menteri Agraria No. Sk. 509/Ka/1961 Tentang Pernyataan Penguasaan Oleh Pemerintah Atas Bagian-Bagian Tanah Yang Merupakan Kelebihan Dari Luas Maksimum.

t : Peraturan Menteri Pertanian Dan Agraria Nomor 20 Tahun 1963 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Gadai.

i : Peraturan Menteri Pertanian Dan Agraria Nomor 20 Tahun 1963 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Gadai.

i : Peraturan Menteri Pertanian Dan Agraria No. 24 Tahun 1963 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah-Tanah Yang Sudah Ditanami Dengan Tanaman Keras Dan Tanah-Tanah Yang Sudah Diusahakan Sebagai Tambak.

t : Keputusan Menteri Pertanian Dan Agraria No. Sk. 10/Ka/1963 Tentang Penegasan Berlakunya Pasal 7 Undang-Undang No. 56/Prp/1960 Bagi Gadai Tanaman Keras.

i : Keputusan Menteri Pertanian Dan Agraria No. Sk. 10/Ka/1963 Tentang Penegasan Berlakunya Pasal 7 Undang-Undang No. 56/Prp/1960 Bagi Gadai Tanaman Keras.

i : Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1964 Tentang Cara Pemungutan Uang Dalam Rangka Pelaksanaan Landreform.

i : KEPPRES Nomor 263 Tahun 1964 Tentang Penyempurnaan Panitya Landreform Sebagaimana Termaksud Dalam KEPPRES No. 131 Tahun 1961.

i : PMDN No. 15 Tahun 1974 Tentang Pedoman Tindak Lanjut Pelaksanaan Landrefom.

i : KEPPRES Nomor 54 Tahun 1980 Tentang Kebijaksanaan Mengenai Pencetakan Sawah.

i : KEPPRES Nomor 55 Tahun 1980 Tentang Organisasi Dan Tatakerja Penyelenggaraan Landreform.

i : KMDN No. 37 Tahun 1981 Tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform Sebagai Dimaksud Dalam KEPPRES Nomor 55 Tahun 1980.

i : KMDN No. Sk.31/DJA/1982 Tentang Pengangkatan Anggota-Anggota Sekretariat Panitia Pertimbangan Landreform Pusat.

i : KMDN No. 13 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Ganti Kerugian Dan Harga Tanah Kelebihan Maksimum Dan Guntai (Absentee) Obyek Retribusi Landreform.

i : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Penyesuaian Harga Ganti Rugi Tanah Kelebihan Maksimum Dan Absentee/Guntai.

i : Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 Tentang Penertiban Tanah-Tanah Obyek Redistribusi Landreform.

i : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 01-VII-2007 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembaruan Agraria Nasional.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1991 Tentang Pengaturan Penguasaan Tanah Obyek Landreform Secara Swadaya.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 Tentang Konsolidasi Tanah.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1992 Tentang Tata Cara Pemungutan Uang Pemasukan Tanah-Tanah Obyek Landreform.

i : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1995 Tentang Perubahan Dan Penyempurnaan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1991 Tentang Pengaturan Penguasaan Tanah Obyek Landreform Secara Swadaya.

i : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasinal Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu.

PERATURAN PRESIDEN TAHUN 1960 YANG MENJADI UNDANG-UNDANG (UU Prps)

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 1960 (UU No. 5 Prps Th. 1960)

Tentang Pembentukan Propinsi Administrasi Sulawesi Utara dan Propinsi Administratip Sulawesi Selatan. Disahkan pada tanggal 31 Maret 1960. (LN No. 38 & TLN No. 1963)

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 1961

UNDANG-UNDANG TAHUN 1961

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1961

Tentang Tambahan Atas Lampiran UU No. 10 Tahun 1959 tentang Pembatalan Hak-hak Pertambangan. Disahkan pada tanggal 10 Mei 1961. (LN No. 216 & TLN No. 2274)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1961

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1952 tentang Hal Mengangkat dan Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil. Disahkan pada tanggal 12 Juli 1961. (LN No. 259 & TLN No. 2301)

c : UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1961

tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian. Disahkan pada tanggal 21 Juli 1961. (LN No. 263 & TLN No. 2312)

c : UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961

Tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya. Disahkan Pada Tanggal 26 September 1961. (LN No.288 & TLN No. 2324)

t Keputusan Menteri Agraria No. Sk XI/1/Ka/1962 Tentang Panitya Penaksir Ganti Kerugian Untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya.

i Keputusan Menteri Agraria No. Sk XI/1/Ka/1962 Tentang Panitya Penaksir Ganti Kerugian Untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya.

i : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973 Tentang Pelaksanaan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973 Tentang Acara Penetapan Ganti Kerugian Oleh Pengadilan Tinggi Sehubungan Dengan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973 Tentang Acara Penetapan Ganti Kerugian Oleh Pengadilan Tinggi Sehubungan Dengan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya.

i : KEPPRES Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

i : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 Tentang Ketentuan Pelaksanaan KEPPRES Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

i : Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

i : Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

PERATURAN PRESIDEN TAHUN 1961
YANG MENJADI UNDANG-UNDANG
(UU Prps)

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 (UU No. 12 Prps Th. 1961)

Tentang Pemberian Tugas Belajar. Disahkan pada tanggal 16 Mei 1961. (LN No. 234 & TLN No. 2278)

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 1961 (UU No. 19 Prps Th. 1961)

Tentang Pokok-pokok Kearsipan Nasional. Disahkan pada tanggal 26 Desember 1961. (LN No. 310 & TLN No. 2368)

c : UU No. 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan.

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1961 (UU No. 20 Prps Th. 1961)

Tentang Tugas, Kewajiban dan Lapangan Pekerjaan Dokumentasi dan Perpustakaan dalam Lingkungan Pemerintah. Disahkan pada tanggal 26 Desember 1961. (LN No. 311 & TLN No. 2369)

PENETAPAN PRESIDEN TAHUN 1961
YANG MENJADI UNDANG-UNDANG
(UU Pnps)

Undang-Undang Nomor 2 Pnps Tahun 1961 (UU No. 2 Pnps Th. 1961)

Tentang Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya. Disahkan pada tanggal 28 Agustus 1961. (LN No. 274 & TLN No. 2316)

c : UU No. 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 1962

PERATURAN PEMERINTAH PENGGGANTI UNDANG-UNDANG TAHUN 1962 (PERPU TAHUN 1962)

PERPU No. 6 Tahun 1962

Tentang Pokok-pokok Perumahan. Disahkan pada tanggal 3 Agustus 1962. (LN No. 40 & TLN No. 2476)

uu : UU No. 1 Tahun 1964 tentang Penetapan PERPU No. 6 Tahun 1962 tentang Pokok-pokok Perumahan menjadi Undang-Undang.

c : UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman.

PENETAPAN PRESIDEN TAHUN 1962 YANG MENJADI UNDANG-UNDANG (UU Pnps)

Undang-undang Nomor 1 Pnps Tahun 1962 (UU No. 1 Pnps th 1962)

tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat Bentuk Baru. Disahkan pada tanggal 1 Januari 1962. (LN No. 1 & TLN No. 2372)

i : UU No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 1963

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TAHUN 1963 (PERPU TAHUN 1963)

PERPU No. 5 Tahun 1963

Tentang Surat Hutang Landreform. Disahkan pada tanggal 22 Juni 1963. (LN No. 63 & TLN No. 2557)

uu : UU No. 6 Tahun 1964 tentang Penetapan PERPU No. 5 Tahun 1963 tentang Surat Hutang Landreform menjadi Undang-Undang.

PENETAPAN PRESIDEN TAHUN 1963 YANG MENJADI UNDANG-UNDANG (UU Pnps)

Undang-Undang Nomor 1 Pnps Tahun 1963 (UU No. 1 Pnps Th. 1963)

tentang Pemerintahan di Wilayah Irian Barat Segera Setelah Diserahkan Kepada Republik Indonesia. Disahkan pada tanggal 21 Pebruari 1963. (LN No. 8)

Undang-Undang Nomor 14 Pnps Tahun 1963 (UU No. 14 Pnps Th. 1963)

tentang Kebijaksanaan Pembangunan Propinsi Irian Barat. Disahkan pada tanggal 15 Nopember 1963. (LN No. 108)

Undang-Undang Nomor 15 Pnps Tahun 1963 (UU No. 15 Pnps Th. 1963)

tentang Perubahan dan Tambahan Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1961 tentang Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya. Disahkan pada tanggal 5 Desember 1963. (LN No. 117)

c : UU No. 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia.

PERATURAN PRESIDEN TAHUN 1963 YANG MENJADI UNDANG-UNDANG (UU Prps)

PERPRES No. 13 Tahun 1963 (UU No. 13 Prps Tahun 1963)

Tentang Penertiban Pembangnan Baru di Sepanjang Jalan Antara Jakarta-Bogor-Puncak-Cianjur di Luar Batas-batas DKI Jakarta Raya, Daswati II Cianjur. Disahkan pada tanggal 22 Mei 1963. (LN No. 55)

PERPRES No. 19 Tahun 1963 (UU No. 19 Prps Tahun 1963)

Tentang Ketentuan Pokok Mengenai Bentuk, Jenis, Warna, Pembuatan serta Pemakaian Pakaian Seragam dan Tanda Pengenal Diluar Angkatan Perang dan Kepolisian Negara . Disahkan pada tanggal 5 Agustus 1963. (LN No. 85 & TLN No. 2584)

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 1964

UNDANG-UNDANG TAHUN 1964

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Pokok-pokok Perumahan menjadi Undang-Undang. Disahkan pada tanggal 20 Januari 1964. (LN No. 3 & TLN No. 2611)

i : UU No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun.

i : Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Peremajaan Pemukiman Kumuh Yang Berada Di Atas Tanah Negara.

i : PMDN No. 3 Tahun 1992 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Rumah Susun.

t : UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman

tbl : UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman

tbl : UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1964

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1963 tentang Surat Hutang Landreform menjadi Undang-Undang. Disahkan pada tanggal 16 Juni 1964. (LN No. 61 & TLN No. 2659)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964

Tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya tetap Sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dengan Nama Jakarta. Disahkan pada tanggal 31 Agustus 1964. (LN No. 78 & TLN No. 2671)

tbl : UU No. 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 PRP Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara menjadi Undang-Undang. Disahkan Pada Tanggal 23 September 1964. (LN No. 94 & TLN No. 2687)

i : UU No. 7 Tahun 1990 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung.

i : UU No. 4 Tahun 1994 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu.

i : UU No. 6 Tahun 1995 Tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Kendari.

i : UU No. 13 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara.

i : UU No. 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo.

i : UU No. 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Dan Kabupaten Banggai Kepulauan.

i : UU No. 10 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo.

i : UU No. 11 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Dan Kabupaten Banggai Kepulauan.

i : UU No. 13 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Bau-Bau.

i : UU No. 8 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud Di Provinsi Sulawesi Utara.

i : UU No. 10 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah.

i : UU No. 11 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa Dan Kota Palopo Di Provinsi Sulawesi Selatan.

i : UU No. 4 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara.

i : UU No. 6 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango Dan Kabupaten Pohuwato Di Provinsi Gorontalo.

i : UU No. 7 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur Dan Kabupaten Mamuju Utara Di Provinsi Sulawesi Selatan.

i : UU No. 10 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan Dan Kota Tomohon Di Provinsi Sulawesi Utara.

i : UU No. 29 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, Dan Kabupaten Kolaka Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara.

i : UU No. 32 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una Di Provinsi Sulawesi Tengah.

i : UU No. 33 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara Di Provinsi Sulawesi Utara.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Buton Dari Wilayah Kota Bau-Bau Ke Pasarwajo Di Wilayah Kabupaten Buton.

i : UU No. 4 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara.

i : UU No. 9 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara Di Provinsi Sulawesi Utara.

i : UU No. 10 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Di Provinsi Sulawesi Utara.

i : UU No. 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara.

i : UU No. 14 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara.

i : UU No. 15 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Di Provinsi Sulawesi Utara.

i : UU No. 27 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Sigi Di Provinsi Sulawesi Tengah.

i : UU No. 28 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara Di Provinsi Sulawesi Selatan.

i : UU No. 29 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Di Provinsi Sulawesi Utara.

i : UU No. 30 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Di Provinsi Sulawesi Utara.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang. Disahkan pada tanggal 23 September 1964. (LN No. 95 & TLN No. 2688)

u : UU No. 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu.

i : UU No. 6 Tahun 1991 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat Ii Lampung Barat.

i : UU No. 2 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus.

i : UU No. 12 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, Dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro.

i : UU No. 33 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran Di Provinsi Lampung.

i : UU No. 50 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat Di Provinsi Lampung.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat Ii Dairi Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Utara menjad Undang-Undang. Disahkan Pada Tanggal 23 September 1964. (LN No. 96 & TLN No. 2689)

i : UU No. 9 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, Dan Kabupaten Humbang Hasundutan Di Provinsi Sumatera Utara.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1964

Tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang No. 38 Prp Tahun 1960 tentang Penggunaan dan Penetapan Luas Tanah untuk Tanaman-tanaman Tertentu. Disahkan pada tanggal 31 Oktober 1964. (LN No. 108)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1964

Tentang Pengadilan Landreform. Disahkan pada tanggal 31 Oktober 1964. (LN No. 109 & TLN No. 2701)

c : UU No. 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan PERPU.

c : UU No. 7 Tahun 1970 tentang Penghapusan Pengadilan Landreform.

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TAHUN 1964 (PERPU)

PERPU Nomor 2 Tahun 1964

Tentang Pembentukan Daerah Tk. I Sulawesi Tengah dan Daerah Tk. I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah UU No. 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tk. I Sulawesi Utara – tengah dan Daerah Tk. I Sulawesi Selatan – Tenggara. Disahkan pada tanggal 13 Pebruari 1964. (LN No. 7 & TLN No. 2619)

uu : UU No. 13 Tahun 1964 tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 PRP Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara menjadi Undang-Undang.

PERPU Nomor 3 Tahun 1964

Tentang Pembentukan Daerah Tk. I Lampung dengan Mengubah UU No. 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. I Sumatera Selatan. Disahkan pada tanggal 13 Pebruari 1964. (LN No. 8 & TLN No. 2620)

uu : UU No. 14 Tahun 1964 tentang Penetapan PERPU Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang.

PERPU Nomor 4 Tahun 1964

Tentang Pembentukan Daerah Tk. II Dairi dengan Mengubah UU No. 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara. Disahkan pada tanggal 13 Pebruari 1964. (LN No. 9 & TLN No. 2621)

uu : UU No. 15 Tahun 1964 tentang Penetapan PERPU Nomor 4 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Utara menjad Undang-Undang.

PERATURAN PRESIDEN TAHUN 1964 YANG MENJADI UNDANG-UNDANG (UU Prps)

PERPRES Nomor 15 Tahun 1964 (UU No. 15 Prps Tahun 1964)

Tentang Penetapan Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pegawai Negeri. Disahkan pada tanggal 11 Mei 1964. (LN No. 46 & TLN No. 2648)

PERPRES Nomor 28 Tahun 1964 (UU No. 28 Prps Tahun 1964)

Tentang Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan Negara Irian Barat. Disahkan pada tanggal 31 Agustus 1964. (LN No. 79)

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 1965

UNDANG-UNDANG TAHUN 1965

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965

tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan Mengubah UU No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan UU No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Jogjakarta. Disahkan pada tanggal 6 Pebruari 1965. (LN No. 19 dan TLN No. 2730)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965

tentang Pembentukan Kotapraja Palangkaraya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan UU Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan. Disahkan pada tanggal 14 Juni 1965. (LN No. 48 & TLN No. 2753)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah. Disahkan pada tanggal 14 Juni 1965. (LN No. 49 & TLN No. 2754)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah. Disahkan pada tanggal 14 Juni 1965. (LN No. 50 & TLN No. 2755)

i : UU No. 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

i : UU No. 55 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Landak.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan. Disahkan pada tanggal 14 Juni 1965. (LN No. 51 & TLN No. 2756)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah. Disahkan pada tanggal 14 Juni 1965. (LN No. 52 & TLN No. 2757)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965

Tentang Pembentukan Kotapradja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara. Disahkan pada tanggal 14 Juni 1965. (LN No. 53 & TLN No. 2758)

i : UU No. 37 Tahun 2000 Tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965

Tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Mahkamah Agung. Disahkan Pada Tanggal 6 Juli 1965. (LN No. 70 & TLN No. 2767)

tbl : UU No. 6 Tahun 1969 Tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang Dan PERPU.

tbl : UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

tbl : UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965

Tentang Pencabutan UU No. 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal asing yang telah Diubah dan Ditambah dengan UU No. 15 Prp Tahun 1960. Disahkan Pada Tanggal 23 Agustus 1965. (LN No. 78 & TLN No. 2775)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965

Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Disahkan Pada Tanggal 1 September 1965. (LN No. 83 & TLN No. 2778)

i : UU No. 4 tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara.

c : UU No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965

Tentang Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di seluruh Wilayah Republik Indonesia. Disahkan Pada Tanggal 1 September 1965. (LN No. 84 & TLN No. 2779)

c : UU No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa.

PERATURAN PRESIDEN TAHUN 1965
YANG MENJADI UNDANG-UNDANG
(UU Prps)

PERPRES No. 5 Tahun 1965 (UU No. 5 Prps Tahun 1965

Tentang Gerakan Nasional Transmigrasi. Disahkan pada tanggal 10 Mei 1965. (LN No. 33)

t : UU No. 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Transmigrasi.

c : UU No. 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Transmigrasi.

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 1967

UNDANG-UNDANG TAHUN 1967

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967.

tentang Penanaman Modal Asing. Disahkan pada tanggal 10 Januari 1967. (LN No. 1 & TLN No. 2818)

i : UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

u : UU No. 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan UU No. 1 Tahun 1967 tentang penanaman Modal Asing.

i : PMDN No. 5 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Penyediaan Dan Pemberian Tanah Untuk Keperluan Perusahaan.

i : KEPPRES Nomor 23 Tahun 1980 Tentang Pemanfaatan Tanah Hak Guna Usaha Dan Hak Guna Bangunan Untuk Usaha Patungan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing.

Pasal 15 ke 4 dan ke 5 dan Pasal 16

c : UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

i : PMDN No. 3 Tahun 1984 Tentang Tata Cara Penyediaan Tanah Dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Izin Bangunan Serta Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan-Perusahaan Yang Mengadakan Penanaman Modal Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968.

i : PMDN No. 12 Tahun 1984 Tentang Penyempurnaan PMDN No. 3 Tahun 1984 Tentang Tata Cara Penyediaan Tanah Dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Izin Bangunan Serta Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan-Perusahaan Yang Mengadakan Penanaman Modal Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968.

i : KEPPRES Nomor 53 Tahun 1989 Tentang Kawasan Industri.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 Tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1993 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Dalam Kawasan-Kawasan Tertentu di Propinsi Riau.

i : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Pemberian Perpanjangan Dan Pembaharuan Hak Guna Bangunan Dalam Kawasan-Kawasan Tertentu Di Propinsi Riau.

i : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi Dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal.

i : KEPPRES Nomor 41 Tahun 1996 Tentang Kawasan Industri.

i : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Usaha Perikanan.

c : UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

tbl : UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967.

tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan. Disahkan pada tanggal 24 Mei 1967. (LN No. 8 & TLN No. 2823)

i : KEPPRES Nomor 48 Tahun 1983 tentang Penanganan Khusus Penataan Ruang dan Penertiban serta Pengendalian Pembangunan pada Kawasan Pariwisata Puncak dan Wilayah Jalur Jalan Jakarta-Bogor-Puncak-Cianjur di luar wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Kotamadya Bogor, Kota Administratif Depok, Kota Madya Cianjur, dan Kota Cibinong.

i : KEPPRES Nomor 3 Tahun 1985 Tentang Pembangunan Taman Wisata Curug Dago Sebagai Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda.

i : KEPPRES Nomor 77 Tahun 1985 Tentang Pengenaan, Pemungutan Dan Pembagian Iuran Hasil Hutan.

i : KEPPRES Nomor 35 Tahun 1986 Tentang Pembangunan Kebun Raya Setia Mulya Sebagai Taman Hutan Raya Dr. Mohammad Hatta.

i : PMDN No. 1 Tahun 1986 Tentang Tatacara Penyediaan Lahan Dan Pemberian Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pengembangan Perkebunan Dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat Yang Dikaitkan Dengan Program Transmigrasi.

i : KEPPRES Nomor 48 Tahun 1988 Tentang Pembangunan Kelompok Hutan Sibolangit Sebagai Taman Hutan Raya Bukit Barisan.

i : KEPPRES Nomor 52 Tahun 1989 Tentang Pembangunan Kelompok Hutan Riam Kanan Sebagai Taman Hutan Raya Sultan Adam.

i : UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 Tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri.

i : KEPPRES Nomor 33 Tahun 1990 Tentang Penggunaan Tanah Bagi Pembangunan Kawasan Industri.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

i : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

t : UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

tbl : UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967.

tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan. Disahkan pada tanggal 8 Juli 1967. (LN No. 10 dan TLN No. 2824)

i : Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

c : UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967

Tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu. Disahkan pada tanggal 12 September 1967. (LN No. 19 & TLN No. 2828)

i : UU No. 3 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, Dan Kabupaten Kaur Di Provinsi Bengkulu.

i : UU No. 39 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Lebong Dan Kabupaten Kepahiang Di Provinsi Bengkulu.

i : UU No. 24 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah Di Provinsi Bengkulu.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967

Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Disahkan Pada Tanggal 2 Desember 1967. (LN No. 22 & TLN No. 2831)

i : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

i : KEPPRES Nomor 33 Tahun 2002 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut.

c : UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967

Tentang Pokok-pokok Perkoperasian. Disahkan pada tanggal 18 Desember 1967. (LN No. 23 & TLN No. 2832)

t : UU No. 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Transmigrasi.

c : UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 1968

UNDANG-UNDANG TAHUN 1968

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968

Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah UU No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat. Disahkan pada tanggal 29 Juni 1968. (LN No. 31 & TLN No. 2851)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968.

tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Disahkan pada tanggal 3 Juli 1968. (LN No. 33 & TLN No. 2853)

Pasal 11, 12, 13, 15, 17

u : UU No. 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

Pasal 10

tmb : UU No. 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

i : UU No. 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

t : PMDN No. 5 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Penyediaan Dan Pemberian Tanah Untuk Keperluan Perusahaan

i : PMDN No. 5 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Penyediaan Dan Pemberian Tanah Untuk Keperluan Perusahaan

Pasal 9, 12 ke 4 dan ke 5, 13,14

c : UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

i : PMDN No. 3 Tahun 1984 Tentang Tata Cara Penyediaan Tanah Dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Izin Bangunan Serta Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan-Perusahaan Yang Mengadakan Penanaman Modal Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968.

i : PMDN No. 12 Tahun 1984 Tentang Penyempurnaan PMDN No. 3 Tahun 1984 Tentang Tata Cara Penyediaan Tanah Dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Izin Bangunan Serta Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan-Perusahaan Yang Mengadakan Penanaman Modal Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968.

i : KEPPRES Nomor 53 Tahun 1989 Tentang Kawasan Industri.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 Tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan.

i : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Pemberian Perpanjangan Dan Pembaharuan Hak Guna Bangunan Dalam Kawasan-Kawasan Tertentu Di Propinsi Riau.

i : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi Dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal.

i : KEPPRES Nomor 41 Tahun 1996 Tentang Kawasan Industri.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Usaha Perikanan.

c : UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

tbl : UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968

Tentang Perubahan Pasal 7 "Indische Comptabilitetswet" (Stbl. 1925 Nomor 448) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No.3 Drt. 1954 (LN No. 6). Disahkan pada tanggal 25 Oktober 1968. (LN No. 53 & TLN No. 2860)

i : UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

tbl : UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

tbl : UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1968

Tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Penetapan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia. Disahkam pada tanggal 31 Desember 1968. (LN No. 79 & TLN No. 2879)

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 1969

UNDANG-UNDANG TAHUN 1969

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969

Tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang. Disahkan pada tanggal 5 Juli 1969. (LN No. 36 & TLN No. 2900).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969

Tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan PERPU. Disahkan pada tanggal 5 Juli 1969. (LN No. 37 & TLN No. 2901)

i : UU No. 4 tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1969

Tentang Penetapan Berbagai PERPU Menjadi Undang-Undang. Disahkan pada tanggal 5 Juli 1969. (LN No. 38 & TLN No. 2902)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969

Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang. Disahkan pada tanggal 1 Agustus 1969 (LN No. 40 & TLN No. 2904)

c : UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969

Tentang Pembentukan Propinsi Daerah Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten di Propinsi Irian Barat. Disahkan pada tanggal 10 September 1969. (LN No. 47 & TLN No. 2907)

i : UU No. 6 Tahun 1993 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura.

i : Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, Dan Kota Sorong.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2000 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Jayapura Dari Kota Jayapura Ke Wilayah Sentani Di Kabupaten Jayapura.

i : UU No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

i : UU No. 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondama Di Provinsi Papua.

i : UU No. 35 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Supiori Di Provinsi Papua.

i : UU No. 19 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Raya Di Provinsi Papua.

i : UU No. 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Tengah Di Provinsi Papua.

i : UU No. 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Yalimo Di Provinsi Papua.

i : UU No. 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya Di Provinsi Papua.

i : UU No. 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Nduga Di Provinsi Papua.

i : UU No. 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Puncak Di Provinsi Papua.

i : UU No. 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Dogiyai Di Provinsi Papua.

i : UU No. 54 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya Di Provinsi Papua.

i : UU No. 55 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Deiyai Di Provinsi Papua.

i : UU No. 56 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Yapen Waropen Menjadi Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Yapen Waropen Menjadi Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua.

i : UU No. 13 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat Di Provinsi Papua Barat.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969

tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Disahkan pada tanggal 17 Desember 1969 (LN No. 59 & TLN No. 2915).

i : UU No. 4 tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara

u : UU No. 5 Tahun 1975 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

u : UU No. 2 Tahun 1985 Tentang: Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawartan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975.

i : UU No. 7 Tahun 1990 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung.

i : UU No. 6 Tahun 1991 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat.

i : UU No. 1 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar.

i : UU No. 6 Tahun 1993 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura.

i : UU No. 4 Tahun 1994 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu.

i : UU No. 6 Tahun 1995 Tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Kendari.

i : UU No. 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.

i : UU No. 2 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus.

i : UU No. 12 Tahun 1998 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal.

c : UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

PERPU Nomor 1 Tahun 1969

Tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara. Disahkan pada tanggal 7 April 1969. (LN No. 16 & TLN No. 2890)

uu : UU No. 9 Tahun 1969 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang.

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 1970

UNDANG-UNDANG TAHUN 1970

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1970.

tentang Penghapusan Pengadilan Landreform. Disahkan pada tanggal 31 Juli 1970 (LN No. 41 & TLN No. 2939)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970.

tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Disahkan pada tanggal 7 Agustus 1970 (LN No. 46 & TLN No. 2943).

c : UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

tbl : UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970.

tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Disahkan pada tanggal 7 Agustus 1970 (LN No. 47 & TLN No. 2944).

i : PMDN No. 3 Tahun 1984 Tentang Tata Cara Penyediaan Tanah Dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Izin Bangunan Serta Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan-Perusahaan Yang Mengadakan Penanaman Modal Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968.

i : PMDN No. 12 Tahun 1984 Tentang Penyempurnaan PMDN No. 3 Tahun 1984 Tentang Tata Cara Penyediaan Tanah Dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Izin Bangunan Serta Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan-Perusahaan Yang Mengadakan Penanaman Modal Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968.

i : KEPPRES Nomor 53 Tahun 1989 Tentang Kawasan Industri.
i : Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 Tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri.
i : Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan.
i : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Pemberian Perpanjangan Dan Pembaharuan Hak Guna Bangunan Dalam Kawasan-Kawasan Tertentu Di Propinsi Riau.
i : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi Dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal.
i : KEPPRES Nomor 41 Tahun 1996 Tentang Kawasan Industri.
c : UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
tbl : UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970

tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Disahkan Pada tanggal 17 Desember 1970 (LN No. 74 & TLN No. 2951).

t : UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
i : UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
t : UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
i : UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
u : UU No. 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
i : UU No. 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
i : UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
t : UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
tbl : UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman .

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 1971

UNDANG-UNDANG TAHUN 1971

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971

Tentang Pemberantasan Tindak Korupsi. Disahkan pada tanggal 29 Maret 1971 (LN No. 16 & TLN No. 2957).

t : UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

tbl : UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971

Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan. Disahkan pada tanggal 18 Mei 1971 (LN No. 32 & TLN No. 2964).

t : UU No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan.

c : UU No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan.

tbl : UU No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971

Tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan gas Bumi Negara. Disahkan pada tanggal 15 September 1971 (LN No. 76 & TLN No. 2971).

t : UU No. 10 Tahun 1974 tentang Perubahan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971.

u : UU No. 10 Tahun 1974 tentang Perubahan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971.

t : UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

tbl : UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 1972

UNDANG-UNDANG TAHUN 1972

Undang-Undang No. 3 Tahun 1972

tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Transmigrasi. Disahkan pada tanggal 28 Juli 1972 (LN No. 33 & TLN No. 2988)

i : KEPPRES Nomor 29 Tahun 1974 Tentang Pembentukan Badan Pengembangan Pembangunan Daerah Transmigrasi.

t : KEPPRES Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Kesempatan Bagi Penduduk Setempat Berpindah Ke Dalam Proyek Transmigrasi.

i : KEPPRES Nomor 26 Tahun 1978 Tentang Badan Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi.

i : PMDN No. 1 Tahun 1986 Tentang Tatacara Penyediaan Lahan Dan Pemberian Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pengembangan Perkebunan Dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat Yang Dikaitkan Dengan Program Transmigrasi.

i : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21/KBPN/1989 Tentang Perubahan Hak Pakai Menjadi Hak Milik Atas Tanah-Tanah Yang Telah Diberikan Kepada Para Transmigran.

t : UU No. 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian.

tbl : UU No. 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian.

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 1973

UNDANG-UNDANG TAHUN 1973

Undang-Undang 1 Tahun 1973

Tentang Landas Kontonen Indonesia. Disahkan Pada Tanggal 6 Januari 1973 (LN No. 1 & TLN No. 2994).

Undang-Undang 5 Tahun 1973

Tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Disahkan Pada Tanggal 16 Juli 1973 (LN No. 39 & TLN No. 3010).

t : UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

c : UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

tbl : UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Undang-Undang 6 Tahun 1973

Tentang Perjanjian Antara Indonesia Dan Australia Mengenai Garis-Garis Batas Tertentu Antara Indonesia Dan Papua New Guinea. Disahkan Pada Tanggal 8 Desember 1973 (LN No. 58 & TLN No.3017).

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 1974

UNDANG-UNDANG TAHUN 1974

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974

Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara. Disahkan pada tanggal 4 Juni 1974 (LN No. 32 dan TLN No. 3034).

i : UU No. 4 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Dan Kabupaten Aceh Tamiang, Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.

tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Disahkan pada tanggal 23 Juli 1974 (LN No. 38 & TLN No. 3037).

i : PMDN No. 15 Tahun 1974 Tentang Pedoman Tindak Lanjut Pelaksanaan Landrefom.

i : PMDN No. 1 Tahun 1975 Tentang Pedoman Mengenai Penetapan Uang Pemasukan, Uang Wajib Tahunan Dan Biaya Administrasi Yang Bersangkutan Dengan Pemberian Hak-Hak Atas Tanah Negara.

i : KEPPRES Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Kesempatan Bagi Penduduk Setempat Berpindah Ke Dalam Proyek Transmigrasi.

i : KEPPRES Nomor 26 Tahun 1978 Tentang Badan Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi.

i : UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

i : PMDN No. 3 Tahun 1979 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohonan Dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.

i : Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.

i : KEPPRES Nomor 55 Tahun 1980 Tentang Organisasi Dan Tatakerja Penyelenggaraan Landreform.

i : KEPPRES Nomor 20 Tahun 1981 Tentang Koordinasi Pengendalian Dan Pengawasan Pembangunan Di Daerah.

i : KEPPRES Nomor 23 Tahun 1982 Tentang Pengembangan Budidaya Laut Di Perairan Indonesia.

i : KMDN No. 37 Tahun 1981 Tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform Sebagai Dimaksud Dalam KEPPRES Nomor 55 Tahun 1980.

i : KMDN No. 38 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan KEPPRES No. 55 Tahun 1980 Mengenai Perincian Tugas Dan Tata Kerja Pelaksanaan Landreform.

i : KMDN No. 222 Tahun 1981 Tentang Pembentukan Sub Direktorat Landreform Pada Direktorat Agraria Propinsi.

i : KMDN No. 268 Tahun 1982 Tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Penertiban/ Pemanfaatan Tanah Yang Dicadangkan Bagi Dan Atau Dikuasai Oleh Perusahaan-Perusahaan.

i : KMDN No. 277 Tahun 1982 Tentang Konsolidasi Tanah Perkotaan Di Lingkungan Karet, Karet Kuningan Dan Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi Wilayah Jakarta Selatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

i : KMDN No. 79 Tahun 1984 Tentang Pembentukan Sub Direktorat Landreform Pada Direktorat Agraria Propinsi Irian Jaya.

i : KEPPRES Nomor 48 Tahun 1983 tentang Penanganan Khusus Penataan Ruang dan Penertiban serta Pengendalian Pembangunan pada Kawasan Pariwisata Puncak dan Wilayah Jalur Jalan Jakarta-Bogor-Puncak-Cianjur di luar wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Bogor, Kota Administratif Depok, Kota Madya Cianjur, dan Kota Cibinong.

i : PMDN No. 3 Tahun 1984 Tentang Tata Cara Penyediaan Tanah Dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Izin Bangunan Serta Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan-Perusahaan Yang Mengadakan Penanaman Modal Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968.

i : KEPPRES Nomor 33 Tahun 1984 Tentang Pemberlakuan Sepenuhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

i : PMDN No. 12 Tahun 1984 Tentang Penyempurnaan PMDN No. 3 Tahun 1984 Tentang Tata Cara Penyediaan Tanah Dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Izin Bangunan Serta Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan-Perusahaan Yang Mengadakan Penanaman Modal Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968.

t : PMDN No. 02 Tahun 1985 Tentang Tata Cara Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Proyek Pembangunan Di Wilayah Kecamatan.

i : PMDN No. 02 Tahun 1985 Tentang Tata Cara Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Proyek Pembangunan Di Wilayah Kecamatan.

i : PMDN No. 3 Tahun 1985 Tentang Tatacara Pensertipikatan Tanah Bagi Program Dan Proyek Departemen Pertanian.

i : PMDN No. 1 Tahun 1986 Tentang Tatacara Penyediaan Lahan Dan Pemberian Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pengembangan Perkebunan Dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat Yang Dikaitkan Dengan Program Transmigrasi.

i : PMDN No. 7 Tahun 1986 Tentang Penetapan Batas Wilayah Kota Di Seluruh Indonesia.

i : PMDN No. 1 Tahun 1987 Tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum Dan Fasilitas Sosial Perumahan Kepada Pemerintah Daerah.

i : PMDN No. 2 Tahun 1987 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota.

i : PMDN No. 3 Tahun 1987 Tentang Penyediaan Dan Pemberian Hak Atas Tanah Untuk Keperluan Perusahaan Pembangunan Perumahan.

i : KEPPRES Nomor 26 Tahun 1988 Tentang Badan Pertanahan Nasional.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1989 Tentang Pembentukan Kota Administratip Bontang.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1989 Tentang Pembentukan Kota Administratip Bontang.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 Tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 Tentang Jalan Tol

i : Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 Tentang Pengendalian Pencemaran Air.

t : UU No. 7 Tahun 1990 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung.

i : UU No. 7 Tahun 1990 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung.

i : Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Peremajaan Pemukiman Kumuh Yang Berada Di Atas Tanah Negara.

t : Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1990 Tentang Pembentukan Kecamatan Kelapa Gading Dan Pademangan Di Wilayah Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Palmerah, Kalideres Dan Kembangan Di Wilayah Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Duren Sawit, Makasar, Cipayung Dan Ciracas Di Wilayah Kotamadya Jakarta Timur, Kecamatan Johar Baru Di Wilayah Kotamadya Jakarta Pusat, Kecamatan Pancoran, Jagakarsa Dan Pesanggrahan Di Wilayah Kotamadya Jakarta Selatan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

i : Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1990 Tentang Pembentukan Kecamatan Kelapa Gading Dan Pademangan Di Wilayah Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Palmerah, Kalideres Dan Kembangan Di Wilayah Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Duren Sawit, Makasar,

Cipayung Dan Ciracas Di Wilayah Kotamadya Jakarta Timur, Kecamatan Johar Baru Di Wilayah Kotamadya Jakarta Pusat, Kecamatan Pancoran, Jagakarsa Dan Pesanggrahan Di Wilayah Kotamadya Jakarta Selatan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa.

t : UU No. 6 Tahun 1991 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat.

i : UU No. 6 Tahun 1991 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 Tentang Konsolidasi Tanah.

t : UU No. 1 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar.

i : UU No. 1 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar.

i : PMDN No. 3 Tahun 1992 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Rumah Susun.

i : KEPPRES Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

i : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi Dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal.

i : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 Tentang Ketentuan Pelaksanaan KEPPRES Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

i : KEPPRES Nomor 41 Tahun 1996 Tentang Kawasan Industri.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

t : UU No. 6 Tahun 1993 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura.

i : UU No. 6 Tahun 1993 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura.

t : UU No. 4 Tahun 1994 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu.

i : UU No. 4 Tahun 1994 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu.

t : UU No. 6 Tahun 1995 Tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Kendari.

i : UU No. 6 Tahun 1995 Tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Kendari.

t : UU No. 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang

i : UU No. 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang

t : UU No. 2 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus.

i : UU No. 2 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus.

t : UU No. 12 Tahun 1998 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal.

i : UU No. 12 Tahun 1998 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat Ii Toba Samosir Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal.

i : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi.

t : UU No. 9 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru.

i : UU No. 9 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru.

t : UU No. 10 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang.

i : UU No. 10 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang.

t : UU No. 11 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate.

i : UU No. 11 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate.

t : UU No. 12 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, Dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro.

i : UU No. 12 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, Dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro.

t : UU No. 13 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara.

i : UU No. 13 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara.

t : UU No. 14 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil.

i : UU No. 14 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil.

t : UU No. 15 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok Dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon.

i : UU No. 15 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok Dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon.

tbl : UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974.

tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Disahkan pada tanggal 6 Nopember 1974 (LN No 55 & TLN No. 3041).

i : KEPPRES Nomor 67 Tahun 1980 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian.

i : KEPPRES Nomor 71 Tahun 1998 tentang Perubahan atas KEPPRES Nomor 67 Tahun 1980.

i : UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

u : UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

i : UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Loket Pelayanan Pertanahan.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelesaian Kerugian Negara Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Penghargaan Di Bidang Pertanahan.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974

tentang Pengairan. Disahkan pada tanggal 26 Desember 1974 (LN No. 65 & TLN No. 3046).

i : KEPPRES Nomor 48 Tahun 1983 tentang Penanganan Khusus Penataan Ruang dan Penertiban serta Pengendalian Pembangunan pada Kawasan Pariwisata Puncak dan Wilayah Jalur Jalan Jakarta-Bogor-Puncak-Cianjur di luar wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Bogor, Kota Administratif Depok, Kota Madya Cianjur, dan Kota Cibinong.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 Tentang Pengendalian Pencemaran Air.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 Tentang Irigasi.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air.

t : UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

tbl : UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 1975

UNDANG-UNDANG TAHUN 1975

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975

Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Disahkan pada tanggal 24 September 1975 (LN No. 39 & TLN No. 3064)

u : UU No. 2 Tahun 1985 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawartan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975.

i : UU No. 7 Tahun 1990 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung.

i : UU No. 6 Tahun 1991 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat.

i : UU No. 6 Tahun 1993 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura.

i : UU No. 4 Tahun 1994 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu.

i : UU No. 6 Tahun 1995 Tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Kendari.

tbl : UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 1979

UNDANG-UNDANG TAHUN 1979

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979.

tentang Pemerintahan Desa. Disahkan pada tanggal 1 Desember 1979. (LN No. 56 & TLN No. 3153)

i : KEPPRES Nomor 54 Tahun 1980 Tentang Kebijaksanaan Mengenai Pencetakan Sawah.

i : KEPPRES Nomor 55 Tahun 1980 Tentang Organisasi Dan Tatakerja Penyelenggaraan Landreform.

i : Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.

i : KMDN No. 37 Tahun 1981 Tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform Sebagai Dimaksud Dalam KEPPRES Nomor 55 Tahun 1980.

i : KEPPRES Nomor 48 Tahun 1983 tentang Penanganan Khusus Penataan Ruang dan Penertiban serta Pengendalian Pembangunan pada Kawasan Pariwisata Puncak dan Wilayah Jalur Jalan Jakarta-Bogor-Puncak-Cianjur di luar wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Bogor, Kota Administratif Depok, Kota Madya Cianjur, dan Kota Cibinong.

i : PMDN No. 7 Tahun 1986 Tentang Penetapan Batas Wilayah Kota Di Seluruh Indonesia.

i : PMDN No. 1 Tahun 1987 Tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum Dan Fasilitas Sosial Perumahan Kepada Pemerintah Daerah.

i : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Penyelengaraan Pendaftaran Tanah Sistematik Di Daerah Uji Coba.

i : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1995 Tentang Penyelengaraan Pendaftaran Tanah Secara Sistematik.

tbl : UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 1980

UNDANG-UNDANG TAHUN 1980

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980

tentang Jalan. Disahkan pada tanggal 27 Desember 1980 (LN No. 83 & TLN No. 3186).

i : KEPPRES Nomor 48 Tahun 1983 tentang Penanganan Khusus Penataan Ruang dan Penertiban serta Pengendalian Pembangunan pada Kawasan Pariwisata Puncak dan Wilayah Jalur Jalan Jakarta-Bogor-Puncak-Cianjur di luar wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Bogor, Kota Administratif Depok, Kota Madya Cianjur, dan Kota Cibinong.

i : PMDN No. 2 Tahun 1987 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 Tentang Jalan Tol

i : Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 Tentang Jalan Tol

i : Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 Tentang Jalan Tol.

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 1982

UNDANG-UNDANG TAHUN 1982

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982.

tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Disahkan pada tanggal 11 Maret 1982 (LN No. 12 & TLN No. 3215).

i : KEPPRES Nomor 23 Tahun 1982 Tentang Pengembangan Budidaya Laut Di Perairan Indonesia.

i : KEPPRES Nomor 48 Tahun 1983 tentang Penanganan Khusus Penataan Ruang dan Penertiban serta Pengendalian Pembangunan pada Kawasan Pariwisata Puncak dan Wilayah Jalur Jalan Jakarta-Bogor-Puncak-Cianjur di luar wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Bogor, Kota Administratif Depok, Kota Madya Cianjur, dan Kota Cibinong.

i : PMDN No. 3 Tahun 1984 Tentang Tata Cara Penyediaan Tanah Dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Izin Bangunan Serta Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan-Perusahaan Yang Mengadakan Penanaman Modal Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968.

i : PMDN No. 12 Tahun 1984 Tentang Penyempurnaan PMDN No. 3 Tahun 1984 Tentang Tata Cara Penyediaan Tanah Dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Izin Bangunan Serta Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan-Perusahaan Yang Mengadakan Penanaman Modal Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968.

i : KEPPRES Nomor 3 Tahun 1985 Tentang Pembangunan Taman Wisata Curug Dago Sebagai Taman Hutan Raya Ir.H.Djuanda.

i : KEPPRES Nomor 35 Tahun 1986 Tentang Pembangunan Kebun Raya Setia Mulya Sebagai Taman Hutan Raya Dr. Mohammad Hatta.

i : PMDN No. 1 Tahun 1987 Tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum Dan Fasilitas Sosial Perumahan Kepada Pemerintah Daerah.

i : PMDN No. 3 Tahun 1987 Tentang Penyediaan Dan Pemberian Hak Atas Tanah Untuk Keperluan Perusahaan Pembangunan Perumahan.

i : KEPPRES Nomor 48 Tahun 1988 Tentang Pembangunan Kelompok Hutan Sibolangit Sebagai Taman Hutan Raya Bukit Barisan.

i : KEPPRES Nomor 52 Tahun 1989 Tentang Pembangunan Kelompok Hutan Riam Kanan Sebagai Taman Hutan Raya Sultan Adam.

i : KEPPRES Nomor 53 Tahun 1989 Tentang Kawasan Industri.

i : KEPPRES Nomor 57 Tahun 1989 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun1990 Tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 Tentang Pengendalian Pencemaran Air.

i : KEPPRES Nomor 33 Tahun 1990 Tentang Penggunaan Tanah Bagi Pembangunan Kawasan Industri.

i : Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Peremajaan Pemukiman Kumuh Yang Berada Di Atas Tanah Negara.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa.

i : KEPPRES Nomor 41 Tahun 1996 Tentang Kawasan Industri.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

tbl : UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 1983

UNDANG-UNDANG TAHUN 1983

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983.

tentang Zona Eksklusif Indonesia. Disahkan pada 18 Oktober 1983 (LN No. 44 & TLN No. 3260).

i : Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Usaha Perikanan.

Pasal 16 ayat 1

c : UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

tbl : UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983

Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Disahkan pada tanggal 31 Desember 1983 (LN No. 49 & TLN No. 3262)

u : UU No. 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Disahkan pada tanggal 9 Nopember 1994.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perlakuan Perpajakan Di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu. Disahkan pada tanggal 7 April 2000.

u : UU No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Disahkan pada tanggal 2 Agustus 2000.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 147 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perlakuan Perpajakan Di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu. Disahkan pada tanggal 23 Desember 2000.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah. Disahkan pada tanggal 13 September 2001.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan. Disahkan pada tanggal 23 Maret 2002.

u : UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Disahkan pada tanggal 17 Juli 2007.

u : Perpu No. 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983

tentang Pajak Penghasilan. Disahkan pada tanggal 31 Desember 1983 (LN No. 50 & TLN No. 3263).

u : UU No. 7 Tahun 1991 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

u : UU No. 10 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah iubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1991.

i : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing.

u : UU No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

u : UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

i : Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 Tentang perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan.

u : UU No. 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perlakuan Perpajakan Di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 130 Tahun 2000 Tentang Pengecualian Sebagai Objek Pajak Atas Keuntungan Karena Pembebasan Utang Debitur Kecil.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 130 Tahun 2000 Tentang Pengecualian Sebagai Objek Pajak Atas Keuntungan Karena Pembebasan Utang Debitur Kecil.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 147 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perlakuan Perpajakan Di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 147 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perlakuan Perpajakan Di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983

tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Disahkan pada tanggal 31 Desember 1983 (LN No. 51 & TLN No. 3264).

u : UU No. 11 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Disahkan pada tanggal 9 Nopember 1994.

u : UU No. 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Disahkan pada tanggal 2 Agustus 2000.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perlakuan Perpajakan Di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu.

u : UU No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai

Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Disahkan pada tanggal 15 Oktober 2009.

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 1984

UNDANG-UNDANG TAHUN 1984

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984

tentang Perindustrian. Disahkan pada tanggal 29 Juni 1984 (LN No. 22 & TLN No. 3274)

i : KEPPRES Nomor 53 Tahun 1989 Tentang Kawasan Industri.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 Tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri.

i : KEPPRES Nomor 41 Tahun 1996 Tentang Kawasan Industri.

Pasal 16

c : UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pupuk Budidaya Tanaman.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Kawasan Industri.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Kawasan Industri.

i : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1997 Tentang Perolehan Izin Lokasi Dan Hak Guna Bangunan Bagi Perusahaan Kawasan Industri Dan Perusahaan Industri.

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 1985

UNDANG-UNDANG TAHUN 1985

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawartan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975. Disahkan pada tanggal 7 Januari 1985 (LN No. 2 & TLN No. 3282).

i : UU No. 7 Tahun 1990 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung.

i : UU No. 6 Tahun 1991 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat.

i : UU No. 6 Tahun 1993 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura.

i : UU No. 4 Tahun 1994 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu.

i : UU No. 5 Tahun 1995 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawartan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985.

i : UU No. 6 Tahun 1995 Tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Kendari.

c : UU No. 4 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawartan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985

tentang Perikanan. Disahkan pada tanggal 19 Juni 1985 (LN No. 46 & TLN No. 3299).

i : UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 Tentang Pengendalian Pencemaran Air.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

i : KEPPRES Nomor 33 Tahun 2002 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Usaha Perikanan.

t : UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

c : UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

tbl : UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985

Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan. Disahkan Pada Tanggal 27 Desember 1985 (LN No. 68 & TLN No. 3312).

u : UU No. 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan.

i : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2000 Tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak Untuk Perhitungan Pajak Bumi Dan Bangunan.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak Untuk Penghitungan Pajak Bumi Dan Bangunan.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak Untuk Penghitungan Pajak Bumi Dan Bangunan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Tentang Mahkamah Agung. Disahkan pada tanggal 30 Desember 1985 (LN No.73 & TLN No. 3316).

i : UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

u : UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

u : UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

u : UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

i : UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

i : UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985

tentang Rumah Susun. Disahkan pada tanggal 31 Desember 1985. (LN No. 75 & TLN No. 3318)

i : PMDN No. 1 Tahun 1987 Tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum Dan Fasilitas Sosial Perumahan Kepada Pemerintah Daerah.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Bentuk Dan Tatacara Pengisian Serta Pendaftaran Akta Pemisahan Rumah Susun.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1989 Tentang Tata Cara Pembuatan Surat Ukur Diluar Desa Lengkap.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1989 Tentang Bentuk Dan Tata Cara Pembuatan Buku Tanah Serta Penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

i : Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Peremajaan Pemukiman Kumuh Yang Berada Di Atas Tanah Negara.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Biaya Pendaftaran Tanah.

i : PMDN No. 3 Tahun 1992 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Rumah Susun.

i : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 Tentang Ketentuan Pelaksanaan KEPPRES Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

i : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi Dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai.

i : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1996 Tentang Bentuk Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, Akta Pemberian Hak Tanggungan, Buku Tanah Hak Tanggungan, Dan Sertipikat Hak Tanggungan.

i : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Untuk Menjamin Pelunasan Kredit-Kredit Tertentu.

i : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Pendaftaran Hak Tanggungan.

i : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing.

i : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan.

i : KEPPRES Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun Di Kawasan Perkotaan.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

i : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penetapan Formasi Pejabat Pembuat Akta Tanah.

c : UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.

tbl : UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985

tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa tentang Hukum Laut). Disahkan Pada Tanggal 31 Desember 1985. (LN No. 76 & TLN No. 3319).

i : UU No. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia.

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 1986

UNDANG-UNDANG TAHUN 1986

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986

Tentang Peradilan Umum. Disahkan pada tanggal 7 Maret 1986 (LN No. 20 & TLN No. 3327).

u : UU No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun tentang Peradilan Umum.

u : UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Disahkan Pada tanggal 29 Desember 1986 (LN No. 77 & TLN No. 3344).

u : UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

t : UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

i : UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

u : UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 1987

UNDANG-UNDANG TAHUN 1987

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987

tentang Protokol. Disahkan pada tanggal 28 September 1987 (LN No. 43 & TLN No. 3363).

t : UU No. 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan.

c : UU No. 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan.

tbl : UU No. 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan.

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 1990

UNDANG-UNDANG TAHUN 1990

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990

tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Disahkan pada tanggal 10 Agustus 1990 (LN No. 49 & TLN No. 3419).

i : Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 Tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota.

i : KEPPRES Nomor 33 Tahun 2002 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan.

i : Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 Tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur.

i : KEPPRES Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990

Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah. Disahkan pada tanggal 15 Agustus 1990 (LN No. 51 & TLN No. 3420).

i : UU No. 6 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, Dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

i : UU No. 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, Dan Kota Tidore Kepulauan Di Provinsi Maluku Utara.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990

Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung. Disahkan Pada Tanggal 15 Agustus 1990 (LN No. 52 & TLN No. 3421).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990

Tentang Kepariwisataan. Disahkan Pada Tanggal 18 Oktober 1990 (LN No. 78 & TLN No. 3427).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1990

tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia. Disahkan Pada Tanggal 14 Nopember 1990 (LN No. 14 & TLN No. 3430).

i : Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 1990 Tentang Pembentukan Kecamatan Kelapa Gading Dan Pademangan Di Wilayah Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Palmerah, Kalideres Dan Kembangan Di Wilayah Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Duren Sawit, Makasar, Cipayung Dan Ciracas Di Wilayah Kotamadya Jakarta Timur, Kecamatan Johar Baru Di Wilayah Kotamadya Jakarta Pusat, Kecamatan Pancoran, Jagakarsa Dan Pesanggrahan Di Wilayah Kotamadya Jakarta Selatan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

t : UU No. 34 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta.

tbl : UU No. 34 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 1991

UNDANG-UNDANG TAHUN 1991

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991

Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Disahkan Pada Tanggal 22 Juli 1991 (LN No. 59 & TLN No. 3451).

t : UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

c : UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

c : UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991

Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat Ii Lampung Barat. Disahkan Pada Tanggal 16 Agustus 1991 (LN NO.64 & TLN No. 3452).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Disahkan Pada Tanggal 30 Desember 1991 (LN No. 93 & TLN No. 3459).

u : UU No. 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1991.

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 1992

UNDANG-UNDANG TAHUN 1992

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992

Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar. Disahkan Pada Tanggal 15 Januari 1992 (LN No. 9 & TLN No. 3465).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992

tentang Perumahan dan Permukiman. Disahkan pada tanggal 10 Maret 1992 (LN No. 23 & TLN No. 3469).

t : Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah Oleh Bukan Pemilik.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah Oleh Bukan Pemilik.

i : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing.

i : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1997 Tentang Pemetaan Penggunaan Tanah Perdesaan, Penggunaan Tanah Perkotaan, Kemampuan Tanah Dan Penggunaan Simbol/Warna Untuk Penyajian Dalam Peta.

i : KEPPRES Nomor 63 Tahun 2000 Tentang Badan Kebijaksanaan Dan Pengendalian Pembangunan Perumahan Dan Permukiman Nasional.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota.

i : Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara.

c : UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

tbl : UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992

Tentang Benda Cagar Budaya. Disahkan pada tanggal 21 Maret 1992 (LN No. 27 & TLN No. 3470).

c : UU No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

tbl : UU No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992

tentang Perbankan. Disahkan pada tanggal 25 Maret 1992 (LN No. 31 & TLN No. 3472).

u : UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

i : UU No. 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

i : Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan.

i : Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Lembaga Penjaminan.

t : UU No. 7 Tahun 2009 Tentang Penetapan PERPU Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang.

i : UU No. 7 Tahun 2009 Tentang Penetapan PERPU Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992

tentang Keimigrasian. Disahkan pada tanggal 31 Maret 1992 (LN No. 33 & TLN No. 3474).

i : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing.

i : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 1996 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing.

u : Perpu No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.

c : UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

tbl : UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992

tentang Sistem BudidayaTanaman. Disahkan pada tanggal 30 April 1992 (LN No. 46 & TLN No. 3478).

i : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Pemanfaatan Tanah Kosong Untuk Tanaman Pangan.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 Tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pupuk Budidaya Tanaman.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pupuk Budidaya Tanaman.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 Tentang Irigasi.

i : KEPPRES Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992

tentang Perkeretaapian. Disahkan pada tanggal 11 Mei 1992 (LN No. 47 & TLN No. 3479).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Disahkan pada tanggal 12 Mei 1992 (LN No. 49 & TLN No. 3480).

i : Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 Tentang Jalan Tol.

c : UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

tbl : UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992

tentang Penerbangan. Disahkan pada tanggal 25 Mei 1992 (LN No. 53 & TLN No. 3481).

i : Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 Tentang Kebandarudaraan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1992

tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 1992 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi Undang-Undang. Disahkan pada tanggal 17 September 1992 (LN No. 99 & TLN No. 3494).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992

tentang Penataan Ruang. Disahkan pada tanggal 13 Oktober 1992 (LN No. 115 & TLN No. 3501).

i : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 Tentang Ketentuan Pelaksanaan KEPPRES Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

i : KEPPRES Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

i : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi Dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai.

i : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1997 Tentang Pemetaan Penggunaan Tanah Perdesaan, Penggunaan Tanah Perkotaan, Kemampuan Tanah Dan Penggunaan Simbol/Warna Untuk Penyajian Dalam Peta.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

i : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Pemanfaatan Tanah Kosong Untuk Tanaman Pangan.

i : Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal.

i : UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

i : KEPPRES Nomor 114 Tahun 1999 Tentang Penataan Ruang Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur.

i : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi.

i : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 Tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa.

i : KEPPRES Nomor 62 Tahun 2000 Tentang Koordinasi Penataan Ruang Nasional.

i : UU No. 2 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe.

i : UU No. 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Langsa.

i : UU No. 4 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Padang Sidempuan.

i : UU No. 6 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Prabumulih.

i : UU No. 7 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau.

i : UU No. 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam.

i : UU No. 9 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Cimahi.

i : UU No. 10 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya.

i : UU No. 11 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Batu.

i : UU No. 12 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Singkawang.

i : UU No. 13 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Bau-Bau.

i : UU No. 4 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Dan Kabupaten Aceh Tamiang, Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

i : UU No. 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau,

Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Dan Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah.

i : UU No. 6 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin Di Provinsi Sumatera Selatan.

i : UU No. 7 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara Di Provinsi Kalimantan Timur.

i : UU No. 8 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud Di Provinsi Sulawesi Utara.

i : UU No. 9 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Rote-Ndao Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

i : UU No. 10 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah.

i : UU No. 11 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa Dan Kota Palopo Di Provinsi Sulawesi Selatan.

i : UU No. 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman Di Provinsi Sumatera Barat.

i : UU No. 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

i : UU No. 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondama Di Provinsi Papua.

i : UU No. 27 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Banjar Di Provinsi Jawa Barat.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota.

i : KEPPRES Nomor 33 Tahun 2002 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut.

i : UU No. 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, Dan Kota Tidore Kepulauan Di Provinsi Maluku Utara.

i : UU No. 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu Dan Kabupaten Balangan Di Provinsi Kalimantan Selatan.

i : UU No. 3 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, Dan Kabupaten Kaur Di Provinsi Bengkulu.

i : UU No. 3 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, Dan Kabupaten Kaur Di Provinsi Bengkulu.

i : UU No. 4 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara.

i : UU No. 5 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Dan Kabupaten Belitung Timur Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

i : UU No. 6 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango Dan Kabupaten Pohuwato Di Provinsi Gorontalo.

i : UU No. 7 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur Dan Kabupaten Mamuju Utara Di Provinsi Sulawesi Selatan.

i : UU No. 8 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

i : UU No. 9 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, Dan Kabupaten Humbang Hasundutan Di Provinsi Sumatera Utara.

i : UU No. 10 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan Dan Kota Tomohon Di Provinsi Sulawesi Utara.

i : UU No. 29 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, Dan Kabupaten Kolaka Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara.

i : UU No. 30 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat Di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

i : UU No. 31 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Lingga Di Provinsi Kepulauan Riau.

i : UU No. 32 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una Di Provinsi Sulawesi Tengah.

i : UU No. 33 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara Di Provinsi Sulawesi Utara.

i : UU No. 34 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Melawi Dan Kabupaten Sekadau Di Provinsi Kalimantan Barat.

i : UU No. 35 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Supiori Di Provinsi Papua.

i : UU No. 36 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Samosir Dan Kabupaten Serdang Bedagai Di Provinsi Sumatera Utara.

i : UU No. 37 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Dan Kabupaten Ogan Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan.

i : UU No. 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Dan Kabupaten Pasaman Barat Di Provinsi Sumatera Barat.

i : UU No. 39 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Lebong Dan Kabupaten Kepahiang Di Provinsi Bengkulu.

i : UU No. 40 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, Dan Kabupaten Kepulauan Aru Di Provinsi Maluku.

i : UU No. 41 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan.

i : Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

i : Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

c : UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

tbl : UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992

tentang Perkoperasian. Disahkan pada tanggal 21 Oktober 1992 (LN No. 116 & TLN No. 3502).

i : Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Lembaga Penjaminan.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Melalui Kegiatan Sertipikasi Hak Atas Tanah Untuk Peningkatan Akses Permodalan.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Melalui Kegiatan Sertipikasi Hak Atas Tanah Untuk Peningkatan Akses Permodalan.

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TAHUN 1992 (PERPU TAHUN 1992)

PERPU No. 1 Tahun 1992

Tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LN No. 75 & TLN No. 3486).

uu : UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 1993

UNDANG-UNDANG TAHUN 1993

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993

Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang. Disahkan pada Tanggal 27 Pebruari 1993 (LN No. 18 & TLN No. 3518).

i : UU No. 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Propinsi Banten.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993

tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram. Disahkan pada tanggal 26 Juli 1993 (LN No. 66 & TLN No. 3531).

i : Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2000 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Lombok Barat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993

Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura. Disahkan Pada Tanggal 2 Agustus 1993 (LN No. 68 & TLN No. 3533).

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 1994

UNDANG-UNDANG TAHUN 1994

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994

Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu. Disahkan Pada Tanggal 22 Juli 1994 (LN No. 38 & TLN No. 3548).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994

tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati). Disahkan pada tanggal 1 Agustus 1994 (LN No. 41 & TLN No. 3556).

i : Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 Tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994

tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim). Disahkan Pada Tanggal 1 Agustus 1994 (LN No. 41 & TLN No. 3556).

i : Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994

Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Disahkan pada tanggal 9 Nopember 1994 (LN No. 59 & TLN No. 3566).

t : UU No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

u : UU No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1991. Disahkan pada tanggal 9 Nopember 1994 (LN No. 60 & TLN No. 3567).

i : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perlakuan Perpajakan Di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Disahkan pada tanggal 9 Nopember 1994 (LN No. 61 & TLN No. 3568).

u : UU No. 18 tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan. Disahkan Pada Tanggal 9 Nopember 1994. (LN No. 62 & Tahun TLN No. 3569).

i : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2000 Tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak Untuk Perhitungan Pajak Bumi Dan Bangunan.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak Untuk Penghitungan Pajak Bumi Dan Bangunan.

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 1995

UNDANG-UNDANG TAHUN 1995

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995

Tentang Perseroan Terbatas. Disahkan pada tanggal 7 Maret 1995 (LN No.13 & TLN No. 3587).

i : Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 Tentang Kepelabuhanan.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 Tentang Kebandarudaraan.

i : Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan.

t : UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

c : UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

tbl : UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawartan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985. Disahkan pada tanggal 3 Juli 1995 (LN No. 36 & TLN No. 3600).

c : UU No. 4 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawartan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995

Tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Kendari. Disahkan Pada Tanggal 3 Agustus 1995 (LN No. 44 & TLN No. 3602).

i : Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari Menjadi Kabupaten Konawe.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995

Tentang Pasar Modal. Disahkan Pada Tanggal 10 Nopember 1995 (LN No. 64 & TLN No. 3608).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995

Tentang Usaha Kecil. Disahkan Pada Tanggal 26 Desember 1995 (LN No. 74 & TLN No. 3611).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995

Tentang Kepabeanan. Disahkan Pada Tanggal 30 Desember 1995 (LN No. 75 & TLN No. 3612).

i : UU No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

i : KEPPRES Nomor 33 Tahun 2002 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut.

i : KEPPRES Nomor 41 Tahun 1996 Tentang Kawasan Industri.

u : UU No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Karimun.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995

Tentang Cukai. Disahkan Pada Tanggal 30 Desember 1995 (LN No. 76 & TLN No. 3613).

i : Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Karimun.

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 1996

UNDANG-UNDANG TAHUN 1996

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996

tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah. Disahkan pada tanggal 9 April 1996 (LN No. 42 & TLN No. 3632).

i : Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai.

i : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1996 Tentang Bentuk Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, Akta Pemberian Hak Tanggungan, Buku Tanah Hak Tanggungan, Dan Sertipikat Hak Tanggungan.

t : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Untuk Menjamin Pelunasan Kredit-Kredit Tertentu.

i : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Untuk Menjamin Pelunasan Kredit-Kredit Tertentu.

t : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Pendaftaran Hak Tanggungan.

i : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Pendaftaran Hak Tanggungan.

i : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

i : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Perubahan Hak Guna Bangunan Atau Hak Pakai Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal Yang Dibebani Hak Tanggungan Menjadi Hak Milik.

i : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pendaftaran Perubahan Data Pendaftaran Tanah Yang Menyangkut Aset Dalam Restrukturisasi Dan Atau Kewajiban Dalam Restrukturisasi Yang Berupa Hak Atas Tanah Yang Sudah Bersertipikat Dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Melalui Kegiatan Sertipikasi Hak Atas Tanah Untuk Peningkatan Akses Permodalan.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Melalui Kegiatan Sertipikasi Hak Atas Tanah Untuk Peningkatan Akses Permodalan.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37

Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar.

i : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penetapan Formasi Pejabat Pembuat Akta Tanah.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996

tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang. Disahkan pada tanggal 11 April 1996 (LN No. 43 & TLN No. 3633).

t : Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Kupang Dari Wilayah Kota Kupang Ke Wilayah Oelamasi Kabupaten Kupang.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Kupang Dari Wilayah Kota Kupang Ke Wilayah Oelamasi Kabupaten Kupang.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996

Tentang Perairan Indonesia. Disahkan Pada Tanggal 8 Agustus 1996 (LN No. 73 & TLN No. 3647).

i : Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Usaha Perikanan.

i : KEPPRES Nomor 33 Tahun 2002 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 Tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996

tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi. Disahkan pada tanggal 16 Desember 1996 (LN No. 111 & TLN No. 3663).

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 1997

UNDANG-UNDANG TAHUN 1997

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997

Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus. Disahkan Pada Tanggal 3 Januari 1997 (LN No. 2 & TLN No. 3667).

i : UU No. 50 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat Di Provinsi Lampung.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997

Tentang Ketenaganukliran. Disahkan Pada Tanggal 10 April 1997 (LN No. 23 & TLN No. 3676).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997

Tentang Ketransmigrasian. Disahkan Pada Tanggal 9 Mei 1997 (LN No. 37 & TLN No. 3682).

t : UU No. 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian**.**

u : UU No. 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian**.**

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997

Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Disahkan pada tanggal 23 Mei 1997 (LN No.41 & TLN No. 3685).

u : UU No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah.

c : UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

tbl : UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997

Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Disahkan pada tanggal 23 Mei 1997 (LN No.42 & TLN No. 3686).

u : UU No. 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997

tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Disahkan Pada tanggal 23 Mei 1997 (LN No.43 & TLN No. 3687).

i : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Pedoman Penetapan Uang Pemasukan Dalam Pemberian Hak Atas Tanah Negara.

i : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Pedoman Penetapan Uang Pemasukan Dalam Pemberian Hak Atas Tanah Negara.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Dana Reboisasi.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Dana Reboisasi.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Usaha Perikanan.

i : KEPPRES Nomor 33 Tahun 2002 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Penyampaian Rencana Dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Penyampaian Rencana Dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 Tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 Tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997

Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Disahkan pada tanggal 29 Mei 1997 (LN No.44 & TLN No. 3688).

i : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Disahkan pata tanggal 1 Oktober 1997.

t : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Pedoman Penetapan Uang Pemasukan Dalam Pemberian Hak Atas Tanah Negara. Disahkan pata tanggal 22 juni 1998.

i : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Pedoman Penetapan Uang Pemasukan Dalam Pemberian Hak Atas Tanah Negara. Disahkan pata tanggal 22 juni 1998.

i : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Pedoman Penetapan Uang Pemasukan Dalam Pemberian Hak Atas Tanah Negara. Disahkan pata tanggal 21 Agustus 1998.

i : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan. Disahkan pata tanggal 24 Oktober 1999.

u : UU No. 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan. Disahkan pada tanggal 2 Agustus 2000.

t : UU No. 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan. Disahkan pada tanggal 2 Agustus 2000.

i : UU No. 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan. Disahkan pada tanggal 2 Agustus 2000.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2000 Tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Karena Waris Dan Hibah Wasiat.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2000 Tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Karena Waris Dan Hibah Wasiat.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2000 Tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Karena Pemberian Hak Pengelolaan.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2000 Tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Karena Pemberian Hak Pengelolaan.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2000 Tentang Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2000 Tentang Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Program

Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Melalui Kegiatan Sertipikasi Hak Atas Tanah Untuk Peningkatan Akses Permodalan.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Melalui Kegiatan Sertipikasi Hak Atas Tanah Untuk Peningkatan Akses Permodalan.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997

Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Disahkan pada tanggal 19 September 1997 (LN No. 68 & TLN No. 3699).

i : Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

i : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Pemanfaatan Tanah Kosong Untuk Tanaman Pangan.

i : UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

t : Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pupuk Budidaya Tanaman.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 Tentang Irigasi.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota.

i : KEPPRES Nomor 33 Tahun 2002 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan.

t : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

i : KEPPRES Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 Tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 Tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 Tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 Tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997

Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan. Disahkan pada tanggal 8 Oktober 1997 (LN No. 82 & TLN No. 3711).

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TAHUN 1997 (PERPU)

PERPU No. 1 Tahun 1997

Tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Disahkan pada tanggal 31 Desember 1997 (LN No. 98 & TLN No. 3723).

uu : UU No. 1 Tahun 1998 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 1997 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan menjadi Undang-Undang**.**

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 1998

UNDANG-UNDANG TAHUN 1998

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 Tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Menjadi Undang-Undang. Disahkan Pada Tanggal 16 Pebruari 1998 (LN No. 37 & TLN No. 3739).

i : UU No. 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.

i : UU No. 7 Tahun 2009 Tentang Penetapan PERPU Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

Tentang Perbankan. Disahkan pada tanggal 10 Nopember 1998 (LN No. 182 & TLN No. 3790)

i : Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan.

i : Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Lembaga Penjaminan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998

Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal. Disahkan Pada Tanggal 23 Nopember 1998 (LN No. 188 & TLN No. 3794).

i : UU No. 36 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Samosir Dan Kabupaten Serdang Bedagai Di Provinsi Sumatera Utara.

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 1999

UNDANG-UNDANG TAHUN 1999

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999

Tentang Pemilihan Umum. Disahkan Pada Tanggal 1 Pebruari 1999 (LN No. 23 & TLN No. 3810).

u : UU No. 4 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

i : UU No. 5 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, Dan Kota Sorong.

i : UU No. 7 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Dan Kota Bontang.

i : UU No. 9 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

i : UU No. 10 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo.

i : UU No. 11 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Dan Kabupaten Banggai Kepulauan.

i : UU No. 12 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Lembata.

i : UU No. 4 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan

Raya, Dan Kabupaten Aceh Tamiang, Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

i : UU No. 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Dan Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah.

i : UU No. 6 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin Di Provinsi Sumatera Selatan.

i : UU No. 7 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara Di Provinsi Kalimantan Timur.

i : UU No. 8 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud Di Provinsi Sulawesi Utara.

i : UU No. 9 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Rote-Ndao Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

i : UU No. 10 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah.

i : UU No. 11 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa Dan Kota Palopo Di Provinsi Sulawesi Selatan.

i : UU No. 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman Di Provinsi Sumatera Barat.

i : UU No. 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

i : UU No. 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondama Di Provinsi Papua.

i : UU No. 27 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Banjar Di Provinsi Jawa Barat.

i : UU No. 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, Dan Kota Tidore Kepulauan Di Provinsi Maluku Utara.

i : UU No. 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu Dan Kabupaten Balangan Di Provinsi Kalimantan Selatan.

i : UU No. 3 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, Dan Kabupaten Kaur Di Provinsi Bengkulu.

i : UU No. 4 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara.

i : UU No. 5 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Dan Kabupaten Belitung Timur Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

i : UU No. 6 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango Dan Kabupaten Pohuwato Di Provinsi Gorontalo.

i : UU No. 7 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur Dan Kabupaten Mamuju Utara Di Provinsi Sulawesi Selatan.

i : UU No. 8 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

i : UU No. 9 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, Dan Kabupaten Humbang Hasundutan Di Provinsi Sumatera Utara.

i : UU No. 10 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan Dan Kota Tomohon Di Provinsi Sulawesi Utara.

tbl : UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999

tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Disahkan Pada Tanggal 1 Pebruari 1999 (LN No. 24 & TLN No. 3811).

i : UU No. 9 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru.

i : UU No. 10 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang.

i : UU No. 11 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate.

i : UU No. 12 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, Dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro.

i : UU No. 13 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara.

i : UU No. 14 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil.

i : UU No. 15 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok Dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon.

i : UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

i : UU No. 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

i : UU No. 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang.

i : UU No. 48 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen Dan Kabupaten Simeulue.

i : UU No. 49 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

i : UU No. 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo.

i : UU No. 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Dan Kabupaten Banggai Kepulauan.

i : UU No. 52 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Lembata.

i : UU No. 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam.

i : UU No. 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

i : UU No. 55 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Landak.

i : UU No. 5 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, Dan Kota Sorong.

i : UU No. 6 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, Dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

i : UU No. 7 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Dan Kota Bontang.

i : UU No. 9 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

i : UU No. 10 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo.

i : UU No. 11 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Dan Kabupaten Banggai Kepulauan.

i : UU No. 12 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Lembata.

i : UU No. 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Propinsi Banten.

i : UU No. 27 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

i : UU No. 2 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe.

i : UU No. 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Langsa.

i : UU No. 6 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Prabumulih.

i : UU No. 7 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau.

i : UU No. 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam.

i : UU No. 9 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Cimahi.

i : UU No. 10 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya.

i : UU No. 11 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Batu.

i : UU No. 12 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Singkawang.

i : UU No. 13 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Bau-Bau.

i : UU No. 4 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Dan Kabupaten Aceh Tamiang, Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

i : UU No. 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Dan Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah.

i : UU No. 6 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin Di Provinsi Sumatera Selatan.

i : UU No. 7 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara Di Provinsi Kalimantan Timur.

i : UU No. 8 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud Di Provinsi Sulawesi Utara.

i : UU No. 9 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Rote-Ndao Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

i : UU No. 10 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah.

i : UU No. 11 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa Dan Kota Palopo Di Provinsi Sulawesi Selatan.

i : UU No. 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman Di Provinsi Sumatera Barat.

i : UU No. 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

i : UU No. 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau.

i : UU No. 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondama Di Provinsi Papua.

i : UU No. 27 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Banjar Di Provinsi Jawa Barat.

i : UU No. 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, Dan Kota Tidore Kepulauan Di Provinsi Maluku Utara.

i : UU No. 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu Dan Kabupaten Balangan Di Provinsi Kalimantan Selatan.

i : UU No. 3 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, Dan Kabupaten Kaur Di Provinsi Bengkulu.

i : UU No. 4 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara.

i : UU No. 5 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Dan Kabupaten Belitung Timur Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

i : UU No. 6 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango Dan Kabupaten Pohuwato Di Provinsi Gorontalo.

i : UU No. 7 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur Dan Kabupaten Mamuju Utara Di Provinsi Sulawesi Selatan.

i : UU No. 8 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

i : UU No. 9 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, Dan Kabupaten Humbang Hasundutan Di Provinsi Sumatera Utara.

i : UU No. 10 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan Dan Kota Tomohon Di Provinsi Sulawesi Utara.

c : UU No. 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999

Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru. Disahkan Pada Tanggal 20 April 1999 (LN No. 43 & TLN No. 3821).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999

Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang. Disahkan Pada Tanggal 20 April 1999 (LN No. 44 & TLN No.3823).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999

Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate. Disahkan Pada Tanggal 20 April 1999 (LN No. 45 & TLN No. 3824).

i : UU No. 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

i : UU No. 6 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, Dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

i : UU No. 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, Dan Kota Tidore Kepulauan Di Provinsi Maluku Utara.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999

Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, Dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro. Disahkan Pada Tanggal 20 April 1999 (LN No. 46 & TLN No. 3825).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999

Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara. Disahkan Pada Tanggal 20 April 1999 (LN No. 47 & TLN No. 3826).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999

Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil. Disahkan Pada Tanggal 20 April 1999 (LN No. 48 & TLN No. 3827).

i : UU No. 8 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Subulussalam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999

Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok Dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon. Disahkan pada tanggal 20 April 1999 (LN No. 49 & TLN No. 3828).

i : UU No. 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Propinsi Banten.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999

Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai. Disahkan pada tanggal 20 April 1999 (LN No. 50 & TLN No. 3829).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999

Tentang Jasa Konstruksi. Disahkan pada tanggal 7 Mei 1999 (LN No. 54 & TLN No. 3833).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

tentang Pemerintahan Daerah. Disahkan pada tanggal 7 Mei 1999 (LN No. 60 & TLN No. 3839).

i : UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Disahkan pada tanggal 19 Mei 1999.

i : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Disahkan pada tanggal 24 Juni 1999.

t : UU No. 34 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta. Disahkan pada tanggal 31 Agustus 1999.

i : UU No. 34 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta. Disahkan pada tanggal 31 Agustus 1999.

i : UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Disahkan pada tanggal 30 September 1999.

i : UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Disahkan pada tanggal 30 September 1999.

i : UU No. 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Disahkan pada tanggal 4 Oktober 1999.

t : UU No. 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong. Disahkan pada tanggal 4 Oktober 1999.

i : UU No. 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong. Disahkan pada tanggal 4 Oktober 1999.

t : UU No. 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Disahkan pada tanggal 4 Oktober 1999.

i : UU No. 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Disahkan pada tanggal 4 Oktober 1999.

t : UU No. 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang. Disahkan pada tanggal 4 Oktober 1999.

i : UU No. 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang. Disahkan pada tanggal 4 Oktober 1999.

t : UU No. 48 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen Dan Kabupaten Simeulue. Disahkan pada tanggal 4 Oktober 1999.

i : UU No. 48 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen Dan Kabupaten Simeulue. Disahkan pada tanggal 4 Oktober 1999.

t : UU No. 49 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Disahkan pada tanggal 4 Oktober 1999.

i : UU No. 49 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Disahkan pada tanggal 4 Oktober 1999.

t : UU No. 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo. Disahkan pada tanggal 4 Oktober 1999.

i : UU No. 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo. Disahkan pada tanggal 4 Oktober 1999.

t : UU No. 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Dan Kabupaten Banggai Kepulauan. Disahkan pada tanggal 4 Oktober 1999.

i : UU No. 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Dan Kabupaten Banggai Kepulauan. Disahkan pada tanggal 4 Oktober 1999.

t : UU No. 52 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Lembata. Disahkan pada tanggal 4 Oktober 1999.

i : UU No. 52 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Lembata. Disahkan pada tanggal 4 Oktober 1999.

t : UU No. 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam. Disahkan pada tanggal 4 Oktober 1999.

i : UU No. 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam. Disahkan pada tanggal 4 Oktober 1999.

t : UU No. 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Disahkan pada tanggal 4 Oktober 1999.

i : UU No. 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Disahkan pada tanggal 4 Oktober 1999.

t : UU No. 55 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Landak. Disahkan pada tanggal 4 Oktober 1999.

i : UU No. 55 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Landak. Disahkan pada tanggal 4 Oktober 1999.

i : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan. Disahkan pada tanggal 24 Oktober 1999.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom. Disahkan pada tanggal 6 Mei 2000.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom. Disahkan pada tanggal 6 Mei 2000.

i : KEPPRES Nomor 62 Tahun 2000 Tentang Koordinasi Penataan Ruang Nasional. Disahkan pada tanggal 8 Mei 2000.

i : KEPPRES Nomor 63 Tahun 2000 Tentang Badan Kebijaksanaan Dan Pengendalian Pembangunan Perumahan Dan Permukiman Nasional. Disahkan pada tanggal 8 Mei 2000.

i : UU No. 5 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, Dan Kota Sorong. Disahkan pada tanggal 7 Juni 2000.

i : UU No. 6 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara,

Kabupaten Buru, Dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Disahkan pada tanggal 7 Juni 2000.

i : UU No. 7 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Dan Kota Bontang. Disahkan pada tanggal 7 Juni 2000.

i : UU No. 9 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Disahkan pada tanggal 7 Juni 2000.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2000 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Jayapura Dari Kota Jayapura Ke Wilayah Sentani Di Kabupaten Jayapura. Disahkan pada tanggal 10 Maret 2000.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2000 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Jayapura Dari Kota Jayapura Ke Wilayah Sentani Di Kabupaten Jayapura. Disahkan pada tanggal 10 Maret 2000.

i : UU No. 10 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo. Disahkan pada tanggal 7 Juni 2000.

i : UU No. 11 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Dan Kabupaten Banggai Kepulauan. Disahkan pada tanggal 7 Juni 2000.

i : UU No. 12 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Lembata. Disahkan pada tanggal 7 Juni 2000.

i : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Sistematik Pada Daerah Uji Coba Di Wilayah Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Malang Dan Kantor Pertanahan Kotamadya Tangerang. Disahkan pada tanggal 27 Juni 2000.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2000 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Lombok Barat. Disahkan pada tanggal 7 Agustus 2000.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2000 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Lombok Barat. Disahkan pada tanggal 7 Agustus 2000.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Disahkan pada tanggal 25 September 2000.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Disahkan pada tanggal 25 September 2000.

t : UU No. 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Propinsi Banten. Disahkan pada tanggal 17 Oktober 2000.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Disahkan pada tanggal 10 Nopember 2000.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Disahkan pada tanggal 10 Nopember 2000.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Disahkan pada tanggal 30 Nopember 2000.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Disahkan pada tanggal 30 Nopember 2000.

t : UU No. 27 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Disahkan pada tanggal 4 Desember 2000.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 Tentang Persyaratan Pembentukan Dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah. Disahkan pada tanggal 13 Desember 2000.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 Tentang Persyaratan Pembentukan Dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah. Disahkan pada tanggal 13 Desember 2000.

i : UU No. 36 Tahun 2000 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang. Disahkan pada tanggal 21 Desember 2000.

i : UU No. 37 Tahun 2000 Tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-Undang. Disahkan pada tanggal 21 Desember 2000.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 Tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa. Disahkan pada tanggal 26 Desember 2000.

t : KEPPRES Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Bidang Pertanahan. Disahkan pada tanggal 17 Januari 2001.

i : KEPPRES Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Bidang Pertanahan. Disahkan pada tanggal 17 Januari 2001.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan. Disahkan pada tanggal 5 Pebruari 2001.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pupuk Budidaya Tanaman. Disahkan pada tanggal 19 Pebruari 2001.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Informasi Keuangan Daerah. Disahkan pada tanggal 19 Maret 2001.

i : UU No. 2 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe. Disahkan pada tanggal 21 Juni 2001.

i : UU No. 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Langsa. Disahkan pada tanggal 21 Juni 2001.

i : UU No. 4 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Padang Sidempuan. Disahkan pada tanggal 21 Juni 2001.

i : UU No. 6 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Prabumulih. Disahkan pada tanggal 21 Juni 2001.

i : UU No. 7 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau. Disahkan pada tanggal 21 Juni 2001.

i : UU No. 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam. Disahkan pada tanggal 21 Juni 2001.

i : UU No. 9 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Cimahi. Disahkan pada tanggal 21 Juni 2001.

i : UU No. 10 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya. Disahkan pada tanggal 21 Juni 2001.

i : UU No. 11 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Batu. Disahkan pada tanggal 21 Juni 2001.

i : UU No. 12 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Singkawang. Disahkan pada tanggal 21 Juni 2001.

i : UU No. 13 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Bau-Bau. Disahkan pada tanggal 21 Juni 2001.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Disahkan pada tanggal 3 Juli 2001.

t : UU No. 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Disahkan pada tanggal 9 Agustus 2001.

i : UU No. 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Disahkan pada tanggal 9 Agustus 2001.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah. Disahkan pada tanggal 13 September 2001.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah. Disahkan pada tanggal 13 September 2001.

i : UU No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Disahkan pada tanggal 21 Nopember 2001.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 Tentang Kepelabuhanan. Disahkan pada tanggal 17 Oktober 2001.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 Tentang Kebandarudaraan. Disahkan pada tanggal 17 Oktober 2001.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 Tentang Irigasi. Disahkan pada tanggal 5 Desember 2001.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 Tentang Irigasi. Disahkan pada tanggal 5 Desember 2001.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air. Disahkan pada tanggal 14 Desember 2001.

i : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Disahkan pada tanggal 31 Januari 2002.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara. Disahkan pada tanggal 23 Maret 2002

i : Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara. Disahkan pada tanggal 23 Maret 2002.

i : UU No. 4 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Dan Kabupaten Aceh Tamiang, Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Disahkan pada tanggal 10 April 2002.

i : UU No. 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten

Murung Raya, Dan Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah. Disahkan pada tanggal 10 April 2002.

i : UU No. 6 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin Di Provinsi Sumatera Selatan. Disahkan pada tanggal 10 April 2002.

i : UU No. 7 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara Di Provinsi Kalimantan Timur. Disahkan pada tanggal 10 April 2002.

i : UU No. 8 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud Di Provinsi Sulawesi Utara. Disahkan pada tanggal 10 April 2002.

i : UU No. 9 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Rote-Ndao Di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Disahkan pada tanggal 10 April 2002.

i : UU No. 10 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah. Disahkan pada tanggal 10 April 2002.

i : UU No. 11 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa Dan Kota Palopo Di Provinsi Sulawesi Selatan. Disahkan pada tanggal 10 April 2002.

i : UU No. 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman Di Provinsi Sumatera Barat. Disahkan pada tanggal 10 April 2002.

i : UU No. 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Disahkan pada tanggal 10 April 2002.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak Untuk Penghitungan Pajak Bumi Dan Bangunan. Disahkan pada tanggal 13 Mei 2002.

i : KEPPRES Nomor 33 Tahun 2002 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut. Disahkan pada tanggal 23 Mei 2002.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan. Disahkan pada tanggal 8 Juni 2002.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Dana Reboisasi. Disahkan pada tanggal 8 Juni 2002.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Usaha Perikanan. Disahkan pada tanggal 7 Oktober 2002.

t : UU No. 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Disahkan pada tanggal 22 Oktober 2002.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota. Disahkan pada tanggal 12 Nopember 2002.

i : UU No. 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondama Di Provinsi Papua. Disahkan pada tanggal 11 Desember 2002.

i : UU No. 27 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Banjar Di Provinsi Jawa Barat. Disahkan pada tanggal 11 Desember 2002.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Disahkan pada tanggal 18 Desember 2003. Disahkan pada tanggal 17 Pebruari 2003.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Disahkan pada tanggal 17 Pebruari 2003.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Disahkan pada tanggal 17 Pebruari 2003.

i : UU No. 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula,

Kabupaten Halmahera Timur, Dan Kota Tidore Kepulauan Di Provinsi Maluku Utara. Disahkan pada tanggal 25 Pebruari 2003.

i : UU No. 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu Dan Kabupaten Balangan Di Provinsi Kalimantan Selatan. Disahkan pada tanggal 25 Pebruari 2003.

i : UU No. 3 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, Dan Kabupaten Kaur Di Provinsi Bengkulu. Disahkan pada tanggal 25 Pebruari 2003.

i : UU No. 4 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara. Disahkan pada tanggal 25 Pebruari 2003. Disahkan pada tanggal 25 Pebruari 2003.

i : UU No. 5 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Dan Kabupaten Belitung Timur Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Disahkan pada tanggal 25 Pebruari 2003.

i : UU No. 6 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango Dan Kabupaten Pohuwato Di Provinsi Gorontalo. Disahkan pada tanggal 25 Pebruari 2003.

i : UU No. 7 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur Dan Kabupaten Mamuju Utara Di Provinsi Sulawesi Selatan. Disahkan pada tanggal 25 Pebruari 2003.

i : UU No. 8 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat Di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Disahkan pada tanggal 25 Pebruari 2003.

i : UU No. 9 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, Dan Kabupaten Humbang Hasundutan Di Provinsi Sumatera Utara. Disahkan pada tanggal 25 Pebruari 2003.

i : UU No. 10 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan Dan Kota Tomohon Di Provinsi Sulawesi Utara. Disahkan pada tanggal 25 Pebruari 2003.

i : UU No. 11 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam. Disahkan pada tanggal 25 Pebruari 2003.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Aceh Utara Dari Wilayah Kota Lhokseumawe Ke Lhoksukon Di Wilayah Kabupaten Aceh Utara. Disahkan pada tanggal 7 Maret 2003.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Aceh Utara Dari Wilayah Kota Lhokseumawe Ke Lhoksukon Di Wilayah Kabupaten Aceh Utara. Disahkan pada tanggal 7 Maret 2003.

i : KEPPRES Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan. Disahkan pada tanggal 31 Mei 2003.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Buton Dari Wilayah Kota Bau-Bau Ke Pasarwajo Di Wilayah Kabupaten Buton. Disahkan pada tanggal 10 Juni 2003.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Buton Dari Wilayah Kota Bau-Bau Ke Pasarwajo Di Wilayah Kabupaten Buton. Disahkan pada tanggal 10 Juni 2003.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2003 Tentang Penghapusan Kota Administratif Kisaran, Kota Administratif Rantau Prapat, Kota Administratif Batu Raja, Kota Administratif Cilacap, Kota Administratif Purwokerto, Kota Administratif Klaten, Kota Administratif Jember, Dan Kota Administratif Watampone. Disahkan pada tanggal 8 Juli 2003.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2003 Tentang Penghapusan Kota Administratif Kisaran, Kota Administratif Rantau Prapat, Kota Administratif Batu Raja, Kota Administratif Cilacap, Kota

Administratif Purwokerto, Kota Administratif Klaten, Kota Administratif Jember, Dan Kota Administratif Watampone. Disahkan pada tanggal 8 Juli 2003.

i : UU No. 29 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, Dan Kabupaten Kolaka Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara. Disahkan pada tanggal 18 Desember 2003.

i : UU No. 30 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat Di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Disahkan pada tanggal 18 Desember 2003.

i : UU No. 31 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Lingga Di Provinsi Kepulauan Riau. Disahkan pada tanggal 18 Desember 2003.

i : UU No. 32 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una Di Provinsi Sulawesi Tengah. Disahkan pada tanggal 18 Desember 2003.

i : UU No. 33 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara Di Provinsi Sulawesi Utara. Disahkan pada tanggal 18 Desember 2003.

i : UU No. 34 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Melawi Dan Kabupaten Sekadau Di Provinsi Kalimantan Barat. Disahkan pada tanggal 18 Desember 2003.

i : UU No. 35 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Supiori Di Provinsi Papua. Disahkan pada tanggal 18 Desember 2003.

i : UU No. 36 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Samosir Dan Kabupaten Serdang Bedagai Di Provinsi Sumatera Utara. Disahkan pada tanggal 18 Desember 2003.

i : UU No. 37 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Dan Kabupaten Ogan Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan. Disahkan pada tanggal 18 Desember 2003.

i : UU No. 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Dan Kabupaten Pasaman

Barat Di Provinsi Sumatera Barat. Disahkan pada tanggal 18 Desember 2003.

i : UU No. 39 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Lebong Dan Kabupaten Kepahiang Di Provinsi Bengkulu. Disahkan pada tanggal 18 Desember 2003.

i : UU No. 40 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, Dan Kabupaten Kepulauan Aru Di Provinsi Maluku. Disahkan pada tanggal 18 Desember 2003.

i : UU No. 41 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Disahkan pada tanggal 18 Desember 2003.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah. Disahkan pada tanggal 10 Mei 2004.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari Menjadi Kabupaten Konawe. Disahkan pada tanggal 28 Agustus 2004.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari Menjadi Kabupaten Konawe. Disahkan pada tanggal 28 Agustus 2004.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Tasikmalaya Dari Wilayah Kota Tasikmalaya Ke Singaparna Di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Disahkan pada tanggal 5 Oktober 2004.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Tasikmalaya Dari Wilayah Kota Tasikmalaya Ke Singaparna Di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Disahkan pada tanggal 28 Agustus 2004.

i : UU No. 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat. Disahkan pada tanggal 5 Oktober 2004.

tbl : UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Disahkan pada tanggal 15 Oktober 2004.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999

Tentang Bank Indonesia. Disahkan Pada Tanggal 17 Mei 1999. (LN No. 66 & TLN No. 3843).

u : UU No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

i : UU No. 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Disahkan pada tanggal 19 Mei 1999 (LN No. 72 & TLN No. 3849).

i : UU No. 34 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta. Disahkan pada tanggal 31 Agustus 1999.

i : UU No. 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Disahkan pada tanggal 4 Oktober 1999.

i : UU No. 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong. Disahkan pada tanggal 4 Oktober 1999.

i : UU No. 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Disahkan pada tanggal 4 Oktober 1999.

i : UU No. 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang. Disahkan pada tanggal 4 Oktober 1999.

i : UU No. 48 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen Dan Kabupaten Simeulue. Disahkan pada tanggal 4 Oktober 1999.

i : UU No. 49 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Disahkan pada tanggal 4 Oktober 1999.

i : UU No. 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo. Disahkan pada tanggal 4 Oktober 1999.

i : UU No. 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Dan Kabupaten Banggai Kepulauan. Disahkan pada tanggal 4 Oktober 1999.

i : UU No. 52 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Lembata. Disahkan pada tanggal 4 Oktober 1999.

i : UU No. 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam. Disahkan pada tanggal 4 Oktober 1999.

i : UU No. 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Disahkan pada tanggal 4 Oktober 1999.

i : UU No. 55 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Landak. Disahkan pada tanggal 4 Oktober 1999.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah. Disahkan pada tanggal 10 Maret 2000.

i : UU No. 37 Tahun 2000 Tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-Undang. Disahkan pada tanggal 21 Desember 2000.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom. Disahkan pada tanggal 6 Mei 2000.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Disahkan pada tanggal 25 September 2000.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Disahkan pada tanggal 10 Nopember 2000.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Disahkan pada tanggal 10 Nopember 2000.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Disahkan pada tanggal 30 Nopember 2000.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2000 Tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1997 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah. Disahkan pada tanggal 1 Desember 2000.

i : UU No. 27 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Disahkan pada tanggal 4 Desember 2000.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 Tentang Persyaratan Pembentukan Dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah. Disahkan pada tanggal 13 Desember 2000.

i : UU No. 36 Tahun 2000 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang. Disahkan pada tanggal 21 Desember 2000.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Informasi Keuangan Daerah. Disahkan pada tanggal 19 Maret 2001.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Informasi Keuangan Daerah. Disahkan pada tanggal 19 Maret 2001.

i : UU No. 2 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe. Disahkan pada tanggal 21 Juni 2001.

i : UU No. 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Langsa. Disahkan pada tanggal 21 Juni 2001.

i : UU No. 4 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Padang Sidempuan. Disahkan pada tanggal 21 Juni 2001.

i : UU No. 6 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Prabumulih. Disahkan pada tanggal 21 Juni 2001.

i : UU No. 7 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau. Disahkan pada tanggal 21 Juni 2001.

i : UU No. 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam. Disahkan pada tanggal 21 Juni 2001.

i : UU No. 9 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Cimahi. Disahkan pada tanggal 21 Juni 2001.

i : UU No. 10 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya. Disahkan pada tanggal 21 Juni 2001.

i : UU No. 11 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Batu. Disahkan pada tanggal 21 Juni 2001.

i : UU No. 12 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Singkawang. Disahkan pada tanggal 21 Juni 2001.

i : UU No. 13 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Bau-Bau. Disahkan pada tanggal 21 Juni 2001.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Disahkan pada tanggal 3 Juli 2001.

i : UU No. 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Disahkan pada tanggal 9 Agustus 2001.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah. Disahkan pada tanggal 13 September 2001.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah. Disahkan pada tanggal 13 September 2001.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 Tentang Kepelabuhanan. Disahkan pada tanggal 17 Oktober 2001.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 Tentang Kebandarudaraan. Disahkan pada tanggal 17 Oktober 2001.

i : UU No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Disahkan pada tanggal 21 Nopember 2001.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 Tentang Irigasi. Disahkan pada tanggal 5 Desember 2001.

i : UU No. 4 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Dan Kabupaten Aceh Tamiang, Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Disahkan pada tanggal 10 April 2002.

i : UU No. 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Dan Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah. Disahkan pada tanggal 10 April 2002.

i : UU No. 6 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin Di Provinsi Sumatera Selatan. Disahkan pada tanggal 10 April 2002.

i : UU No. 7 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara Di Provinsi Kalimantan Timur. Disahkan pada tanggal 10 April 2002.

i : UU No. 8 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud Di Provinsi Sulawesi Utara. Disahkan pada tanggal 10 April 2002.

i : UU No. 9 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Rote-Ndao Di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Disahkan pada tanggal 10 April 2002.

i : UU No. 10 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah. Disahkan pada tanggal 10 April 2002.

i : UU No. 11 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa Dan Kota Palopo Di Provinsi Sulawesi Selatan. Disahkan pada tanggal 10 April 2002.

i : UU No. 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman Di Provinsi Sumatera Barat. Disahkan pada tanggal 10 April 2002.

i : UU No. 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Disahkan pada tanggal 10 April 2002. Disahkan pada tanggal 10 April 2002.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak Untuk Penghitungan Pajak Bumi Dan Bangunan. Disahkan pada tanggal 13 Mei 2002.

i : KEPPRES Nomor 33 Tahun 2002 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut. Disahkan pada tanggal 23 Mei 2002.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Dana Reboisasi. Disahkan pada tanggal 8 Juni 2002.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Usaha Perikanan. Disahkan pada tanggal 7 Oktober 2002.

i : UU No. 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Disahkan pada tanggal 25 Oktober 2002.

i : UU No. 27 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Banjar Di Provinsi Jawa Barat. Disahkan pada tanggal 11 Desember 2002.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Disahkan pada tanggal 17 Pebruari 2003.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Aceh Utara Dari Wilayah Kota Lhokseumawe Ke Lhoksukon Di Wilayah Kabupaten Aceh Utara. Disahkan pada tanggal 7 Maret 2003.

i : UU No. 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula,

Kabupaten Halmahera Timur, Dan Kota Tidore Kepulauan Di Provinsi Maluku Utara. Disahkan pada tanggal 25 Pebruari 2003.

i : UU No. 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu Dan Kabupaten Balangan Di Provinsi Kalimantan Selatan. Disahkan pada tanggal 25 Pebruari 2003.

i : UU No. 3 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, Dan Kabupaten Kaur Di Provinsi Bengkulu. Disahkan pada tanggal 25 Pebruari 2003.

i : UU No. 4 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara. Disahkan pada tanggal 25 Pebruari 2003.

i : UU No. 5 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Dan Kabupaten Belitung Timur Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Disahkan pada tanggal 25 Pebruari 2003.

i : UU No. 6 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango Dan Kabupaten Pohuwato Di Provinsi Gorontalo. Disahkan pada tanggal 25 Pebruari 2003.

i : UU No. 7 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur Dan Kabupaten Mamuju Utara Di Provinsi Sulawesi Selatan. Disahkan pada tanggal 25 Pebruari 2003.

i : UU No. 8 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat Di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Disahkan pada tanggal 25 Pebruari 2003.

i : UU No. 9 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, Dan Kabupaten Humbang Hasundutan Di Provinsi Sumatera Utara. Disahkan pada tanggal 25 Pebruari 2003.

i : UU No. 10 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan Dan Kota Tomohon Di Provinsi Sulawesi Utara. Disahkan pada tanggal 25 Pebruari 2003.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Buton Dari Wilayah Kota Bau-Bau Ke Pasarwajo Di Wilayah Kabupaten Buton. Disahkan pada tanggal 10 Juni 2003.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2003 Tentang Penghapusan Kota Administratif Kisaran, Kota Administratif Rantau Prapat, Kota Administratif Batu Raja, Kota Administratif Cilacap, Kota Administratif Purwokerto, Kota Administratif Klaten, Kota Administratif Jember, Dan Kota Administratif Watampone. Disahkan pada tanggal 8 Juli 2003.

i : UU No. 29 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, Dan Kabupaten Kolaka Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara. Disahkan pada tanggal 18 Desember 2003.

i : UU No. 30 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat Di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Disahkan pada tanggal 18 Desember 2003.

i : UU No. 31 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Lingga Di Provinsi Kepulauan Riau. Disahkan pada tanggal 18 Desember 2003.

i : UU No. 32 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una Di Provinsi Sulawesi Tengah. Disahkan pada tanggal 18 Desember 2003.

i : UU No. 33 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara Di Provinsi Sulawesi Utara. Disahkan pada tanggal 18 Desember 2003.

i : UU No. 34 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Melawi Dan Kabupaten Sekadau Di Provinsi Kalimantan Barat. Disahkan pada tanggal 18 Desember 2003.

i : UU No. 35 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Supiori Di Provinsi Papua. Disahkan pada tanggal 18 Desember 2003.

i : UU No. 36 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Samosir Dan Kabupaten Serdang Bedagai Di Provinsi Sumatera Utara. Disahkan pada tanggal 18 Desember 2003.

i : UU No. 37 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Dan Kabupaten Ogan Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan. Disahkan pada tanggal 18 Desember 2003.

i : UU No. 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Dan Kabupaten Pasaman Barat Di Provinsi Sumatera Barat. Disahkan pada tanggal 18 Desember 2003.

i : UU No. 39 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Lebong Dan Kabupaten Kepahiang Di Provinsi Bengkulu. Disahkan pada tanggal 18 Desember 2003.

i : UU No. 40 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, Dan Kabupaten Kepulauan Aru Di Provinsi Maluku. Disahkan pada tanggal 18 Desember 2003.

i : UU No. 41 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Disahkan pada tanggal 18 Desember 2003.

i : UU No. 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat. Disahkan pada tanggal 5 Oktober 2004.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Tasikmalaya Dari Wilayah Kota Tasikmalaya Ke Singaparna Di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Disahkan pada tanggal 5 Oktober 2004.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Disahkan pada tanggal 19 Mei 1999 (LN No. 75 & TLN No. 3851).

i : UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Disahkan pada tanggal 30 September 1999.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik. Disahkan pada tanggal 9 Agustus 2010.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian. Disahkan pada tanggal 18 April 2011.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Auditor Di Lingkungan. Disahkan pada tanggal 4 Juli 2011.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penanganan Laporan Adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Disahkan pada tanggal 5 Juli 2012.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Disahkan Pada Tanggal 12 Agustus 1999. (LN No. 138 & TLN No. 3872).

i : Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 Tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999

Tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta. Disahkan Pada Tanggal 31 Agustus 1999 (LN No. 146 & TLN No. 3878).

t : Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Disahkan pada tanggal 3 Juli 2001.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Disahkan pada tanggal 3 Juli 2001.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Disahkan pada tanggal 17 Pebruari 2003.

t : UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disahkan pada tanggal 30 Juli 2007.

c : UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disahkan pada tanggal 30 Juli 2007.

tbl : UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disahkan pada tanggal 30 Juli 2007.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999

tentang Hubungan Luar Negeri. Disahkan pada tanggal 14 September 1999. (LN No. 156 & TLN No. 3882)

i : UU No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

i : UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

tentang Hak Asasi Manusia. Disahkan pada tanggal 23 September 1999. (LN No. 165 & TLN No. 3886).

i : UU No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

i : UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999

Tentang Kehutanan. Disahkan pada tanggal 30 September 1999 (LN No. 167 & TLN No. 3888)

i : Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 Tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa. Disahkan pada tanggal 23 Desember 2000.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan. Disahkan pada tanggal 4 Pebruari 2001.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan. Disahkan pada tanggal 8 Juni 2002.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan. Disahkan pada tanggal 8 Juni 2002.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Dana Reboisasi. Disahkan pada tanggal 8 Juni 2002.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Dana Reboisasi. Disahkan pada tanggal 8 Juni 2002.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota. Disahkan pada tanggal 12 Nopember 2002.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota. Disahkan pada tanggal 12 Nopember 2002.

u : UU No. 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang. Disahkan pada tanggal 13 Agustus 2004.

t : UU No. 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun

1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang. Disahkan pada tanggal 13 Agustus 2004.

i : UU No. 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang. Disahkan pada tanggal 13 Agustus 2004.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan. Disahkan pada tanggal 18 Oktober 2004.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan. Disahkan pada tanggal 18 Oktober 2004.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan. Disahkan pada tanggal 18 Oktober 2004.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan. Disahkan pada tanggal 18 Oktober 2004.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan. Disahkan pada tanggal 4 Pebruari 2008.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan. Disahkan pada tanggal 16 Desember 2008.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan. Disahkan pada tanggal 16 Desember 2008.

i : Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 Tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur. Disahkan pada tanggal 12 Agustus 2008.

i : KEPPRES Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional. Disahkan pada tanggal 18 Maret 2009.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan. Disahkan pada tanggal 22 Januari 2010.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan. Disahkan pada tanggal 22 Januari 2010.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Disahkan pada tanggal 22 Januari 2011.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar. Disahkan pada tanggal 1 Pebruari 2010.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Disahkan pada tanggal 30 September 1999 Ln No. 169 & TLN No. 3890).

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Disahkan pada tanggal 16 Mei 2006.

i : UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Disahkan pada tanggal 15 Oktober 2004

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat. Disahkan pada tanggal 28 Januari 2010.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Loket Pelayanan Pertanahan. Disahkan pada tanggal 28 Januari 2010.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelesaian Kerugian Negara Di

Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Disahkan pada tanggal 21 September 2010.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah. Disahkan pada tanggal 30 Maret 2011.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian. Disahkan pada tanggal 18 April 2011.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999

Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Disahkan pada tanggal 4 oktober 1999 (LN No. 172 & TLN No. 3893).

i : UU No. 37 Tahun 2000 Tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-Undang.

t : UU No. 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

i : UU No. 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

i : Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

i : UU No. 7 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

i : UU No. 8 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Subulussalam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999

Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong. Disahkan Pada tanggal 4 Oktober 1999 (LN N0. 173 & TLN No. 3894).

u : Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, Dan Kota Sorong

t : Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, Dan Kota Sorong.

i : UU No. 5 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, Dan Kota Sorong.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2000 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Jayapura Dari Kota Jayapura Ke Wilayah Sentani Di Kabupaten Jayapura.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat Menjadi Provinsi Papua Barat.

i : UU No. 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Puncak Di Provinsi Papua.

i : UU No. 54 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya Di Provinsi Papua.

i : UU No. 55 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Deiyai Di Provinsi Papua.

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999

Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Disahkan pada tanggal 4 Oktober 1999 (LN NO. 174 & TLN No. 3895).

u : UU No. 6 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, Dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

t : UU No. 6 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, Dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

i : UU No. 6 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, Dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

i : UU No. 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, Dan Kota Tidore Kepulauan Di Provinsi Maluku Utara.

i : UU No. 31 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya Di Provinsi Maluku.

i : UU No. 32 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan Di Provinsi Maluku

i : UU No. 53 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai Di Provinsi Maluku Utara.

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999

Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang. Disahkan Tanggal 4 Oktober 1999 (LN No. 175 & TLN No. 3896).

u : UU No. 7 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Dan Kota Bontang.

t : UU No. 7 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Dan Kota Bontang.

i : UU No. 7 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan,

Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Dan Kota Bontang.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999

Tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen Dan Kabupaten Simeulue. Disahkan Pada Tanggal 4 Oktober 1999 (LN No. 176 & TLN No. 3896).

t : UU No. 8 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen Dan Kabupaten Simeulue.

u : UU No. 8 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen Dan Kabupaten Simeulue.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999

Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Disahkan Pada Tanggal 4 Oktober 1999 (LN No. 177 & TLN No. 3898).

t : UU No. 9 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

u : UU No. 9 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

i : UU No. 9 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999

Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo. Disahkan Pada Tanggal 4 Oktober 1999 (LN No. 178 & TLN No. 3899).

t : UU No. 10 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo.

u : UU No. 10 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo.

i : UU No. 10 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo.

i : UU No. 6 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango Dan Kabupaten Pohuwato Di Provinsi Gorontalo.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999

Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Dan Kabupaten Banggai Kepulauan. Disahkan Pada Tanggal 4 Oktober 1999 (LN No. 179 & TLN No. 3900).

t : UU No. 11 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Dan Kabupaten Banggai Kepulauan.

u : UU No. 11 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Dan Kabupaten Banggai Kepulauan.

i : UU No. 11 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Dan Kabupaten Banggai Kepulauan.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999

Tentang Pembentukan Kabupaten Lembata. Disahkan Pada Tanggal 4 Oktober 1999 (LN No. 180 & TLN No. 3901).

u : UU No. 12 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Lembata.

t : UU No. 12 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Lembata.

i : UU No. 12 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Lembata.

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999

Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam. Disahkan pada tanggal 4 Oktober 1999 (LN No. 181 & TLN No. 3902).

u : UU No. 13 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam. Disahkan

i : UU No. 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau.

u : UU No. 11 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam.

i : UU No. 11 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam.

i : UU No. 33 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas Di Provinsi Kepulauan Riau.

t : UU No. 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam.

u : UU No. 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam.

i : UU No. 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam.

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999

Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Disahkan pada tanggal 4 Oktober 1999 (LN No. 182 & TLN No. 3903).

t : UU No. 14 Tahun 2000 Tentang Perubahan KAtas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

u : UU No. 14 Tahun 2000 Tentang Perubahan KAtas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

i : UU No. 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau.

Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999

Tentang Pembentukan Kabupaten Landak. Disahkan pada tanggal 4 Oktober 1999 (LN No. 183 & TLN No. 3904).

t : UU No. 15 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Landak.

u : UU No. 15 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Landak.

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 2000

UNDANG-UNDANG TAHUN 2000

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000

Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Disahkan pada tanggal 7 Juni 2000 (LN No. 71 & TN No. 3959).

i : UU No. 27 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Disahkan pada tanggal 4 Desember 2000.

i : UU No. 2 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe. Disahkan pada tanggal 21 Juni 2000.

i : UU No. 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Langsa. Disahkan pada tanggal 21 Juni 2000.

i : UU No. 4 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Padang Sidempuan. Disahkan pada tanggal 21 Juni 2000.

i : UU No. 6 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Prabumulih. Disahkan pada tanggal 21 Juni 2000.

i : UU No. 7 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau. Disahkan pada tanggal 21 Juni 2000.

i : UU No. 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam. Disahkan pada tanggal 21 Juni 2000.

i : UU No. 9 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Cimahi. Disahkan pada tanggal 21 Juni 2000.

i : UU No. 10 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya. Disahkan pada tanggal 21 Juni 2000.

i : UU No. 11 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Batu. Disahkan pada tanggal 21 Juni 2000.

i : UU No. 12 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Singkawang. Disahkan pada tanggal 21 Juni 2000.

i : UU No. 13 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Bau-Bau. Disahkan pada tanggal 21 Juni 2000.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, Dan Kota Sorong. Disahkan Pada Tanggal 7 Juni 2000 (LN NO. 72 & TLN No.3960).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, Dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Disahkan Pada Tanggal 7 Juni 2000 (LN NO. 73 & TLN No.3961).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Dan Kota Bontang. Disahkan Pada Tanggal 7 Juni 2000 (LN NO. 74 & TLN No.3962).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen Dan Kabupaten Simeulue. Disahkan pada tanggal 7 Juni 2000 (LN No. 75 & TLN No. 3963).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Disahkan Pada Tanggal 7 Juni 2000 (LN No. 76 & TLN No. 3964).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo. Disahkan pada tanggal 7 Juni 2000 (LN No. 77 & TLN No. 3965).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Dan Kabupaten Banggai Kepulauan. Disahkan pada tanggal 7 Juni 2000 (LN No. 78 & TLN No. 3966).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Lembata. Disahkan pada tanggal 7 Juni 2000 (LN No. 79 & TLN No. 3967).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam. Disahkan pada tanggal 7 Juni 2000 (LN No. 80 & TLN No. 3968).

i : UU No. 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sorolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Disahkan pada tanggal 7 Juni 2000 (LN No. 81 & TLN No. 3969).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Landak. Disahkan Pada Tanggal 7 Juni 2000 (LN No. 82 & TLN No. 3970).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umun dan Tata Cara Perpajakan. Disahkan Pada Tanggal 7 Juni 2000 (LN No. 126 & TLN No. 3984).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000

Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Disahkan Pada Tanggal 2 Agustus 2000 (LN No. 127 & TLN No. 3985).

t : Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 130 Tahun 2000 Tentang Pengecualian Sebagai Objek Pajak Atas Keuntungan Karena Pembebasan Utang Debitur Kecil.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 130 Tahun 2000 Tentang Pengecualian Sebagai Objek Pajak Atas Keuntungan Karena Pembebasan Utang Debitur Kecil.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Disahkan Pada Tanggal 2 Agustus 2000 (LN No. 128 & TLN No. 3986).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Disahkan Pada Tanggal 2 Agustus 2000 (LN No. 129 & TLN No. 3987).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Disahkan pada tanggal 2 Agustus 2000 (LN No. 130 & TLN No. 3988).

t : Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2000 Tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Karena Waris Dan Hibah Wasiat. Disahkan pada tanggal 1 Desember 2000.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2000 Tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Karena Waris Dan Hibah Wasiat. Disahkan pada tanggal 1 Desember 2000.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2000 Tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Karena Pemberian Hak Pengelolaan. Disahkan pada tanggal 1 Desember 2000.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2000 Tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Karena Pemberian Hak Pengelolaan. Disahkan pada tanggal 1 Desember 2000.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2000 Tentang Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan. Disahkan pada tanggal 1 Desember 2000.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2000 Tentang Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan. Disahkan pada tanggal 1 Desember 2000.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2000 Tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1997 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah. Disahkan pada tanggal 1 Desember 2000.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2000 Tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1997 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah. Disahkan pada tanggal 1 Desember 2000.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Melalui Kegiatan Sertipikasi Hak Atas Tanah Untuk Peningkatan Akses Permodalan.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Penyederhanaan Dan Percepatan Standar Prosedur Operasi Pengaturan Dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan Pertanahan Tertentu.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000

Tentang Pembentukan Propinsi Banten. Disahkan Pada Tanggal 17 Oktober 2000. (LN No. 182 & TLN No. 4010)

i : UU No. 32 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Serang Di Provinsi Banten.

i : UU No. 51 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten.

i : Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 Tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000

tentang Perjanjian Internasional. Disahkan pada tanggal 23 Oktober 2000.

i : UU No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

i : UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000

tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2001-2004. Disahkan pada tanggal 20 Nopember 2000 (LN No. 206).

i : Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 Tentang Irigasi.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000

tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Disahkan pada tanggal 23 Nopember 2000. (LN No. 208 & TLN No. 4026).

i : UU No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

i : UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000

Tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Disahkan Pada Tanggal 4 Desember 2000 (LN No. 217 & TLN NO. 4033).

i : UU No. 5 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Dan Kabupaten Belitung Timur Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2007 Tentang Perubahan Batas Daerah Kota Pangkalpinang Dengan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Di Desa Selindung.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah. Disahkan pada tanggal 20 Desember 2000 (LN No. 246 & TLN No. 4048).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pela-buhan Bebas Menjadi Undang-Undang. Disahkan pada tanggal 21 Desember 2000 (LN No. 251 & TLN No. 4053).

i : UU No. 37 Tahun 2000 Tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-Undang. Disahkan pada tanggal 21 Desember 2000

i : Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam. Disahkan pada tanggal 20 Agustus 2007.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Karimun. Disahkan pada tanggal 20 Agustus 2007.

u : UU No. 44 Tahun 2007 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pela-buhan Bebas Menjadi Undang-Undang. Disahkan pada tanggal 1 Nopember 2007.

c : UU No. 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus. Disahkan pada tanggal 14 Oktober 2009.

tbl : UU No. 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus. Disahkan pada tanggal 14 Oktober 2009.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-Undang. Disahkan pada tanggal 21 Desember 2000 (LN No. 253 & TLN No. 4054).

i : UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000

Tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo. Disahkan pada tanggal 22 Desember 2000 (LN No. 258 & TLN No. 4060).

i : UU No. 6 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango Dan Kabupaten Pohuwato Di Provinsi Gorontalo.

i : UU No. 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara Di Provinsi Gorontalo.

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TAHUN 2000 (PERPU TAHUN 2000)

PERPU No. 1 Tahun 2000

Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Disahkan pada tanggal 1 September 2000 (LN No. 147 & TLN No. 3996).

uu : UU No. 36 Tahun 2000 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pela-buhan Bebas Menjadi Undang-Undang. Disahkan pada tanggal 21 Desember 2000.

PERPU No. 2 Tahun 2000

Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang. Disahkan pada tanggal 1 September 2000 (LN No. 147 & TLN No. 3996).

uu : UU No. 37 Tahun 2000 tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-Undang. Disahkan pada tanggal 21 Desember 2000.

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 2001

UNDANG-UNDANG TAHUN 2001

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001

Tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe. Disahkan pada tanggal 21 Juni 2001 (LN No. 82 & TLN No. 4109).

mb : Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Aceh Utara Dari Wilayah Kota Lhokseumawe Ke Lhoksukon Di Wilayah Kabupaten Aceh Utara.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001

Tentang Pembentukan Kota Langsa. Disahkan pada tanggal 21 Juni 2001 (LN No. 83 & TLN No. 4110).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001

Tentang Pembentukan Kota Padang Sidempuan. Disahkan Pada Tanggal 21 Juni 2001 (LN No. 84 & TLN No. 4111).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001

tentang Pembentukan Kota Tanjung Pinang. Disahkan pada tanggal 21 Juni 2001 (LN No. 85 & TLN No. 4112).

i : UU No. 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2004 tentang Pemindahann Ibukota Kabupaten Kepulauan Riau dari Wilayah Kota Tanjung Pinang ke Bandar Seri Bentan di Wilayah Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Kepulauan Riau.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001

Tentang Pembentukan Kota Prabumulih. Disahkan Pada Tanggal 21 Juni 2001 (LN No. 86 & TLN No. 4113).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001

Tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau. Disahkan Pada Tanggal 21 Juni 2001 (LN No. 87 & TLN No. 4114).

t : Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2005 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Musi Rawas Dari Wilayah Kota Lubuk Linggau Ke Wilayah Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001

Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam. Disahkan pada tanggal 21 Juni 2001 (LN No. 88 & TLN No. 4115).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001

Tentang Pembentukan Kota Cimahi. Disahkan pada tanggal 21 Juni 2001 (LN No. 89 & TLN No. 4116).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001

Tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya. Disahkan Pada Tanggal 21 Juni 2001 (LN No. 90 & TLN No. 4117).

i : Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Tasikmalaya Dari Wilayah Kota Tasikmalaya Ke Singaparna Di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001

Tentang Pembentukan Kota Batu. Disahkan pada tanggal 21 Juni 2001 (LN No. 91 & TLN No. 4118).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001

Tentang Pembentukan Kota Singkawang. Disahkan pada tanggal 21 Juni 2001 (LN No. 92 & TLN No. 4119).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001

Tentang Pembentukan Kota Bau-Bau. Disahkan pada tanggal 21 Juni 2001 (LN No. 93 & TLN No. 4120).

i : Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Buton Dari Wilayah Kota Bau-Bau Ke Pasarwajo Di Wilayah Kabupaten Buton.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001

Tentang Yayasan. Disahkan pada tanggal 6 Agustus 2001. (LN No. 112 & TLN No. 4132)

u : UU No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Disahkan pada tanggal 6 Oktober 2004.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001

Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Disahkan pada tanggal 9 Agustus 2001 (LN No. 114 & TLN No. 4134).

i : UU No. 4 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Dan Kabupaten Aceh Tamiang, Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

i : UU No. 41 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Dana Reboisasi.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan.

c : UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

tbl : UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Disahkan pada tanggal 21 November 2001 (LN No. 134 & TLN No. 4150).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001

Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Disahkan pada tanggal 21 November 2001 (LN No. 135 & TLN No. 4151).

i : Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan. Disahkan pada tanggal 8 Juni 2002.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Dana Reboisasi. Disahkan pada tanggal 8 Juni 2002.

i : UU No. 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondama Di Provinsi Papua. Disahkan pada tanggal 11 Desember 2002.

i : UU No. 35 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Supiori Di Provinsi Papua.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan. Disahkan pada tanggal 18 Oktober 2004.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan. Disahkan pada tanggal 18 Oktober 2004.

i : UU No. 19 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Raya Di Provinsi Papua.

i : UU No. 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Tengah Di Provinsi Papua. Disahkan pada tanggal 4 Januari 2008.

i : UU No. 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Yalimo Di Provinsi Papua. Disahkan pada tanggal 4 Januari 2008.

i : UU No. 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya Di Provinsi Papua. Disahkan pada tanggal 4 Januari 2008.

i : UU No. 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Nduga Di Provinsi Papua. Disahkan pada tanggal 4 Januari 2008.

i : UU No. 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Puncak Di Provinsi Papua. Disahkan pada tanggal 4 Januari 2008.

i : UU No. 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Dogiyai Di Provinsi Papua. Disahkan pada tanggal 4 Januari 2008.

u : PERPU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Disahkan pada tanggal 16 April 2008.

t : UU No. 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang. Disahkan pada tanggal 25 Juli 2008.

i : UU No. 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang. Disahkan pada tanggal 25 Juli 2008.

u : UU No. 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang. Disahkan pada tanggal 25 Juli 2008.

i : UU No. 54 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya Di Provinsi Papua.

i : UU No. 55 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Deiyai Di Provinsi Papua.

i : UU No. 56 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat.

i : UU No. 13 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat Di Provinsi Papua Barat.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001

tentang Minyak dan Gas Bumi. Disahkan pada tanggal 23 Nopember 2001 LN No. 136 & TLN No. 4152).

t : Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi.

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 2002

UNDANG-UNDANG TAHUN 2002

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002

Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Dan Kabupaten Aceh Tamiang, Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Disahkan pada tanggal 10 April 2002 (LN No. 17 & TLN No. 4179).

t : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Disahkan pada tanggal 22 Pebruari 2007.

i : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Disahkan pada tanggal 22 Pebruari 2007.

t : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Disahkan pada tanggal 25 September 2007.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Disahkan pada tanggal 25 September 2007.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002

Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Dan

Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah. Disahkan pada tanggal 10 April 2002 (LN No. 18 & TLN No. 4180).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002

Tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin Di Provinsi Sumatera Selatan. Disahkan pada tanggal 10 April 2002 (LN No. 19 & TLN No. 4181).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002

Tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara Di Provinsi Kalimantan Timur. Disahkan pada tanggal 10 April 2002 (LN No. 20 & TLN No. 4182).

i : Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002

Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud Di Provinsi Sulawesi Utara. Disahkan Pada Tanggal 10 April 2002 (LN No. 21 & TLN No. 4183).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002

Tentang Pembentukan Kabupaten Rote-Ndao Di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Disahkan Pada Tanggal 10 April 2002 (LN No. 23 & TLN No. 4185).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002

Tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah. Disahkan Pada Tanggal 10 April 2002 (LN No. 23 & TLN No. 4185).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002

Tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa Dan Kota Palopo Di Provinsi Sulawesi Selatan. Disahkan pada tanggal 10 April 2002 (LN No. 24 & TLN No. 4186).

i : Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2005 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Luwu Dari Wilayah Kota Palopo Ke Wilayah Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2005 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Luwu Dari Wilayah Kota Palopo Ke Wilayah Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002

Tentang Pembentukan Kota Pariaman Di Provinsi Sumatera Barat. Disahkan Pada Tanggal 10 April 2002 (LN No. 25 & TLN No. 4187).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002

tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Disahkan pada tanggal 10 April 2002 (LN No. 26 & TLN No. 4188).

t : Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Bima Dari Raba Wilayah Kota Bima Ke Kecamatan Woha Kabupaten Bima.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Bima Dari Raba Wilayah Kota Bima Ke Kecamatan Woha Kabupaten Bima.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002

Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi. Disahkan pada tanggal 29 Juli 2002 (LN No. 84 & TLN No. 4219).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002

Tentang Grasi. Disahkan pada tanggal 22 Oktober 2002 (LN No. 108 & TLN No. 4234).

u : UU No. 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002

Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Disahkan pada tanggal 25 Oktober 2002 (LN No. iii & TLN No. 4237).

t : Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau.

i : UU No. 31 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Lingga Di Provinsi Kepulauan Riau.

i : UU No. 33 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas Di Provinsi Kepulauan Riau.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002

Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni,

Dan Kabupaten Teluk Wondama Di Provinsi Papua. Disahkan pada tanggal 11 Desember 2002 (LN No. 129 & TLN No. 4245).

i : UU No. 19 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Raya Di Provinsi Papua.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Yapen Waropen Menjadi Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua.

i : UU No. 13 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat Di Provinsi Papua Barat.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Buton Utara, Dan Kabupaten Sumba Barat Daya.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002

Tentang Pembentukan Kota Banjar Di Provinsi Jawa Barat. Disahkan Pada Tanggal 11 Desember 2002 (LN No. 130 & TLN No. 4246).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002

Tentang Bangunan Gedung. Disahkan Pada Tanggal 16 Desember 2002 (LN No. 134 & TLN No. 4247).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Disahkan Pada Tanggal 24 Desember 2002 (LN No. 137 & TLN No. 4250).

Pasal 53 & 62:

c : UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 2003

UNDANG-UNDANG TAHUN 2003

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003

Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, Dan Kota Tidore Kepulauan Di Provinsi Maluku Utara. Disahkan pada tanggal 25 Pebruari 2003 (LN No. 21 & TLN No. 4264).

i : UU No. 53 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai Di Provinsi Maluku Utara.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Buton Utara, Dan Kabupaten Sumba Barat Daya.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003

Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu Dan Kabupaten Balangan Di Provinsi Kalimantan Selatan. Disahkan pada tanggal 25 Pebruari 2003 (LN No. 22 & TLN No. 4265).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003

Tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, Dan Kabupaten Kaur Di Provinsi Bengkulu. Disahkan pada tanggal 25 Pebruari 2003. (LN No. 23 & TLN No. 4266)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003

Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara. Disahkan pada tanggal 25 Pebruari 2003 (LN No. 24 & TLN No. 4267).

i : Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari Menjadi Kabupaten Konawe.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003

Tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Dan Kabupaten Belitung Timur Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Disahkan Pada Tanggal 25 Pebruari 2003 (LN No. 25 & TLN No. 4268).

t : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah Di Provinsi Bangka Belitung. Disahkan Pada Tanggal 25 September 2007. Disahkan pada tanggal 25 September 2007.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah Di Provinsi Bangka Belitung. Disahkan Pada Tanggal 25 September 2007.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2007 Tentang Perubahan Batas Daerah Kota Pangkalpinang Dengan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Di Desa Selindung. Disahkan pada tanggal 10 Desember 2007.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003

Tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango Dan Kabupaten Pohuwato Di Provinsi Gorontalo. Disahkan pada tanggal 25 Pebruari 2003 (LN No. 26 & TLN No. 4269).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003

Tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur Dan Kabupaten Mamuju Utara Di Provinsi Sulawesi Selatan. Disahkan Pada Tanggal 25 Pebruari 2003 (LN No. 27 & TLN No. 4270).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003

Tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat Di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Disahkan Pada Tanggal 25 Pebruari 2003 (LN No. 28 & TLN No. 4271).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003

Tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, Dan Kabupaten Humbang Hasundutan Di Provinsi Sumatera Utara. Disahkan Pada Tanggal 25 Pebruari 2003 (LN No. 29 & TLN No. 4272).

t : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Pakpak Bharat Di Provinsi Sumatera Utara

i : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Pakpak Bharat Di Provinsi Sumatera Utara

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003

Tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan Dan Kota Tomohon Di Provinsi Sulawesi Utara. Disahkan Pada Tanggal 25 Pebruari 2003 (LN No. 30 & TLN No. 4273).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam. Disahkan Pada Tanggal 25 Pebruari 2003 (LN No. 31 & TLN No. 4274).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003

Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Disahkan pada tanggal 11 Maret 2003 (LN No. 37 & TLN No. 4287).

i : UU No. 29 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, Dan Kabupaten Kolaka Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara.

i : UU No. 30 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat Di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

i : UU No. 31 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Lingga Di Provinsi Kepulauan Riau.

i : UU No. 32 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una Di Provinsi Sulawesi Tengah.

i : UU No. 33 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara Di Provinsi Sulawesi Utara.

i : UU No. 34 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Melawi Dan Kabupaten Sekadau Di Provinsi Kalimantan Barat.

i : UU No. 35 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Supiori Di Provinsi Papua.

i : UU No. 36 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Samosir Dan Kabupaten Serdang Bedagai Di Provinsi Sumatera Utara.

i : UU No. 37 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Dan Kabupaten Ogan Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan.

i : UU No. 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Dan Kabupaten Pasaman Barat Di Provinsi Sumatera Barat.

i : UU No. 39 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Lebong Dan Kabupaten Kepahiang Di Provinsi Bengkulu.

i : UU No. 40 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, Dan Kabupaten Kepulauan Aru Di Provinsi Maluku.

i : UU No. 41 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

u : PERPU No. 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Disahkan pada tanggal 2 April 2004.

i : Undang--Undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat. Disahkan pada tanggal 5 Oktober 2004.

i : Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

i : UU No. 1 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang Di Provinsi Sumatera Selatan.

i : UU No. 2 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

i : UU No. 3 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

i : UU No. 4 Tahun 2007 Tentangpembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara.

i : UU No. 5 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara Di Provinsi Sumatera Utara.

i : UU No. 6 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara Di Provinsi Kalimantan Barat.

i : UU No. 7 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

i : UU No. 8 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Subulussalam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

i : UU No. 9 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara Di Provinsi Sulawesi Utara.

i : UU No. 10 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Di Provinsi Sulawesi Utara.

i : UU No. 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara Di Provinsi Gorontalo.

i : UU No. 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat Di Provinsi Jawa Barat.

i : UU No. 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara.

i : UU No. 14 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara.

i : UU No. 15 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Di Provinsi Sulawesi Utara.

i : UU No. 16 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

i : UU No. 19 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Raya Di Provinsi Papua.

i : UU No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

i : UU No. 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku.

i : UU No. 32 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Serang Di Provinsi Banten.

i : UU No. 33 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran Di Provinsi Lampung.

i : UU No. 34 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung Di Provinsi Kalimantan Timur.

i : UU No. 35 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya Di Provinsi Kalimantan Barat.

i : UU No. 36 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

i : UU No. 37 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara Di Provinsi Sumatera Utara.

i : UU No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Di Provinsi Sumatera Utara.

i : UU No. 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Tengah Di Provinsi Papua.

i : UU No. 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Yalimo Di Provinsi Papua.

i : UU No. 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya Di Provinsi Papua.

i : UU No. 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Nduga Di Provinsi Papua.

i : UU No. 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Puncak Di Provinsi Papua.

i : UU No. 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Dogiyai Di Provinsi Papua.

c : UU No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Disahkan pada tanggal 31 Maret 2008.

tbl : UU No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Disahkan pada tanggal 31 Maret 2008.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara. Disahkan pada tanggal 5 April 2003 LN No. 47 & TLN No. 4286.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Penyampaian Rencana Dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak. Disahkan pada tanggal 5 januari 2004.

i : UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Disahkan pada tanggal 14 Januari 2004.

i : UU No. 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Disahkan pada tanggal 22 September 2004.

i : UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahn Daerah. Disahkan pada tanggal 15 Oktober 2004.

i : UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Disahkan pada tanggal 15 Oktober 2004.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.

i : KEPPRES Nomor 17 Tahun 2007 tentang Tim Penertiban Barang Milik Negara. Disahkan pada tanggal 7 Agustus 2007.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam. Disahkan pada tanggal 20 Agustus 2007.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Karimun. Disahkan pada tanggal 20 Agustus 2007.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Reforma Agraria Nasional. Disahkan pada tanggal 24 September 2007.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Melalui Kegiatan Sertipikasi

Hak Atas Tanah Untuk Peningkatan Akses Permodalan. Disahkan pada tanggl 10 Maret 2008.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Melalui Kegiatan Sertipikasi Hak Atas Tanah Untuk Peningkatan Akses Permodalan. Disahkan pada tanggal 26 September 2008.

i : KEPPRES Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas KEPPRES Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Tim Penertiban Barang Milik Negara.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelesaian Kerugian Negara Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Auditor Di Lingkungan.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Unit Layanan Pengadaan BarangTahunJasa Pemerintah Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003

Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Disahkan pada tanggal 31 Juli 2003 (LN No. 92 & TLN No. 4310).

i : UU No. 29 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, Dan Kabupaten Kolaka Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara.

i : UU No. 30 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat Di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

i : UU No. 31 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Lingga Di Provinsi Kepulauan Riau.

i : UU No. 32 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una Di Provinsi Sulawesi Tengah.

i : UU No. 33 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara Di Provinsi Sulawesi Utara.

i : UU No. 34 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Melawi Dan Kabupaten Sekadau Di Provinsi Kalimantan Barat.

i : UU No. 35 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Supiori Di Provinsi Papua.

i : UU No. 36 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Samosir Dan Kabupaten Serdang Bedagai Di Provinsi Sumatera Utara.

i : UU No. 37 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Dan Kabupaten Ogan Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan.

i : UU No. 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Dan Kabupaten Pasaman Barat Di Provinsi Sumatera Barat.

i : UU No. 39 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Lebong Dan Kabupaten Kepahiang Di Provinsi Bengkulu.

i : UU No. 40 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, Dan Kabupaten Kepulauan Aru Di Provinsi Maluku.

i : UU No. 41 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

i : UU No. 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat.

i : UU No. 1 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang Di Provinsi Sumatera Selatan.

i : UU No. 2 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

i : UU No. 3 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

i : UU No. 4 Tahun 2007 Tentangpembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara.

i : UU No. 5 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara Di Provinsi Sumatera Utara.

i : UU No. 6 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara Di Provinsi Kalimantan Barat.

i : UU No. 7 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

i : UU No. 8 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Subulussalam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

i : UU No. 9 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara Di Provinsi Sulawesi Utara.

i : UU No. 10 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Di Provinsi Sulawesi Utara.

i : UU No. 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara Di Provinsi Gorontalo.

i : UU No. 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat Di Provinsi Jawa Barat.

i : UU No. 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara.

i : UU No. 14 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara.

i : UU No. 15 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Di Provinsi Sulawesi Utara.

i : UU No. 16 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

i : UU No. 19 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Raya Di Provinsi Papua.

i : UU No. 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku.

i : UU No. 32 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Serang Di Provinsi Banten.

i : UU No. 33 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran Di Provinsi Lampung.

i : UU No. 34 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung Di Provinsi Kalimantan Timur.

i : UU No. 35 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya Di Provinsi Kalimantan Barat.

i : UU No. 36 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

i : UU No. 37 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara Di Provinsi Sumatera Utara.

i : UU No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Di Provinsi Sumatera Utara.

i : UU No. 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Tengah Di Provinsi Papua.

i : UU No. 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Yalimo Di Provinsi Papua.

i : UU No. 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya Di Provinsi Papua.

i : UU No. 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Nduga Di Provinsi Papua.

i : UU No. 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Dogiyai Di Provinsi Papua.

i : UU No. 22 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Di Provinsi Sumatera Utara.

i : UU No. 23 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara Di Provinsi Sumatera Utara.

i : UU No. 24 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah Di Provinsi Bengkulu.

i : UU No. 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh.

i : UU No. 26 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara Di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

i : UU No. 27 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Sigi Di Provinsi Sulawesi Tengah.

i : UU No. 28 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara Di Provinsi Sulawesi Selatan.

i : UU No. 29 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Di Provinsi Sulawesi Utara.

i : UU No. 30 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Di Provinsi Sulawesi Utara.

i : UU No. 31 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya Di Provinsi Maluku.

i : UU No. 32 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan Di Provinsi Maluku

i : UU No. 33 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas Di Provinsi Kepulauan Riau.

i : UU No. 45 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara Di Provinsi Sumatera Utara.

i : UU No. 46 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat Di Provinsi Sumatera Utara.

i : UU No. 47 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli Di Provinsi Sumatera Utara.

i : UU No. 50 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat Di Provinsi Lampung.

i : UU No. 51 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten.

i : UU No. 52 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

i : UU No. 53 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai Di Provinsi Maluku Utara.

i : UU No. 54 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya Di Provinsi Papua.

i : UU No. 55 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Deiyai Di Provinsi Papua.

i : UU No. 56 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat.

i : UU No. 12 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti Di Provinsi Riau.

i : UU No. 13 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat Di Provinsi Papua Barat.

c : UU No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

tbl : UU No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003

Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Disahkan pada tanggal 31 Juli 2009 (LN No. 93 & TLN No. 4311).

i : UU No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

c : UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

tbl : UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi. Disahkan pada tanggal 13 Agustus 2003 (LN No. 98 & TLN No. 4315).

t : UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

i : UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.

tmb : UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.

u : UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003

tentang Panas Bumi. Disahkan pada tanggal 22 Oktober 2003 (LN No. 115 & TLN No. 4327).

t : UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003

Tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, Dan Kabupaten Kolaka Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara. Disahkan Pada Tanggal 18 Desember 2003 (LN No. 144 & TLN No. 4339).

t : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana Di Provinsisulawesi Tenggara.

i : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana Di Provinsisulawesi Tenggara.

t : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir Di Provinsi Sumatera Utara.

i : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir Di Provinsi Sumatera Utara.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003

Tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat Di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Disahkan Pada Tanggal 18 Desember 2003 (LN No. 145 & TLN No. 4340).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003

Tentang Pembentukan Kabupaten Lingga Di Provinsi Kepulauan Riau. Disahkan Pada Tanggal 18 Desember 2003 (LN No. 146 & TLN No. 4341).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003

Tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una Di Provinsi Sulawesi Tengah. Disahkan Pada Tanggal 18 Desember 2003 (LN No. 147 & TLN No. 4342).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003

Tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara Di Provinsi Sulawesi Utara. Disahkan Pada Tanggal 18 Desember 2003 (LN No. 148 & TLN No. 4343).

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003

Tentang Pembentukan Kabupaten Melawi Dan Kabupaten Sekadau Di Provinsi Kalimantan Barat. Disahkan Pada Tanggal 18 Desember 2003 (LN No. 149 & TLN No. 4344).

t : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi Di Provinsi Kalimantan Barat.

i : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi Di Provinsi Kalimantan Barat.

t : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau Di Provinsi Kalimantan Barat.

i : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau Di Provinsi Kalimantan Barat.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2003

Tentang Pembentukan Kabupaten Supiori Di Provinsi Papua. Disahkan Pada Tanggal 18 Desember 2003 (LN No. 150 & TLN No. 4345).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003

Tentang Pembentukan Kabupaten Samosir Dan Kabupaten Serdang Bedagai Di Provinsi Sumatera Utara. Disahkan Pada Tanggal 18 Desember 2003 (LN No. 151 & TLN No. 4346).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003

Tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Dan Kabupaten Ogan Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan. Disahkan Pada Tanggal 18 Desember 2003 (LN No. 152 & TLN No. 4347).

t : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Di Provinsi Sumatera Selatan

i : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Di Provinsi Sumatera Selatan

t : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir Timur Di Provinsi Sumatera Selatan

i : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir Timur Di Provinsi Sumatera Selatan

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003

Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Dan Kabupaten Pasaman Barat Di Provinsi Sumatera Barat. Disahkan Pada Tanggal 18 Desember 2003 (LN No. 153 & TLN No. 4348).

t : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya Di Provinsi Sumatera Barat

i : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya Di Provinsi Sumatera Barat

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003

Tentang Pembentukan Kabupaten Lebong Dan Kabupaten Kepahiang Di Provinsi Bengkulu. Disahkan Pada Tanggal 18 Desember 2003 (LN No. 154 & TLn No. 4349).

t : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang Di Provinsi Bengkulu.

i : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang Di Provinsi Bengkulu.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003

Tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, Dan Kabupaten Kepulauan Aru Di Provinsi Maluku. Disahkan pada tanggal 18 Desember 2003 (LN No. 155 & TLN No. 4351).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003

Tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Disahkan Pada Tanggal 18 Desember 2003 (LN No. 156 & TLN No. 4351).

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh.

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 2004

UNDANG-UNDANG TAHUN 2004

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

tentang Perbendaharaan Negara. Disahkan pada tanggal 14 Januari 2004 (LN No. 5 & TLN No. 4355).

i : UU No. 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

i : UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Disahkan pasa tanggal 21 Mei 2007.

i : Peraturan Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Dan Pembiayaan Reforma Agraria Nasional. Disakan pada tanggal 21 Juni 2007.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Struktur Organisasi Badan Pengelolaan

Dan Pembiayaan Reforma Agraria Regional, Cabang Dan Ranting. Disakan pada tanggal 21 Juni 2007.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bagi Badan Pengelolaan Dan Pembiayaan Reforma Agraria Nasional. Disakan pada tanggal 21 Juni 2007.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah. Disahkan pada tanggal 16 Juli 2007.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah. Disahkan pada tanggal 16 Juli 2007.

i : KEPPRES Nomor 17 Tahun 2007 tentang Tim Penertiban Barang Milik Negara. Disahkan pada tanggal 7 Agustus 2007.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Reforma Agraria Nasional. Disakan pada tanggal 24 September 2007

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Melalui Kegiatan Sertipikasi Hak Atas Tanah Untuk Peningkatan Akses Permodalan. Disahkan pada tanggal 10 Maret 2008.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Disahkan pada tanggal 28 Agustus 2008.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Disahkan pada tanggal 28 Agustus 2008.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Usaha Mikro Dan

Kecil Melalui Kegiatan Sertipikasi Hak Atas Tanah Untuk Peningkatan Akses Permodalan. Disahkan pada tanggal 26 September 2008.

i : KEPPRES Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas KEPPRES Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Tim Penertiban Barang Milik Negara. Disahkan pada tanggal 25 Mei 2009.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Disahkan pada tanggal 22 Januari 2010.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar. Disahkan pada tanggal 1 Pebruari 2010.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelesaian Kerugian Negara Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Disahkan pada tanggal 21 September 2010.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Auditor Di Lingkungan.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004

Tentang Kekuasaan Kehakiman. Disahkan pada tanggal 15 Januari 2004 (LN No. 8 & TLN No. 4358).

i : UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

t : UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

c : UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

tbl : UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004

Tentang Sumber Daya Air. Disahkan pada tanggal 18 Maret 2004 (LN No. 32 & TLN No. 4377).

t : Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Air Tanah.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Air Tanah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Disahkan pada tanggal 29 Maret 2004 (LN No. 34 & TLN No. 4379).

Pasal 54

c : UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara. Disahkan pada tanggal 29 Maret 2004 (LN No. 35 & TLN No. 4380).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Disahkan pada tanggal 22 juni 2004 (LN No. 61 & TLN No. 4395).

i : UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahn Daerah.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Disahkan pada tanggal 16 Mei 2006.

i : UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Disahkan pada tanggal 1 Agustus 2006.

i : UU No. 1 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang Di Provinsi Sumatera Selatan. Disahkan pada tanggal 2 Januari 2007.

i : UU No. 2 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo Di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Disahkan pada tanggal 2 Januari 2007.

i : UU No. 3 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah Di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Disahkan pada tanggal 2 Januari 2007.

i : UU No. 4 Tahun 2007 Tentangpembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara. Disahkan pada tanggal 2 Januari 2007.

i : UU No. 5 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara Di Provinsi Sumatera Utara. Disahkan pada tanggal 2 Januari 2007.

i : UU No. 6 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara Di Provinsi Kalimantan Barat. Disahkan pada tanggal 2 Januari 2007.

i : UU No. 7 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Disahkan pada tanggal 2 Januari 2007.

i : UU No. 8 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Subulussalam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Disahkan pada tanggal 2 Januari 2007.

i : UU No. 9 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara Di Provinsi Sulawesi Utara. Disahkan pada tanggal 2 Januari 2007.

i : UU No. 10 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Di Provinsi Sulawesi Utara. Disahkan pada tanggal 2 Januari 2007.

i : UU No. 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara Di Provinsi Gorontalo. Disahkan pada tanggal 2 Januari 2007.

i : UU No. 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat Di Provinsi Jawa Barat. Disahkan pada tanggal 2 Januari 2007.

i : UU No. 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara. Disahkan pada tanggal 2 Januari 2007.

i : UU No. 14 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara. Disahkan pada tanggal 2 Januari 2007.

i : UU No. 15 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Di Provinsi Sulawesi Utara. Disahkan pada tanggal 2 Januari 2007.

i : UU No. 19 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Raya Di Provinsi Papua. Disahkan pada tanggal 5 Pebruari 2007.

i : Peraturan Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Struktur Organisasi Badan Pengelolaan

Dan Pembiayaan Reforma Agraria Nasional. Disahkan pada tanggal 21 Juni 2007.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Dan Pembiayaan Reforma Agraria Regional, Cabang Dan Ranting. Disahkan pada tanggal 21 Juni 2007.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bagi Badan Pengelolaan Dan Pembiayaan Reforma Agraria Nasional. Disahkan pada tanggal 21 Juni 2007.

i : UU No. 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku. Disahkan pada tanggal 10 Agustus 2007.

i : UU No. 32 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Serang Di Provinsi Banten. Disahkan pada tanggal 10 Agustus 2007.

i : UU No. 33 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran Di Provinsi Lampung. Disahkan pada tanggal 10 Agustus 2007.

i : UU No. 34 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung Di Provinsi Kalimantan Timur. Disahkan pada tanggal 10 Agustus 2007.

i : UU No. 35 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya Di Provinsi Kalimantan Barat. Disahkan pada tanggal 10 Agustus 2007.

i : UU No. 36 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur Di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Disahkan pada tanggal 10 Agustus 2007.

i : UU No. 37 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara Di Provinsi Sumatera Utara. Disahkan pada tanggal 10 Agustus 2007.

i : UU No. 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Tengah Di Provinsi Papua. Disahkan pada tanggal 4 Januari 2008.

i : UU No. 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Yalimo Di Provinsi Papua. Disahkan pada tanggal 4 Januari 2008.

i : UU No. 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya Di Provinsi Papua. Disahkan pada tanggal 4 Januari 2008.

i : UU No. 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Nduga Di Provinsi Papua. Disahkan pada tanggal 4 Januari 2008.

i : UU No. 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Puncak Di Provinsi Papua. Disahkan pada tanggal 4 Januari 2008.

i : UU No. 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Dogiyai Di Provinsi Papua. Disahkan pada tanggal 4 Januari 2008.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Subbagian, Seksi Dan Subbidang Dilingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Disahkan pada tanggal 25 juni 2008.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Subbagian Dan Seksi Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Uraian Tugas Urusan Dan Subseksi Pada Kantor Pertanahan. Disahkan pada tanggal 25 juni 2008.

c : UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Disahkan pada tanggal 12 Agustus 2011.

tbl : UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Disahkan pada tanggal 12 Agustus 2011.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004

tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Disahkan pada tanggal 19 Juli 2004 (LN No. 66 & TLN No. 4400).

i : UU No. 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat.

i : UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahn Daerah.

i : UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelesaian Kerugian Negara Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Auditor Di Lingkungan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004

tentang Perkebunan. Disahkan Pada Tanggal 11 Agustus 2004 (LN No. 85 & TLN No. 4411)

t : Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik Lokasi.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik Lokasi.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar. Disahkan pada tanggal 1 Pebruari 2010.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar. Disahkan pada tanggal 14 juli 2011

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang. Disahkan Pada Tanggal 13 Agustus 2004 (LN No. 67 & TLN No. 4401).

i : Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan. Disahkan pada tanggal 18 Oktober 2004.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan. Disahkan pada tanggal 18 Oktober 2004.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan. Disahkan pada tanggal 4 Pebruari 2008.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan. Disahkan pada tanggal 16 Desember 2008.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar. Disahkan pada tanggal14 juli 2011.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004

Tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Disahkan pada tanggal 13 Agustus 2004 (LN No. 87 & TLN No. 4413)..

c : UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**.**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004

Tentang Komisi Yudisial. Disahkan pada tanggal 13 Agustus 2004 (LN No. 89 & TLN No. 4415)

u : UU No. 18 Tahun 2011 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004

Tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Disahkan pada tanggal 22 September 2004 (LN No. 96 & TLN No. 4420).

u : PERPU Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

t : UU No. 7 Tahun 2009 Tentang Penetapan PERPU Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang.

i : UU No. 7 Tahun 2009 Tentang Penetapan PERPU Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Disahkan pada tanggal 5 Oktober 2004. (LN No. 104 & TLN No. 4421)

t : Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Melalui Kegiatan Sertipikasi Hak Atas Tanah Untuk Peningkatan Akses Permodalan.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Melalui Kegiatan Sertipikasi Hak Atas Tanah Untuk Peningkatan Akses Permodalan.

i : KEPPRES Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional.

Undang--Undang Nomor 26 Tahun 2004

Tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat. Disahkan Pada Tanggal 5 Oktober 2004 (LN No. 105 & TLN No. 4422).

t : Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004

Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Disahkan pada tanggal 6 Oktober 2004 (LN No. 114 & TLN No. 4429)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Disahkan pada tanggal 6 Oktober 2004 (LN No. 115 & TLN No. 4431)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

tentang Jabatan Notaris. Disahkan pada tanggal 6 Oktober 2004. (LN No. 117 & TLN No. 4432)

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004

Tentang Perikanan. Disahkan pada tanggal 6 Oktober 2004. (LN No. 118 & TLN No. 4433).

t : Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumber Daya Ikan.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumber Daya Ikan.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 200820Tentang Penyelenggaraan Penelitian Dan Pengembangan Perikanan.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 200820Tentang Penyelenggaraan Penelitian Dan Pengembangan Perikanan.

t : UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

u : UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah. Disahkan pada tanggal 15 Oktober 2004 (LN No. 125 & TLN No. 4437).

i : Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2004 tentang Pemindahann Ibukota Kabupaten Kepulauan Riau dari Wilayah Kota Tanjung Pinang ke Bandar Seri Bentan di Wilayah Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Kepulauan Riau. Disahkan pada tanggal 18 Oktober 2004.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok Dari Wilayah Kota Solok Ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) Di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok. Disahkan pada tanggal 18 Oktober 2004.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota Dari Wilayah Kota Payakumbuh Ke Sarilamak Di Wilayah Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota. Disahkan pada tanggal 18 Oktober 2004.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan. Disahkan pada tanggal 18 Oktober 2004.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan. Disahkan pada tanggal 18 Oktober 2004.

i : Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Perubahan Kelima Atas KEPPRES Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Disahkan pada tanggal 31 Januari 2005.

i : Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Perubahan Keenam Atas KEPPRES Nomor 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen. . Disahkan pada tanggal 31 Januari 2005.

u : PERPU No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Disahkan pada tanggal 27 April 2005.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disahkan pada tanggal 13 Juni 2005.

u : UU No. 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan PERPU Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang. Disahkan pada tanggal 19 Oktober 2005.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2005 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Musi Rawas Dari Wilayah Kota Lubuk Linggau Ke Wilayah Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas. Disahkan pada tanggal 11 Nopember 2005.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Disahkan pada tanggal 28 Desember 2005.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Disahkan pada tanggal 28 Desember 2005.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Disahkan pada tanggal 30 Desember 2005.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Disahkan pada tanggal 30 Desember 2005.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan. Disahkan pada tanggal 30 Desember 2005.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan. Disahkan pada tanggal 30 Desember 2005.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar. Disahkan pada tanggal 30 Desember 2005.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar. Disahkan pada tanggal 30 Desember 2005.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Disahkan pada tanggal 30 Desember 2005.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Disahkan pada tanggal 30 Desember 2005.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2005 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Luwu Dari Wilayah Kota Palopo Ke Wilayah Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu. Disahkan pada tanggal 30 Desember 2005.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Kupang Dari Wilayah Kota Kupang Ke Wilayah Oelamasi Kabupaten Kupang. Disahkan pada tanggal 3 Pebruari 2006.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. Disahkan pada tanggal 23 Pebruari 2006.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. Disahkan pada tanggal 23 Pebruari 2006.

i : Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional. Disahkan pada tanggal 11 April 2006.

i : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau Di Provinsi Kalimantan Barat. Disahkan pada tanggal 1 Juni 2006.

i : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang Di Provinsi Bengkulu. Disahkan pada tanggal 1 Juni 2006.

i : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana Di Provinsisulawesi Tenggara. Disahkan pada tanggal 1 Juni 2006.

i : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir Di Provinsi Sumatera Utara. Disahkan pada tanggal 1 Juni 2006.

i : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma Di Provinsi Bengkulu. Disahkan pada tanggal 1 Juni 2006.

i : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Disahkan pada tanggal 1 Juni 2006.

i : Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Disahkan pada tanggal 1 Agustus 2006.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2006 Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Ngada Dari Mbay Kecamatan Aesesa Ke Bajawa. Disahkan pada tanggal 8 Nopember 2006.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. Disahkan pada tanggal 29 Nopember 2006.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Disahkan pada tanggal 16 Mei 2006.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan. Disahkan pada tanggal 16 Mei 2006.

i : UU No. 1 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang Di Provinsi Sumatera Selatan. Disahkan pada tanggal 2 Januari 2007.

i : UU No. 2 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo Di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Disahkan pada tanggal 2 Januari 2007

i : UU No. 3 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah Di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Disahkan pada tanggal 2 Januari 2007

i : UU No. 4 Tahun 2007 Tentangpembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara. Disahkan pada tanggal 2 Januari 2007

i : UU No. 5 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara Di Provinsi Sumatera Utara. Disahkan pada tanggal 2 Januari 2007

i : UU No. 6 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara Di Provinsi Kalimantan Barat. Disahkan pada tanggal 2 Januari 2007

i : UU No. 7 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Disahkan pada tanggal 2 Januari 2007

i : UU No. 8 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Subulussalam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Disahkan pada tanggal 2 Januari 2007

i : UU No. 9 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara Di Provinsi Sulawesi Utara. Disahkan pada tanggal 2 Januari 2007

i : UU No. 10 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Di Provinsi Sulawesi Utara.

i : UU No. 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara Di Provinsi Gorontalo. Disahkan pada tanggal 2 Januari 2007

i : UU No. 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat Di Provinsi Jawa Barat. Disahkan pada tanggal 2 Januari 2007

i : UU No. 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara.

i : UU No. 14 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara.

i : UU No. 15 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Di Provinsi Sulawesi Utara.

i : UU No. 16 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya Di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Disahkan pada tanggal 2 Januari 2007.

i : UU No. 19 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Raya Di Provinsi Papua. Disahkan pada tanggal 5 Pebruari 2007.

i : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Disahkan pada tanggal 22 Pebruari 2007.

i : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Pakpak Bharat Di Provinsi Sumatera Utara. Disahkan pada tanggal 22 Pebruari 2007.

i : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya Di Provinsi Sumatera Barat. Disahkan pada tanggal 22 Pebruari 2007.

i : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Di Provinsi Sumatera Selatan. Disahkan pada tanggal 22 Pebruari 2007.

i : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir Timur Di Provinsi Sumatera Selatan. Disahkan pada tanggal 22 Pebruari 2007.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Perubahan Batas Wllayah Kota Tegal Dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah Di Muara Sungai Kaligangsa. Disahkan pada tanggal 23 Maret 2007.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Perubahan Batas Wllayah Kota Tegal Dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa

Tengah Di Muara Sungai Kaligangsa. Disahkan pada tanggal 23 Maret 2007.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat Menjadi Provinsi Papua Barat. Disahkan pada tanggal 23 Maret 2007.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat Menjadi Provinsi Papua Barat. Disahkan pada tanggal 23 Maret 2007.

i : UU No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Disahkan pada tanggal 19 April 2007.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Disahkan pada tanggal 21 Mei 2007.

i : Peraturan Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Dan Pembiayaan Reforma Agraria Nasional. Disahkan pada tanggal 21 Juni 2007.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Dan Pembiayaan Reforma Agraria Regional, Cabang Dan Ranting. Disahkan pada tanggal 21 Juni 2007

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bagi Badan Pengelolaan Dan Pembiayaan Reforma Agraria Nasional. Disahkan pada tanggal 21 Juni 2007.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Disahkan pada tanggal 9 Juli 2007.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Disahkan pada tanggal 9 Juli 2007.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah. Disahkan pada tanggal 23 Juli 2007.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah. Disahkan pada tanggal 23 Juli 2007.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam. Disahkan pada tanggal 23 Juli 2007.

i : UU No. 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku. Disahkan pada tanggal 10 Agustus 2007.

i : UU No. 32 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Serang Di Provinsi Banten. Disahkan pada tanggal 10 Agustus 2007.

i : UU No. 33 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran Di Provinsi Lampung. Disahkan pada tanggal 10 Agustus 2007.

i : UU No. 34 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung Di Provinsi Kalimantan Timur. Disahkan pada tanggal 10 Agustus 2007.

i : UU No. 35 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya Di Provinsi Kalimantan Barat. Disahkan pada tanggal 10 Agustus 2007.

i : UU No. 36 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur Di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Disahkan pada tanggal 10 Agustus 2007.

i : UU No. 37 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara Di Provinsi Sumatera Utara. Disahkan pada tanggal 10 Agustus 2007.

i : UU No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Di Provinsi Sumatera Utara. Disahkan pada tanggal 10 Agustus 2007.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Karimun. Disahkan pada tanggal 20 agustus 2007.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. Disahkan pada tanggal 22 Agustus 2007.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. Disahkan pada tanggal 22 Agustus 2007.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah. Disahkan pada tanggal 22 Agustus 2007.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah. Disahkan pada tanggal 22 Agustus 2007.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Disahkan pada tanggal 25 September 2007.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah Di Provinsi Bangka Belitung. Disahkan Pada Tanggal 25 September 2007.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2007 Tentang Perubahan Batas Daerah Kota Pangkal Pinang Dengan Kabupaten Bangka Tengah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Di Desa Selindung. Disahkan pada tanggal 10 Desember 2007.

i : UU No. 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Tengah Di Provinsi Papua. Disahkan pada tanggal 4 Januari 2008.

i : UU No. 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Yalimo Di Provinsi Papua. Disahkan pada tanggal 4 Januari 2008.

i : UU No. 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya Di Provinsi Papua.

i : UU No. 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Nduga Di Provinsi Papua.

i : UU No. 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Puncak Di Provinsi Papua.

i : UU No. 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Dogiyai Di Provinsi Papua. Disahkan pada tanggal 4 Januari 2008.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pembentukkan Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur. Disahkan pada tanggal 31 Januari 2008.

t : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Disahkan pada tanggal 4 Pebruari 2008.

i : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Disahkan pada tanggal 4 Pebruari 2008.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Disahkan pada tanggal 4 Pebruari 2008.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Disahkan pada tanggal 4 Pebruari 2008.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Malang Dari Wilayah Kota Malang Ke Wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Disahkan pada tanggal 28 Pebruari 2008.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan. Disahkan pada tanggal 28 Pebruari 2008.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan. Disahkan pada tanggal 28 Pebruari 2008.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Melalui Kegiatan Sertipikasi Hak Atas Tanah Untuk Peningkatan Akses Permodalan. Disahkan pada tanggal 10 Maret 2008.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Bima Dari Raba Wilayah Kota Bima Ke Kecamatan Woha Kabupaten Bima. Disahkan pada tanggal 11 April 2008.

u : UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Disahkan pada tanggal 28 April 2008.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Yapen Waropen Menjadi Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua. Disahkan pada tanggal 19 Mei 2008.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Subbagian, Seksi Dan Subbidang Dilingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Disahkan pada tanggal 25 Juni 2008.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Subbagian Dan Seksi Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Uraian Tugas

Urusan Dan Subseksi Pada Kantor Pertanahan. Disahkan pada tanggal 25 Juni 2008.

i : UU No. 22 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Di Provinsi Sumatera Utara. Disahkan pada tanggal 21 Juli 2008.

i : UU No. 23 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara Di Provinsi Sumatera Utara.

i : UU No. 24 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah Di Provinsi Bengkulu.

i : UU No. 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh. Disahkan pada tanggal 21 Juli 2008.

i : UU No. 26 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara Di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

i : UU No. 27 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Sigi Di Provinsi Sulawesi Tengah.

i : UU No. 28 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara Di Provinsi Sulawesi Selatan.

i : UU No. 29 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Di Provinsi Sulawesi Utara. Disahkan pada tanggal 21 Juli 2008.

i : UU No. 30 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Di Provinsi Sulawesi Utara. Disahkan pada tanggal 21 Juli 2008.

i : UU No. 31 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya Di Provinsi Maluku.

i : UU No. 32 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan Di Provinsi Maluku

i : UU No. 33 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas Di Provinsi Kepulauan Riau.

i : UU No. 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten

Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam. Disahkan pada tanggal 21 Juli 2008.

i : UU No. 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang. Disahkan pada tanggal 25 Juli 2008.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan. Disahkan pada tanggal 11 Agustus 2008.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan. Disahkan pada tanggal 11 Agustus 2008.

i : Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 Tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur. Disahkan pada tanggal 12 Agustus 2008.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Melalui Kegiatan Sertipikasi Hak Atas Tanah Untuk Peningkatan Akses Permodalan. Disahkan pada tanggal 26 September 2008.

i : UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Disahkan pada tanggal 7 Oktober 2008.

i : UU No. 45 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara Di Provinsi Sumatera Utara. Disahkan pada tanggal 26 Nopember 2008.

i : UU No. 46 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat Di Provinsi Sumatera Utara.

i : UU No. 47 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli Di Provinsi Sumatera Utara.

i : UU No. 50 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat Di Provinsi Lampung.

i : UU No. 51 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten.

i : UU No. 52 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

i : UU No. 53 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai Di Provinsi Maluku Utara.

i : UU No. 54 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya Di Provinsi Papua.

i : UU No. 55 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Deiyai Di Provinsi Papua. Disahkan pada tanggal 26 Nopember 2008.

i : UU No. 56 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat. Disahkan pada tanggal 26 Nopember 2008.

i : UU No. 12 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti Di Provinsi Riau. Disahkan pada tanggal 16 Januari 2009.

i : UU No. 13 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat Di Provinsi Papua Barat. Disahkan pada tanggal 16 Januari 2009.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara. Disahkan pada tanggal 3 Pebruari 2009.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara. Disahkan pada tanggal 3 Pebruari 2009.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Tengah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Disahkan pada tanggal 3 Pebruari 2009.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur. Disahkan pada tanggal 3 Pebruari 2009.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur. Disahkan pada tanggal 3 Pebruari 2009.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu. Disahkan pada tanggal 3 Pebruari 2009.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau. Disahkan pada tanggal 3 Pebruari 2009.

i : KEPPRES Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional. Disahkan pada tanggal 27 Pebruari 2009.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Surabaya Di Provinsi Jawa Timur. Disahkan pada tanggal 6 Maret 2009.

i : UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Disahkan pada tanggal 18 Juli 2009.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Disahkan pada tanggal 22 Januari 2010.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar. Disahkan pada tanggal 1 Pebruari 2010.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Khusus. Disahkan pada tanggal 5 April 2010.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Khusus. Disahkan pada tanggal 5 April 2010.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah. Disahkan pada tanggal 5 April 2010.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. Disahkan pada tanggal 5 April 2010.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh. Disahkan pada tanggal 5 April 2010.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh. Disahkan pada tanggal 5 April 2010.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Buton Utara, Dan Kabupaten Sumba Barat Daya. Disahkan pada tanggal 28 Juni 2010.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pemindahan Pusat Pemerintahan Kota Padang dari Wilayah Kecamatan Padang Barat ke Wilayah Kecamatan Kototangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Disahkan pada tanggal 18 April 2011.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Kerinci dari Wilayah Kota Sungaipenuh ke Wilayah Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi. Disahkan pada tanggal 18 April 2011.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar. Disahkan pada tanggal 14 Juli 2011.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Maluku Tenggara Dari Wilayah Kota Tual Ke Wilayah Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku. Disahkan pada tanggal 20 Juli 2011.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Disahkan pada tanggal 15 oktober 2004 (LN No. 126 & TLN No. 4438).

i : Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2004 tentang Pemindahann Ibukota Kabupaten Kepulauan Riau dari Wilayah Kota Tanjung Pinang ke Bandar Seri Bentan di Wilayah Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Kepulauan Riau. Disahkan pada tanggal 18 Oktober 2004.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok Dari Wilayah Kota Solok Ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) Di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok. Disahkan pada tanggal 18 Oktober 2004.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota Dari Wilayah Kota Payakumbuh Ke Sarilamak Di Wilayah Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota. Disahkan pada tanggal 18 Oktober 2004.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan. Disahkan pada tanggal 18 Oktober 2004.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan. Disahkan pada tanggal 18 Oktober 2004.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disahkan pada tanggal 13 Juni 2005.

i : Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Disahkan pada tanggal 1 Agustus 2006.

i : UU No. 1 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang Di Provinsi Sumatera Selatan. Disahkan pada tanggal 2 Januari 2007.

i : UU No. 2 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo Di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Disahkan pada tanggal 2 Januari 2007

i : UU No. 3 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah Di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Disahkan pada tanggal 2 Januari 2007

i : UU No. 4 Tahun 2007 Tentangpembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara. Disahkan pada tanggal 2 Januari 2007

i : UU No. 5 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara Di Provinsi Sumatera Utara. Disahkan pada tanggal 2 Januari 2007

i : UU No. 6 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara Di Provinsi Kalimantan Barat. Disahkan pada tanggal 2 Januari 2007

i : UU No. 7 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Disahkan pada tanggal 2 Januari 2007

i : UU No. 8 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Subulussalam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Disahkan pada tanggal 2 Januari 2007

i : UU No. 9 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara Di Provinsi Sulawesi Utara. Disahkan pada tanggal 2 Januari 2007

i : UU No. 10 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Di Provinsi Sulawesi Utara.

i : UU No. 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara Di Provinsi Gorontalo. Disahkan pada tanggal 2 Januari 2007

i : UU No. 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat Di Provinsi Jawa Barat. Disahkan pada tanggal 2 Januari 2007

i : UU No. 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara.

i : UU No. 14 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara.

i : UU No. 15 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Di Provinsi Sulawesi Utara.

i : UU No. 16 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya Di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Disahkan pada tanggal 2 Januari 2007.

i : UU No. 19 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Raya Di Provinsi Papua. Disahkan pada tanggal 5 Pebruari 2007.

i : UU No. 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku. Disahkan pada tanggal 10 Agustus 2007.

i : UU No. 32 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Serang Di Provinsi Banten. Disahkan pada tanggal 10 Agustus 2007.

i : UU No. 33 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran Di Provinsi Lampung. Disahkan pada tanggal 10 Agustus 2007.

i : UU No. 34 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung Di Provinsi Kalimantan Timur. Disahkan pada tanggal 10 Agustus 2007.

i : UU No. 35 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya Di Provinsi Kalimantan Barat. Disahkan pada tanggal 10 Agustus 2007.

i : UU No. 36 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur Di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Disahkan pada tanggal 10 Agustus 2007.

i : UU No. 37 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara Di Provinsi Sumatera Utara. Disahkan pada tanggal 10 Agustus 2007.

i : UU No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Di Provinsi Sumatera Utara. Disahkan pada tanggal 10 Agustus 2007.

i : UU No. 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Tengah Di Provinsi Papua. Disahkan pada tanggal 4 Januari 2008.

i : UU No. 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Yalimo Di Provinsi Papua. Disahkan pada tanggal 4 Januari 2008.

i : UU No. 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya Di Provinsi Papua.

i : UU No. 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Nduga Di Provinsi Papua.

i : UU No. 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Puncak Di Provinsi Papua.

i : UU No. 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Dogiyai Di Provinsi Papua. Disahkan pada tanggal 4 Januari 2008.

i : UU No. 22 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Di Provinsi Sumatera Utara. Disahkan pada tanggal 21 Juli 2008.

i : UU No. 23 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara Di Provinsi Sumatera Utara.

i : UU No. 24 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah Di Provinsi Bengkulu.

i : UU No. 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh. Disahkan pada tanggal 21 Juli 2008.

i : UU No. 26 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara Di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

i : UU No. 27 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Sigi Di Provinsi Sulawesi Tengah.

i : UU No. 28 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara Di Provinsi Sulawesi Selatan.

i : UU No. 29 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Di Provinsi Sulawesi Utara. Disahkan pada tanggal 21 Juli 2008.

i : UU No. 30 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Di Provinsi Sulawesi Utara. Disahkan pada tanggal 21 Juli 2008.

i : UU No. 31 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya Di Provinsi Maluku.

i : UU No. 33 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas Di Provinsi Kepulauan Riau.

i : UU No. 45 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara Di Provinsi Sumatera Utara.

i : UU No. 46 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat Di Provinsi Sumatera Utara.

i : UU No. 47 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli Di Provinsi Sumatera Utara.

i : UU No. 50 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat Di Provinsi Lampung.

i : UU No. 51 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten.

i : UU No. 52 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

i : UU No. 53 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai Di Provinsi Maluku Utara.

i : UU No. 54 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya Di Provinsi Papua.

i : UU No. 55 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Deiyai Di Provinsi Papua.

i : UU No. 56 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat.

i : UU No. 12 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti Di Provinsi Riau.

i : UU No. 13 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat Di Provinsi Papua Barat.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004

Tentang Jalan. Disahkan pada tanggal 18 Oktober 2004 (LN no. 132 & TLN No. 4444).

t : Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan.

i : KEPPRES Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Tim Nasional Persiapan Pembangunan Jembatan Selat Sunda.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Tentang Wakaf. Disahkan pada tanggal 27 Oktober 2004 (LN No. 159 & TLN No. 4459).

t : Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TAHUN 2004 (PERPU TAHUN 2004)

PERPU No. 1 Tahun 2004

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Disahkan pada tanggal 11 Maret 2004 (LN No. 29 & TLN No. 4374)

uu : UU No. 19 Tahun 2004 tentang Tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang. Disahkan Pada Tanggal 13 Agustus 2004.

PERPU No. 2 Tahun 2004

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. Disahkan pada tanggal 11 Maret 2004 (LN No. 29 & TLN No. 4374)

uu : UU No. 20 tahun 2004 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Disahkan pada tanggal 13 Agustus 2004.

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 2005

UNDANG-UNDANG TAHUN 2005

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang. Disahkan Pada Tanggal 19 Oktober 2005 (LN No. 108 & TLN No. 4548).

i : Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2005 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Musi Rawas Dari Wilayah Kota Lubuk Linggau Ke Wilayah Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2005 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Luwu Dari Wilayah Kota Palopo Ke Wilayah Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Kupang Dari Wilayah Kota Kupang Ke Wilayah Oelamasi Kabupaten Kupang. Disahkan pada tanggal 3 Pebruari 2006.

i : Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Disahkan pada tanggal 1 Agustus 2006.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2006 Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Ngada Dari Mbay Kecamatan Aesesa Ke Bajawa.

i : UU No. 2 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo Di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Disahkan pada tanggal 2 Januari 2007.

i : UU No. 3 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

i : UU No. 4 Tahun 2007 Tentangpembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara.

i : UU No. 5 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara Di Provinsi Sumatera Utara.

i : UU No. 6 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara Di Provinsi Kalimantan Barat.

i : UU No. 7 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

i : UU No. 8 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Subulussalam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

i : UU No. 9 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara Di Provinsi Sulawesi Utara.

i : UU No. 10 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Di Provinsi Sulawesi Utara.

i : UU No. 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara Di Provinsi Gorontalo.

i : UU No. 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat Di Provinsi Jawa Barat.

i : UU No. 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara.

i : UU No. 14 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara.

i : UU No. 15 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Di Provinsi Sulawesi Utara.

i : UU No. 16 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya Di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Disahkan pada tanggal 2 Januari 2007.

i : UU No. 19 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Raya Di Provinsi Papua. Disahkan pada tanggal 5 Pebruari 2007.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Perubahan Batas Wllayah Kota Tegal Dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah Di Muara Sungai Kaligangsa. Disahkan pada tanggal 23 Maret 2007.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat Menjadi Provinsi Papua Barat. Disahkan pada tanggal 23 Maret 2007.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat Menjadi Provinsi Papua Barat. Disahkan pada tanggal 23 Maret 2007.

i : UU No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Disahkan pada tanggal 19 April 2007.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana

Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Disahkan pada tanggal 21 Mei 2007.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah. Disahkan pada tanggal 23 Juli 2007.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah. Disahkan pada tanggal 23 Juli 2007.

i : UU No. 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku. Disahkan pada tanggal 10 Agustus 2007.

i : UU No. 32 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Serang Di Provinsi Banten.

i : UU No. 33 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran Di Provinsi Lampung.

i : UU No. 34 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung Di Provinsi Kalimantan Timur.

i : UU No. 35 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya Di Provinsi Kalimantan Barat.

i : UU No. 36 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

i : UU No. 37 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara Di Provinsi Sumatera Utara.

i : UU No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Di Provinsi Sumatera Utara. Disahkan pada tanggal 10 Agustus 2007.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. Disahkan pada tanggal 22 Agustus 2007.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. Disahkan pada tanggal 22 Agustus 2007.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah. Disahkan pada tanggal 22 Agustus 2007.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Disahkan pada tanggal 25 september 2007.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah Di Provinsi Bangka Belitung. Disahkan Pada Tanggal 25 September 2007. Disahkan pada tanggal 25 september 2007.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2007 Tentang Perubahan Batas Daerah Kota Pangkalpinang Dengan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Di Desa Selindung. Disahkan pada tanggal 10 Desember 2007.

i : UU No. 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Tengah Di Provinsi Papua. Disahkan pada tanggal 4 Januari 2008.

i : UU No. 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Yalimo Di Provinsi Papua. Disahkan pada tanggal 4 Januari 2008.

i : UU No. 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya Di Provinsi Papua. Disahkan pada tanggal 4 Januari 2008.

i : UU No. 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Nduga Di Provinsi Papua.

i : UU No. 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Puncak Di Provinsi Papua.

i : UU No. 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Dogiyai Di Provinsi Papua. Disahkan pada tanggal 4 Januari 2008.

i : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Disahkan pada tanggal 4 Pebruari 2008.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Disahkan pada tanggal 4 Pebruari 2008.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Disahkan pada tanggal 4 Pebruari 2008.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Malang Dari Wilayah Kota Malang Ke Wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Disahkan pada tanggal 28 Pebruari 2008.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan. Disahkan pada tanggal 28 Pebruari 2008.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Yapen Waropen Menjadi Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua. Disahkan pada tanggal 19 Mei 2008.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Subbagian, Seksi Dan Subbidang Dilingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Disahkan pada tanggal 25 Juni 2008.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Subbagian Dan Seksi Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Uraian Tugas Urusan Dan Subseksi Pada Kantor Pertanahan. pada tanggal 25 Juni 2008.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Surabaya Di Provinsi Jawa Timur. Disahkan pada tanggal 6 Maret 2008.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005

tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Disahkan pada tanggal 28 Oktober 2005 (LN No. 119 & TLN No. 4558)

i : UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TAHUN 2005 (PERPU TAHUN 2005)

PERPU No. 2 Tahun 2005

Tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Disahkan pada tanggal 16 Aprl 2005 (LN No. 35 & LN No. 4492)

PERPU No. 3 Tahun 2005

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Disahkan pada tanggal 27 april 2005 (LN No. 38 & TLN No. 4493).

uu : UU No. 8 tahun 2005 tentang Penetapan PERPU Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang. Disahkan Pada Tanggal 19 Oktober 2005.

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 2006

UNDANG-UNDANG TAHUN 2006

Undang Undang Nomor 10 Tahun 2006

Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Undang-Undang. Disahkan Pada Tanggal 20 Juli 2006 (LN No. 60 & TLN No. 4531).

c : UU No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006

Tentang Pemerintahan Aceh. Disahkan Pada Tanggal 1 Agustus 2006 (LN No. 62 & TLN No. 4633).

i : UU No. 7 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

i : UU No. 8 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Subulussalam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006

Tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Disahkan Pada Tanggal 30 Oktober 2006 (LN No. 85 & TLN No. 4654).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Disahkan pada tanggal 15 Nopember 2006 (LN No. 93 & TLN No. 4661).

i : Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Karimun.

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TAHUN 2006 (PERPU TAHUN 2006)

PERPU No. 1 Tahun 2006

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Undang-Undang. Disahkan pada tanggal 7 Maret 2006. (LN No 19 & TLN No. 4608)

uu : UU No. 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Undang-Undang. Disahkan Pada Tanggal 20 Juli 2006.

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 2007

UNDANG-UNDANG TAHUN 2007

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007

Tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang Di Provinsi Sumatera Selatan. Disahkan Pada Tanggal 2 Januari 2007 (LN No. 3 & TLN No. 4677).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007

Tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo Di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Disahkan Pada Tanggal 2 Januari 2007 (LN No. 4 & TLN No. 4678).

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Buton Utara, Dan Kabupaten Sumba Barat Daya.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007

Tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah Di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Disahkan Pada Tanggal 2 Januari 2007 (LN No. 5 & TLN No.4679).

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Tengah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Buton Utara, Dan Kabupaten Sumba Barat Daya.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007

Tentangpembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara. Disahkan Pada Tanggal 2 Januari 2007. (LN No. 6 & TLN No. 4680).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007

Tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara Di Provinsi Sumatera Utara. Disahkan Pada Tanggal 2 Januari 2007 (LN No. 7 & TLN No. 4681).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007

Tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara Di Provinsi Kalimantan Barat. Disahkan Pada Tanggal 2 Januari 2007 (LN No. 8 & TLN No. 4682).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007

Tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Disahkan Pada Tanggal 2 Januari 2007 (LN No. 9 & TLN No. 4683).

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007

Tentang Pembentukan Kota Subulussalam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Disahkan Pada Tanggal 2 Januari 2007 (LN No. 10 & TLN No. 4684).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007

Tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara Di Provinsi Sulawesi Utara. Disahkan Pada Tanggal 2 Januari 2007 (LN No. 11 & TLN No. 4685).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007

Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Di Provinsi Sulawesi Utara. Disahkan Pada Tanggal 2 Januari 2007 (LN No. 12 & TLN No. 4686).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007

Tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara Di Provinsi Gorontalo. Disahkan Pada Tanggal 2 Januari 2007 (LN No. 13 & TLN 4687).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007

Tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat Di Provinsi Jawa Barat. Disahkan Pada Tanggal 2 Januari 2007 (LN No. 14 & TLN No. 4688).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007

Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara. Disahkan Pada Tanggal 2 Januari 2007 (LN No. 13 & TLN No. 4689).

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Buton Utara, Dan Kabupaten Sumba Barat Daya.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007

Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara. Disahkan Pada Tanggal 2 Januari 2007 (LN No. 16 & TLN No. 4690).

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Buton Utara, Dan Kabupaten Sumba Barat Daya.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007

Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Di Provinsi Sulawesi Utara. Disahkan Pada Tanggal 2 Januari 2007 (LN No. 17 & TLN No. 4691).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007

Tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya Di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Disahkan Pada Tanggal 2 Januari 2007 (LN No. 18 & TLN No.4692).

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten

Nagekeo, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Buton Utara, Dan Kabupaten Sumba Barat Daya.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025. Disahkan pada tanggal 2 Januari 2007 (LN No. 33 & TLN No. 4700)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2007

Tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Raya Di Provinsi Papua. Disahkan Pada Tanggal 15 Maret 2007 (LN No. 44 & TLN No. 4709).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007

Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Disahkan pada tanggal 19 April 2007 (LN No. 59 & TLN No. 4721).

i : UU No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

i : UU No. 23 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara Di Provinsi Sumatera Utara.

i : UU No. 24 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah Di Provinsi Bengkulu.

i : UU No. 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh.

i : UU No. 26 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara Di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

i : UU No. 27 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Sigi Di Provinsi Sulawesi Tengah.

i : UU No. 28 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara Di Provinsi Sulawesi Selatan.

i : UU No. 29 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Di Provinsi Sulawesi Utara.

i : UU No. 30 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Di Provinsi Sulawesi Utara.

i : UU No. 31 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya Di Provinsi Maluku.

i : UU No. 32 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan Di Provinsi Maluku

i : UU No. 33 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas Di Provinsi Kepulauan Riau.

i : UU No. 45 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara Di Provinsi Sumatera Utara.

i : UU No. 46 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat Di Provinsi Sumatera Utara.

i : UU No. 47 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli Di Provinsi Sumatera Utara.

i : UU No. 50 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat Di Provinsi Lampung.

i : UU No. 51 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten.

i : UU No. 52 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

i : UU No. 53 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai Di Provinsi Maluku Utara.

i : UU No. 54 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya Di Provinsi Papua.

i : UU No. 55 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Deiyai Di Provinsi Papua.

i : UU No. 56 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat.

i : UU No. 12 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti Di Provinsi Riau.

i : UU No. 13 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat Di Provinsi Papua Barat.

c : UU No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

tbl : UU No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007

Tentang Perkeretaapian. Disahkan pada tanggal 25 April 2007 (N No.65 & TLN No. 4722)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007

Tentang Penanggulangan Bencana. Disahkan pada tanggal 26 April 2007 (LN No.66 & TLN No. 4723)

t : Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentangpendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana

i : Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentangpendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Penanganan Bencana Dan Pengembalian Hak-Hak Masyarakat Atas Aset Tanah Di Wilayah Bencana.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

tentang Penanaman Modal. Disahkan pada tanggal 26 April 2007 (LN No. 67 & TLN No. 4724).

t : Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

i : Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

t : UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus.

i : UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007

tentang Penataan Ruang. Disahkan pada tanggal 26 April 2007 (LN No. 68 & TLN No.4725).

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Disahkan pada tanggal 21 Mei 2007.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam. Disahkan pada tanggal 20 Agustus 2007.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Karimun. Disahkan pada tanggal 20 Agustus 2007.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Disahkan pada tanggal 10 Maret 2008.

i : Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 Tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur. Disahkan pada tanggal 12 Agustus 2008.

i : KEPPRES Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional. Disahkan pada tanggal 18 Maret 2009.

i : UU No. 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Disahkan pada tanggal 14 Oktober 2009.

i : KEPPRES Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Tim Nasional Persiapan Pembangunan Jembatan Selat Sunda. Disahkan pada tanggal 28 Desember 2009.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Disahkan pada tanggal 22 Januari 2010.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang penyelenggaraan Penataan Ruang. Disahkan pada tanggal 28 Januari 2010.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang penyelenggaraan Penataan Ruang. Disahkan pada tanggal 28 Januari 2010.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar. Disahkan pada tanggal 1 Pebruari 2010

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007

tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Disahkan pada tanggal 17 Juli 2007 (LN No. 84 & TLN No. 4739)

i : Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 Tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur.

i : KEPPRES Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007

Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan mum dan Tata Cara Perpajakan. Disahkan pada tanggal 17 Juli 2007 (LN No. 85 & TLN No.4740)

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007

tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disahkan pada tanggal 30 Juli 2007 (LN No. 93 & TLN No. 4744).

i : Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 Tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007

tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku. Pada tanggal 10 Agustus 2007 (LN No. 97 & TLN No. 4747).

t : Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Maluku Tenggara Dari Wilayah Kota Tual Ke Wilayah Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007

Tentang Pembentukan Kota Serang Di Provinsi Banten. Disahkan pada tanggal 10 Agustus 2007 (LN No. 98 & TLN No. 4748).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007

Tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran Di Provinsi Lampung. Disahkan Pada Tanggal 10 Agustus 2007 (LN No. 99 & TLN No.4749).

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007

Tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung Di Provinsi Kalimantan Timur. Disahkan Pada Tanggal 10 Agustus 2007 (LN No. 100 & TLN No. 4750).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007

Tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya Di Provinsi Kalimantan Barat. Disahkan Pada Tanggal 10 Agustus 2007 (LN No. 101 & TLN No. 4751).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007

Tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur Di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Disahkan Pada Tanggal 10 Agustus 2007 (LN No. 102 & TLN No. 4752).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007

Tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara Di Provinsi Sumatera Utara. Disahkan Pada Tanggal 10 Agustus 2007 (LN No. 103 & TLN No. 4753).

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007

Tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Di Provinsi Sumatera Utara. Disahkan Pada Tanggal 10 Agustus 2007 (LN No. 104 & TLN No. 4754).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas. Disahkan pada tanggal 16 Agustus 2007 (LN No. 106 & TLN No. 4756)

i : Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Lembaga Penjaminan.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007

tentang Perpustakaan. Disahkan pada tanggal 1 Nopember 2007 (LN No. 129 & TLN No. 4774).

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007

tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang. Disahkan pada tanggal 1 Nopember 2007 (LN No. 130 & TLN No. 4775).

c : UU No. 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus. Disahkan pada tanggal 14 Oktober 2009.

tbl : UU No. 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus. Disahkan pada tanggal 14 Oktober 2009.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2007

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanganan Permasalahan Hukum Dalam Rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Disahkan pada tanggal 28 Desember 2007 (LN No. 168 & TLN No. 4796).

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TAHUN 2007 (PERPU TAHUN 2007)

PERPU No. 1 tahun 2007

Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 36 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang. Disahkan pada tanggal 4 Juni 2007 (LN No. 72 & TLN No. 4729)

uu : UU No. 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 36 Tahun 2000 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang. Disahkan pada tanggal 1 Nopember 2007.

PERPU No. 2 tahun 2007

Tentang Penanganan Permasalahan Hukum Dalam Rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Disahkan pada tanggal 4 Juni 2007 (LN No. 119 & TLN No. 4765)

uu : UU No. 48 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanganan Permasalahan Hukum Dalam Rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Disahkan pada tanggal 28 Desember 2007.

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 2008

UNDANG-UNDANG TAHUN 2008

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008
Tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Tengah Di Provinsi Papua. Disahkan Pada Tanggal 4 Januari 2008 (LN No. 3 & TLN No. 4802).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008
Tentang Pembentukan Kabupaten Yalimo Di Provinsi Papua. Disahkan Pada Tanggal 4 Januari 2008 (LN No. 4 & TLN No. 4303).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008
Tentang Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya Di Provinsi Papua. Disahkan Pada Tanggal 4 Januari 2008. (LN No 5 & TLN No. 4803)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2008
Tentang Pembentukan Kabupaten Nduga Di Provinsi Papua. Disahkan Pada Tanggal 4 Januari 2008 (LN No. 6 & TLN No. 4805).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008
Tentang Pembentukan Kabupaten Puncak Di Provinsi Papua. Disahkan Pada Tanggal 4 Januari 2008 (LN No. 7 & TLN No. 4806).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008
Tentang Pembentukan Kabupaten Dogiyai Di Provinsi Papua. Disahkan Pada Tanggal 4 Januari 2008 (LN No. 8 & TLN No. 4807).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008

Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Disahkan Pada Tanggal 31 Maret 2008 (LN No. 51 & TLN No. 4843).

i : UU No. 22 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Di Provinsi Sumatera Utara.

i : UU No. 23 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara Di Provinsi Sumatera Utara.

i : UU No. 24 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah Di Provinsi Bengkulu.

i : UU No. 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh.

i : UU No. 26 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara Di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

i : UU No. 27 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Sigi Di Provinsi Sulawesi Tengah.

i : UU No. 28 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara Di Provinsi Sulawesi Selatan.

i : UU No. 29 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Di Provinsi Sulawesi Utara.

i : UU No. 30 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Di Provinsi Sulawesi Utara.

i : UU No. 31 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya Di Provinsi Maluku.

i : UU No. 32 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan Di Provinsi Maluku

i : UU No. 33 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas Di Provinsi Kepulauan Riau.

i : UU No. 45 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara Di Provinsi Sumatera Utara.

i : UU No. 46 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat Di Provinsi Sumatera Utara.

i : UU No. 47 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli Di Provinsi Sumatera Utara.

i : UU No. 50 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat Di Provinsi Lampung.

i : UU No. 51 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten.

i : UU No. 52 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

i : UU No. 53 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai Di Provinsi Maluku Utara.

i : UU No. 54 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya Di Provinsi Papua.

i : UU No. 55 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Deiyai Di Provinsi Papua.

i : UU No. 56 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat.

i : UU No. 12 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti Di Provinsi Riau.

i : UU No. 13 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat Di Provinsi Papua Barat.

u : Perpu No. 1 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Disahkan pada tanggal 26 Pebruari 2009.

c : UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Disahkan pada tanggal 11 Mei 2012.

tbl : UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Disahkan pada tanggal 11 Mei 2012.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Disahkan pada tanggal 28 April 2008 (LN No. 59 & TLN No. 4844).

i : UU No. 22 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Di Provinsi Sumatera Utara. Disahkan pada tanggal 21 juli 2008.

i : UU No. 23 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara Di Provinsi Sumatera Utara. Disahkan pada tanggal 21 juli 2008.

i : UU No. 24 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah Di Provinsi Bengkulu. Disahkan pada tanggal 21 juli 2008.

i : UU No. 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh. Disahkan pada tanggal 21 juli 2008.

i : UU No. 26 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara Di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Disahkan pada tanggal 21 juli 2008.

i : UU No. 27 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Sigi Di Provinsi Sulawesi Tengah. Disahkan pada tanggal 21 juli 2008.

i : UU No. 28 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara Di Provinsi Sulawesi Selatan. Disahkan pada tanggal 21 juli 2008.

i : UU No. 29 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Di Provinsi Sulawesi Utara. Disahkan pada tanggal 21 juli 2008.

i : UU No. 30 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Di Provinsi Sulawesi Utara.

i : UU No. 31 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya Di Provinsi Maluku. Disahkan pada tanggal 21 juli 2008.

i : UU No. 32 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan Di Provinsi Maluku. Disahkan pada tanggal 21 juli 2008.

i : UU No. 33 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas Di Provinsi Kepulauan Riau. Disahkan pada tanggal 21 juli 2008.

i : UU No. 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam. Disahkan pada tanggal 21 juli 2008.

i : UU No. 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang. Disahkan pada tanggal 25 Juli 2008.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan. Disahkan pada tanggal 11 Agustus 2008.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan. Disahkan pada tanggal 11 Agustus 2008.

i : Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 Tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur. Disahkan pada tanggal 12 Agustus 2008.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Melalui Kegiatan Sertipikasi Hak Atas Tanah Untuk Peningkatan Akses Permodalan. Disahkan pada tanggal 26 September 2008.

i : UU No. 45 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara Di Provinsi Sumatera Utara. Disahkan pada tanggal 26 Nopember 2008.

i : UU No. 46 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat Di Provinsi Sumatera Utara. Disahkan pada tanggal 26 Nopember 2008.

i : UU No. 47 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli Di Provinsi Sumatera Utara. Disahkan pada tanggal 26 Nopember 2008.

i : UU No. 50 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat Di Provinsi Lampung. Disahkan pada tanggal 26 Nopember 2008.

i : UU No. 51 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten. Disahkan pada tanggal 26 Nopember 2008.

i : UU No. 52 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua Di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Disahkan pada tanggal 26 Nopember 2008.

i : UU No. 53 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai Di Provinsi Maluku Utara. Disahkan pada tanggal 26 Nopember 2008.

i : UU No. 54 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya Di Provinsi Papua. Disahkan pada tanggal 26 Nopember 2008.

i : UU No. 55 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Deiyai Di Provinsi Papua. Disahkan pada tanggal 26 Nopember 2008.

i : UU No. 56 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat. Disahkan pada tanggal 26 Nopember 2008.

i : UU No. 12 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti Di Provinsi Riau. Disahkan pada tanggal 16 Januari 2009.

i : UU No. 13 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat Di Provinsi Papua Barat. Disahkan pada tanggal 16 Januari 2009.

i : KEPPRES Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional. Disahkan pada tanggl 18 Maret 2009.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar. Disahka pada tanggal 1 Pebruari 2010.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pemindahan Pusat Pemerintahan Kota Padang dari Wilayah Kecamatan Padang Barat ke Wilayah Kecamatan Kototangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Maluku Tenggara Dari Wilayah Kota Tual Ke Wilayah Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Disahkan pada tanggal 30 April 2008 (LN No. 61 & TLN No. 4846).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

Tentang usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Disahkan pada tanggal 4 Juli 2008 (LN No. 93 & TLN No. 4866).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008

Tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Di Provinsi Sumatera Utara. Disahkan Pada Tanggal 21 Juli 2008 (LN No. 95 & TLN No. 4868).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008

Tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara Di Provinsi Sumatera Utara. Disahkan Pada Tanggal 21 Juli 2008 (LN No. 96 & TLN No. 4869).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008

Tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah Di Provinsi Bengkulu. Disahkan Pada Tanggal 21 Juli 2008 (LN No. 97 & TLN No.4870).

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008

tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh. Disahkan pada tanggal 21 Juli 2008 (LN No. 98 & TLN No. 4871).

i : Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pemindahan Ibu Kota Kerinci dari Wilayah Kota Sungaipenuh ke Wilayah Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008

Tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara Di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Disahkan Pada Tanggal 21 Juli 2008 (LN No. 99 & TLN No. 4872).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008

Tentang Pembentukan Kabupaten Sigi Di Provinsi Sulawesi Tengah. Disahkan Pada Tanggal 21 Juli 2008 (LN No. 100 & TLN No. 4873).

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008

Tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara Di Provinsi Sulawesi Selatan. Disahkan Pada Tanggal 21 Juli 2008 (LN No. 101 & TLN No. 4874).

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008

Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Di Provinsi Sulawesi Utara. Disahkan Pada Tanggal 21 Juli 2008 (LN No. 102 & TLN No 4875).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008

Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Di Provinsi Sulawesi Utara. Disahkan Pada Tanggal 21 Juli 2008 (LN No. 103 & TLN No. 4876).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008

Tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya Di Provinsi Maluku. Disahkan Pada Tanggal 21 Juli 2008 (LN No. 104 & TLN No. 4878).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008

Tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan Di Provinsi Maluku. Disahkan Pada Tanggal 21 Juli 2008 (LN No. 105 & TLN No. 4878).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008

Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas Di Provinsi Kepulauan Riau. Disahkan Pada Tanggal 21 Juli 2008 (LN No. 106 & TLN No.4879).

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008

Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,

Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam. Disahkan Pada Tanggal 21 Juli 2008 (LN No. 107 & TLN No. 4880).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang. Disahkan Pada Tanggal 25 Juli 2008 (LN No. 112 & TLN No. 4884).

i : UU No. 13 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat Di Provinsi Papua Barat.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Disahkan pada tanggal 23 September 2008 (LN No. 133 & TLN No. 4893).

i : Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 Tentang perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008

Tentang Ombudsman Republik Indonesia. Disahkan pada tanggal 7 Oktober 2008 (LN No. 139 & TLN No. 4899).

i : UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008

Tentang Kementerian Negara. Disahkan pada tanggal 6 Nopember 2008 (LN No. 166 & TLN No. 4916).

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008

Tentang Wilayah Negara. Disahkan Pada Tanggal 14 November 2008 (LN No. 177 & TLN No. 4925).

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008

Tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara Di Provinsi Sumatera Utara. Disahkan Pada Tanggal 26 November 2008 (LN No. 182 & TLN No. 4929).

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008

Tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat Di Provinsi Sumatera Utara. Disahkan Pada Tanggal 26 November 2008 (LN No. 183 & TLN No.4930).

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008

Tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli Di Provinsi Sumatera Utara. Disahkan Pada Tanggal 26 November 2008 (LN No. 184 & TLN No.4931).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008

Tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung. Disahkan Pada Tanggal 26 November 2008 (LN No. 185 & TLN No.4932).

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008

Tentang Pembentukan Kota Mesuji di Provinsi Lampung. Disahkan Pada Tanggal 26 November 2008 (LN No.186 & TLN No.4933).

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008

Tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat Di Provinsi Lampung. Disahkan Pada Tanggal 26 November 2008 (LN No. 187 & TLN No. 4934).

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008

Tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten. Disahkan Pada Tanggal 26 November 2008.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008

Tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua Di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Disahkan Pada Tanggal 26 November 2008 (LN No. 189 & TLN No. 4936)

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008

Tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai Di Provinsi Maluku Utara. Disahkan Pada Tanggal 26 November 2008 (LN No. 190 & TLN No. 4937).

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008

Tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya Di Provinsi Papua. Disahkan Pada Tanggal 26 November 2008 (LN No. 191 & TLN No. 4938).

Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2008

Tentang Pembentukan Kabupaten Deiyai Di Provinsi Papua. Disahkan Pada Tanggal 26 November 2008 (LN No. 192 & TLN No. 4939).

Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008

Tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat. Disahkan Pada Tanggal 26 November 2008 (LN No. 193 & TLN No. 4940).

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TAHUN 2008 (PERPU TAHUN 2008)

PERPU No. 1 tahun 2008

Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Disahkan pada tanggal 16 April 2008. (LN No. 57 & TLN No. 4842)

uu : UU No. 35 Tahun 2008 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang. Disahkan Pada Tanggal 25 Juli 2008.

PERPU No. 3 tahun 2008

Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Disahkan pada tanggal 13 Oktober 2008. (LN No. 143 & TLN No. 4902)

t : UU No. 7 Tahun 2009 Tentang Penetapan PERPU Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang.

uu : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang.

PERPU No. 5 tahun 2008

Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Disahkan pada tanggal 31 Desember 2008 (LN No. 211 & TLN No. 4953).

uu : UU No. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan PERPU No. 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 2009

UNDANG-UNDANG TAHUN 2009

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Disahkan Pada Tanggal 12 Januari 2009 (LN No. 3 & TLN No. 4958).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Disahkan pada tanggal 12 Januari 2009 (LN No. 4 & TLN No. 4959).

t : Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang. Disahkan pada tanggal 13 Januari 2009 (LN No. 8 & TLN No. 4963).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009

Tentang Kepariwisataan. Disahkan pada tanggal 16 januari 2009 (LN No. 11 & TLN No. 4966)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009

Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti Di Provinsi Riau. Disahkan Pada Tanggal 16 Januari 2009 (LN No. 13 & TLN No. 4968).

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009

Tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat Di Provinsi Papua Barat. Disahkan Pada Tanggal 16 Januari 2009 (LN No. 14 & TLN No. 14 & TLN No. 4969).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009

Tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang. Disahkan Pada Tanggal 25 Maret 2009 (LN No. 62 & TLN No. 4999).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009

Tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Undang-Undang. Disahkan Pada Tanggal 29 Mei 2009 (LN No. 78 & TLN No. 5015).

c : UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Disahkan pada tanggal 11 Mei 2012.

tbl : UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Disahkan pada tanggal 11 Mei 2012.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009

Tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. Disahkan pada tanggal 18 Juni 2009. (LN No. 94 & TLN No. 5023)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

tentang Pelayanan Publik. Disahkan pada tanggal 18 Juli 2009 (LN No. 112 & TLN No. 5038).

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Loket Pelayanan Pertanahan.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelesaian Kerugian Negara Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Penghargaan Di Bidang Pertanahan.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu. Disahkan pada tanggal 4 Pebruari 2011.

i : Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah. Disahkan pada tanggal 30 Maret 2011

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009

Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disahkan pada tanggal 29 Agustus 2009 (LN No. 118 & TLN No. 5041).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Disahkan pada tanggal 15 September 2009 (LN No. 130 & TLN No. 5049).

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009

Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian. Disahkan pada tanggal 15 September 2009 (LN No. 131 & TLN No. 5050).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Disahkan Pada Tanggal 3 Oktober 2009. (LN No. 140 & TLN No. 5059)

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2009

Tentang Penetapan Perpu No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian menjadi

undang-Undang. Disahkan Pada Tanggal 14 Oktober 2009. **(LN No. 145 & TLN No. 5064).**

c : UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

tbl : UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009

Tentang Kawasan Ekonomi Khusus. Disahkan pada tanggal 14 Oktober 2009 (LN No. 147 & TLN No. 5066).

i : Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009

Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Disahkan pada tanggal 14 Oktober 2009

i : Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar.

t : Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011. Tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Disahkan pada tanggal 5 januari 2011

i : Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011. Tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Disahkan pada tanggal 5 januari 2011.

i : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009

Tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 8 tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Disahkan Pada Tanggal 15 Oktober 2009 (LN No. 150 & TLN No.5069)

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009

Tentang Kearsipan. Disahkan pada tanggal 23 Oktober 2009 (LN No. 152 & TLN No. 5071).

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Disahkan Pada Tanggal 29 Oktober 2009.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Tentang Kekuasaan Kehakiman. Disahkan pada tanggal 29 Oktober 2009 (LN No. 157 & TLN No. 5076)

i : UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

i : UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009

Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. Disahkan Pada Tanggal 29 Oktober 2009 (LN No. 158 & TLN No. 5077).

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Disahkan Pada Tanggal 29 Oktober 2009 (LN No. 160 & TLN No. 5079).

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TAHUN 2009 (PERPU TAHUN 2009)

PERPU No. 1 Tahun 2009

tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Disahkan pada tanggal 26 Pebruari 2009 (LN No. 41 & TLN No.4986).

PERPU No. 3 Tahun 2009

tentang Perubahan atas UU No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Disahkan pada tanggal 17 Juli 2009 (LN No. 111 & TLN No.5037).

uu : UU No. 37 Tahun 2009 tentang Penetapan Perpu No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian menjadi undang-Undang**.**

PERPU No. 4 Tahun 2009

tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Disahkan pada tanggal 21 september 2009 (LN No. 132 & TLN No.5051).

c : UU No. 3 Tahun 2010 tentang Pencabutan Perpu No. 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Disahkan pada tanggal 15 juni 2010.

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 2010

UNDANG-UNDANG TAHUN 2010

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010

Tentang Pencabutan Perpu No. 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Disahkan pada tanggal 15 juni 2010 (LN No. 76 & TLN No. 5137).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010

Tentang Keprotokolan. Disahkan pada tanggal 19 Nopember 2010. (LN No. 125 & TLN No. 5166)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010

Tentang Cagar Budaya. Disahkan Pada Tanggal 24 November 2010. Disahkan Pada Tanggal 24 November 2010 (LN No. 130 & TLN No. 5168).

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 2011

UNDANG-UNDANG TAHUN 2011

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011

tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Disahkan pada tanggal 12 Januari 2011 (LN No. 7 & TLN No.5188).

i : UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011

tentang Informasi Geospasial. Disahkan pada tanggal 21 April 2011 (LN No. 49 & TLN No. 5214).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011

tentang Keimigrasian. Disahkan pada tanggal 5 Mei 2011 (LN No. 52 (TLN No. 5216).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Disahkan pada tanggal 20 Juli 2011 (LN No. 70 & TLN No. 5226).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Disahkan pada tanggal 12 Agustus 2011 (LN No. 82 & TLN No. 5234).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011

tentang Bantuan Hukum. Disahkan pada tanggal 31 Oktober 2011 (LN No. 104 & TLN No. 5248).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011

tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Disahkan pada tanggal 9 Nopember 2011 (LN No. 106 & TLN No. 5250).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011

tentang Rumah Susun. Disahkan pada tanggal 10 November 2011 (LN No. 108 & TLN No. 5252).

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 2012

UNDANG-UNDANG TAHUN 2012

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012

Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Disahkan Pada Tanggal 14 Januari 2012 (LN No. 22 & TLN No. 5269).

t : Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

i : Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012

Tentang Penanganan Konflik Sosial. Disahkan Pada Tanggal 10 Mei 2012 (LN No. 116 & TLN No. 3515).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012

Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Disahkan Pada Tanggal 31 Agustus 2012 (LN No. 170 & TLN No. 5339)

t : Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Daftar Peraturan Perundang-Undangan
Pelaksanaan UU No. 86 Tahun 1958
Tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda

No.	Peraturan Perundang-Undangan	Tentang	Status
1.	UU No. 86 Tahun 1958	Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda.	
2.	PP No. 2 Tahun 1959	Pelaksanaan Undang-Undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda.	
3.	PP No. 3 Tahun 1959	Pembentukan Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda.	
4.	PP No. 19 Tahun 1959	Penentuan Perusahaan Pertanian/ Perkebunan Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi.	
5.	PP No. 33 Tahun 1959	Penentuan Perusahaan Dagang Yang Besar Milik Belanda Beserta Cabang-cabang dan Anak-anak Perusahaannya Yang Dikenakan Nasionalisasi.	
6.	PP No. 1 Tahun 1960	Penentuan Perusahaan-Perusahaan Farmasi Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi.	Diubah dengan PP No. 50 Tahun 1960.

7.	PP No. 2 Tahun 1960	Penetuan Perusahaan Pemborongan Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi.	
8.	PP No. 3 Tahun 1960	Penentuan Perusahaan Asuransi Kerugian Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi.	
9.	PP No. 13 Tahun 1960	Penentuan Perusahaan Bank di Indonesia Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi.	Diubah dengan PP No. 44 Tahun 1960.
10.	PP No. 29 Tahun 1960	Tentang Penentuan Perusahaan Pertanian/Perkebunan Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi.	
11.	PP No. 30 Tahun 1960	Penetapan Perusahaan Dagang Milik Belanda Beserta Cabang-cabang Yang Dikenakan Nasionalisasi.	
12.	PP No. 33 Tahun 1960	Penetapan Perusahaan Di Indonesia Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi.	
13.	PP No. 34 Tahun 1960	Nasionalisasi Perusahaan N.V.K. P.M. di Indonesia.	
14.	PP No. 35 Tahun 1960	Nasionalisasi N.V. “Semarangsche Stoomboot en Prauwen Veer (SSPV) dan N.V. “Semarang Veer”.	

15.	PP No. 44 Tahun 1960	Penambahan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1960 (lembaran negara tahun 1960 Nomor 35) tentang Penentuan Perusahaan Bank Di Indonesia Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi.	
16.	PP No. 48 Tahun 1960	Penentuan Perusahaan Pertanggungan Jiwa Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi.	
17.	PP No. 50 Tahun 1960	Penambahan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 4) tentang Penentuan Perusahaan-Perusahaan Farmasi Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi.	
18.	PP No. 52 Tahun 1960	Nasionalisasi Milik Perusahaan Royal Interocean Lines (R.I.L).	
19.	PP No. 1 Tahun 1961	Penentuan Perusahaan Dagang Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi.	
20.	PP No. 2 Tahun 1961	Penentuan Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi.	

21.	PP No. 235 Tahun 1961	Penentuan Perusahaan Perusahaan Farmasi Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi.	
22.	KEPMEN PERTAMA No. 485/M.P/1959	Ketentuan-Ketentuan Tentang Kebijaksanaan Pemerintah terhadap Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda dan Perusahaan Asing di Indonesia.	
23.	KMPA No. SK.8/Ka/1963	Pemberian Hak Atas Tanah Bekas Milik Perusahaan-Perusahaan Belanda Kepada Perusahaan-Perusahaan Negara dan Bank-Bank Negara.	
24.	KMPA No. SK.37/Ka/1964	Memperpanjang Jangka Waktu Pendaftaran Tersebut Pada Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor SK.8/Ka/1963.	
25.	KMA No. SK.5/Depag/1965	Memperpanjang Jangka Waktu Pendaftaran Tersebut Pada Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor SK.8/Ka/1963 Bagi PNPR Wisayayasa.	
26.	SE DJA No. DHK/37/13 Tahun 1967	Permohonan Hak Guna Usaha dengan Prosedur Khusus Terhadap Tanah-Tanah yang Terkena SK.8/Ka/1963.	

27.	SE DJA No. DHK/37/14 Tahun 1967	Prosedur Permohonan Hak Atas Tanah Bagi yang Terlambat Melaksanakan SK.8/Ka/1963.	

Daftar Peraturan Perundang-undangan Pelaksanaan Peraturan Presidium Kabinet Dwikora RI No. 5/Prk/Tahun 1965 tentang Penegasan Status Rumah/Tanah Kepunyaan Badan-Badan Hukum yang Ditinggalkan Direksi/Pengurusnya

No.	Peraturan Perundang-Undangan	Tentang	Status
	Presidium Kabinet Dwikora RI No. 5/Prk/Tahun 1965	Penegasan Status Rumah/Tanah Kepunyaan Badan-badan Hukum Yang Ditinggalkan Direksi/Pengurusnya	
	Perdirjen Agraria No. 3 Tahun 1968	Pelaksanaan Peraturan Presidium Kabinet No. 5 Prk./1965 • Mencabut Peraturan Bersama Mentrans, Menteri Agraria dan Menteri Dalam Negeri No. 25/19/59; Sk.8158; dan Pem. 61/9/29-14	

Daftar Peraturan Perundang-Undangan
Pelaksanaan UU No. 3 Prp Tahun 1960
Tentang Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan
Warga Negara Belanda (P3MB)

No.	Peraturan Perundang-Undangan	Tentang	Status
1.	UU No. 3 Prp. Tahun 1960	Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan Warga Belanda	
2.	PP No. 223 Tahun 1961	Pedoman Pelaksanaan Pasal 4 dan Pasal 5 UU No. 3 Prp Tahun 1960 tentang Penguasaan Benda-benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda.	
3.	KMA No. SK.330/ Ka/1960	Panitya-panitya pelaksana penguasaan benda-benda tetap milik perseorangan Warga Negara Belanda	
4.	Pengum. Dep. Agr. Tgl. 17-2-1960	Pelaksanaan UU No.3 Prp Tahun 1960.	
5.	Ped. Dep. Agr. Tgl. 17-2-1960	Pedoman I untuk melaksanakan penguasaan benda-benda tetap milik perseorangan Warga Negara Belanda.	

6.	Ped. Dep. Agr. Tgl. 12 Juli 1960	Pedoman II untuk melaksanakan penguasaan benda-benda tetap milik perseorangan Warga Negara Belanda.	
7.	KMA No. SK.951/Ka/1960	Pelaksanaan UU No. 3 Prp. Tahun 1960 untuk daerah Kotapraja Jakarta-Raya.	
8.	Ped. Dep. Agr. Tgl. 1 April 1961	Pedoman III untuk melaksanakan penguasaan benda-benda tetap milik perseorangan warga Negara Belanda.	
9.	Kepmen Pertama RI No. 62/MP/1961	Larangan untuk membebani atau memindahkan barang-barang tetap milik perusahaan Belanda yang dikuasai/dinasionalisir.	